



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan periode 2016-2021 dan pelantikannya pada tanggal 23 Februari 2016 sekaligus menjadi momentum dimulainya penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 263 ayat 1, menyatakan dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dimaksud dengan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 11 yang menyatakan Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah terdiri atas :



1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 Urusan, yaitu :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketenteramaan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 urusan, yaitu :
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan Informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan;
  - r. Kearsipan
3. Urusan pemerintah pilhan 8 urusan, yaitu :
  - a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;



- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dengan menggunakan pendekatan : *teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah* dan *bawah atas*, dan dirumuskan secara *transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan* dan *berwawasan lingkungan*.

Proses penyusunan RPJMD melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RPJMD;

Persiapan penyusunan meliputi:

- a. Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. Orientasi mengenai RPJMD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD;

Penyusunan rancangan awal meliputi :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Penelaahan RTRW kabupaten Konawe Selatan dan RTRW kabupaten/kota sekitar;
- c. Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten Konawe Selatan;
- d. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Konawe Selatan;
- f. Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
- g. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten Konawe Selatan;
- h. Penelaahan RPJPD kabupaten Konawe Selatan;
- i. Perumusan penjelasan visi dan misi;

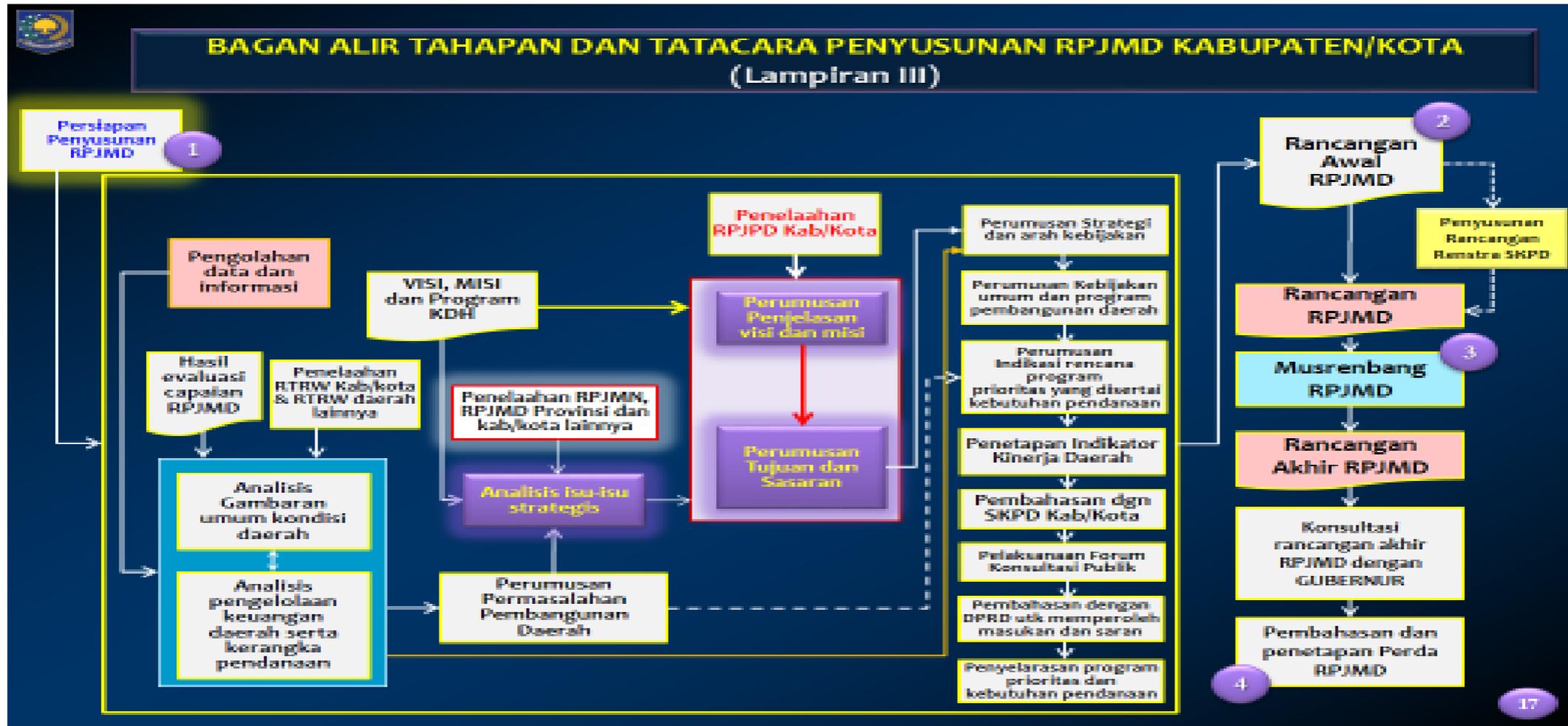


- j. Perumusan tujuan dan sasaran;
  - k. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - l. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten Konawe Selatan;
  - m. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - n. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
  - o. Pembahasan dengan SKPD kabupaten Konawe Selatan;
  - p. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
  - q. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
  - r. Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
3. Penyusunan rancangan RPJMD;
- Penyusunan rancangan RPJMD meliputi:
- a. Penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra SKPD.
  - b. Verifikasi rancangan Renstra SKPD.
  - c. Rancangan Renstra SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD.
  - d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD; Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
4. Perumusan rancangan akhir RPJMD;
- Perumusan rancangan akhir meliputi:
- a. Penyusunan rancangan akhir RPJMD dengan memperhatikan hasil musrenbang RPJMD
  - b. Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - c. Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sesuai hasil konsultasi.
5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- Penetapan Peraturan Daerah melalui :
- a. Penyusunan raperda.



- b. Pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan Bupati Konawe Selatan.
- c. Evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- d. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh Bupati Konawe Selatan.

Proses penyusunan RPJMD Konawe Selatan tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota .



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Konawe Selatan tahun 2016-2021 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



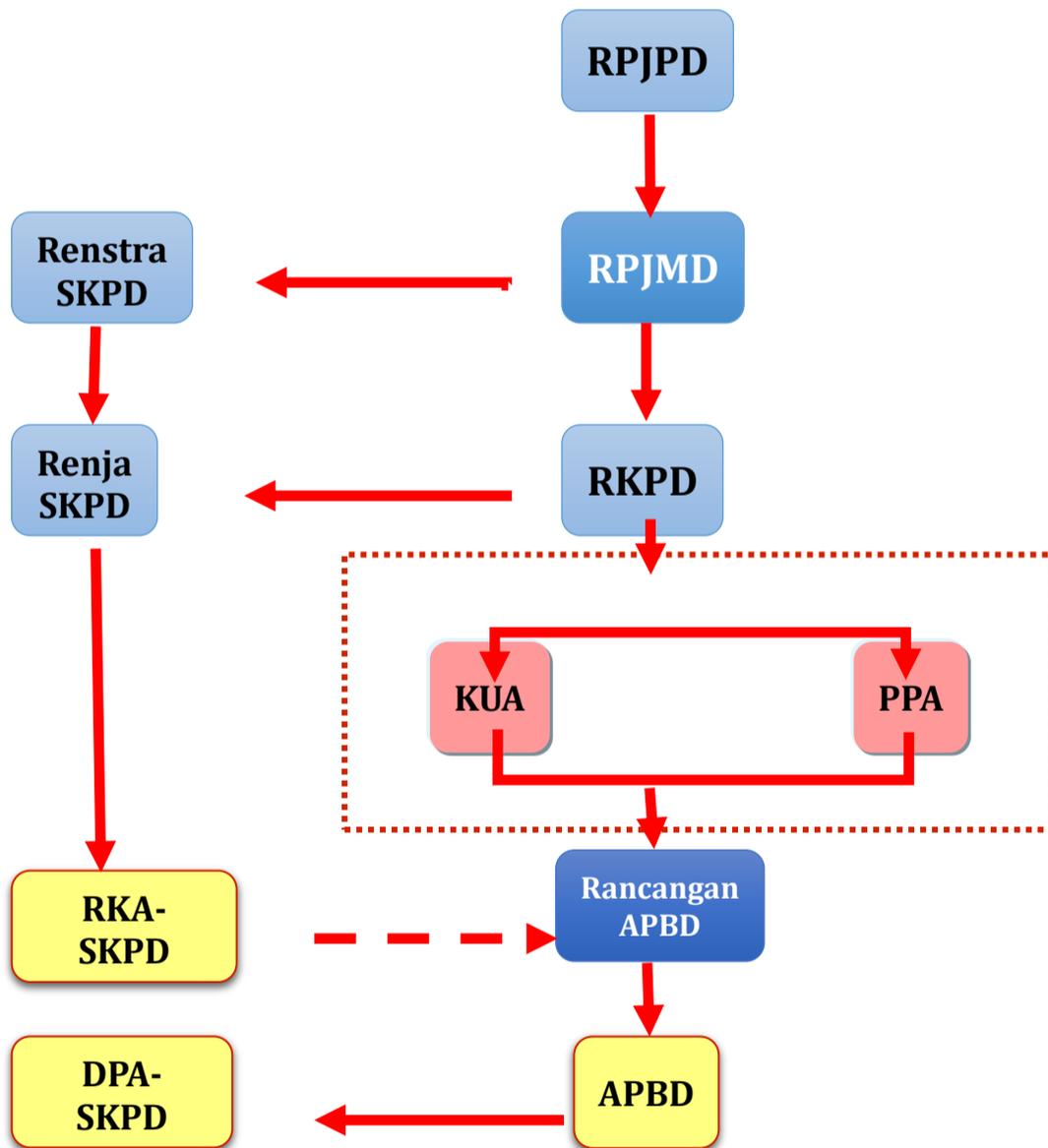
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **131.74.828** Tahun 2016 tentang Pengangkatan H. Surunuddin Dangga, ST. MM sebagai Bupati Konawe Selatan Tahun 2016-2021.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **132.74.828** Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dr. H. Arsalim, SE. MSi sebagai Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025.



27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19);

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai dokumen rencana pemerintah daerah. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana tahunan daerah untuk tahun 2016 sampai dengan 2021 yang dituangkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).



Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Daerah



Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Sistem Pemerintahan Daerah yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menempatkan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 sebagai satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan RPJMD dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan adalah sebagai berikut :

- a. RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- b. RPJMD dilaksanakan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- c. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- d. Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi dan misi Renstra SKPD;
- e. Seluruh program selama tahun 2016-2021 pada Renstra SKPD memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- f. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- g. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- h. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- i. Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan RPJM Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- BAB I Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  - 1.5 Maksud dan Tujuan
  - 1.6 Keterbasan Penyusunan
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
  - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
  - 4.1 Permasalahan Pembangunan
  - 4.2 Isu Strategis
- BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
  - 5.1 Visi
  - 5.2 Misi
  - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan



## 1.5 Maksud dan Tujuan

### 1.5.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang dimaksudkan sebagai penjabaran dan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan pada periode tahun 2016-2021, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### 1.5.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 khususnya periode ketiga RPJMD;
2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2016-2021;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, merumuskan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016-2021. Adapun penjelasan bahwa RPJMD Kabupaten Konawe Selatan mempunyai fungsi pokok sebagai :

1. Acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2016-2021;
2. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;



3. Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
4. Pedoman seluruh pemangku kepentingan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan; dan
5. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

#### **1.6. Keterbatasan Penyusunan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 sebagai sebuah dokumen perencanaan mengalami beberapa hambatan dan keterbatasan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Data dan Informasi yang relevan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- b. Sehubungan proses penyusunan RPJMD berbasis kinerja, maka terjadi bias *nomenclatur* program, karena menyesuaikan dengan nomenclatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ada, mempengaruhi jumlah urusan, program dan pendanaan indikatif untuk beberapa urusan yang dialihkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu wilayah otonomi di Sulawesi Tenggara, yang ditunjang oleh potensi sumberdaya yang dimilikinya. Posisi wilayah Kabupaten Konawe Selatan sangat strategis yang merupakan wilayah lintas selatan jazirah Sulawesi Tenggara yang menghubungkan beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Pada bab ini akan dibahas posisi relatif Kabupaten Konawe Selatan dibanding Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara dan Nasional.

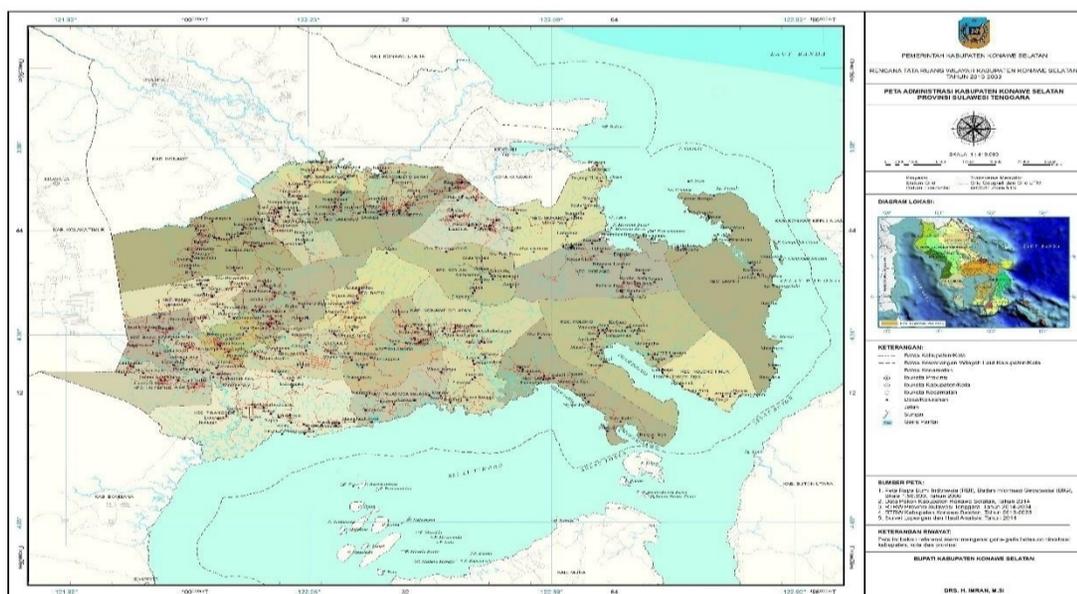
### 2.1 Aspek Geografis dan Demografis

#### 2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

##### 2.1.1.1 Batas Administrasi & Kondisi Geografi

Secara astronomis Konawe Selatan terletak antara 30.58.56' dan 4.031.52' lintang Selatan, dan antara 121.58' dan 123.16' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Konawe Selatan memiliki batas-batas Utara-Konawe dan Kota Kendari; Timur-Laut Banda dan Laut Maluku; Selatan-Bombana dan Muna; Barat-Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Konawe Selatan



Sumber : BAPPEDA Kab. Konawe Selatan, 2016

Secara administrasi, Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 terdiri atas 25 Kecamatan yaitu Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Andoolo Barat, Buke, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Lainea, Laeya, Kolono,



Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua dan Basala.

Tabel 2.1  
Wilayah Administrasi Kab. Konawe Selatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Ibu Kota	Desa Definitif	Desa Persiapan	Kelurahan
1	Tinanggea	Tinanggea	22	1	2
2	Lalembuu	Atari Indah	17	1	1
3	Andoolo	Andoolo	8	0	2
4	Andoolo Barat	Anese	10	0	0
5	Buke	Buke	16	0	0
6	Palangga	Palangga	14	1	1
7	Palangga Selatan	Amondo	9	0	1
8	Baito	Baito	8	0	0
9	Lainea	Lainea	12	1	0
10	Laeya	Punggaluku	15	0	2
11	Kolono	Kolono	21	0	1
12	Kolono Timur	Tumbu-Tumbu Jaya	8	0	0
13	Laonti	Ulu Sawa	19	1	0
14	Moramo	Lapuko	19	1	1
15	Moramo Utara	Lalowaru	9	0	1
16	Konda	Konda	16	0	1
17	Wolasi	Aoma	7	3	0
18	Ranomeeto	Ranomeeto	11	0	1
19	Ranomeeto Barat	Lameuru	9	0	0
20	Landono	Landono	11	1	1
21	Sabulakoa	Sabulakoa	10	0	0
22	Mowila	Mowila	20	0	0
23	Angata	Motaha	24	0	0
24	Benua	Horodopi	12	1	0
25	Basala	Basala	9	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>337</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

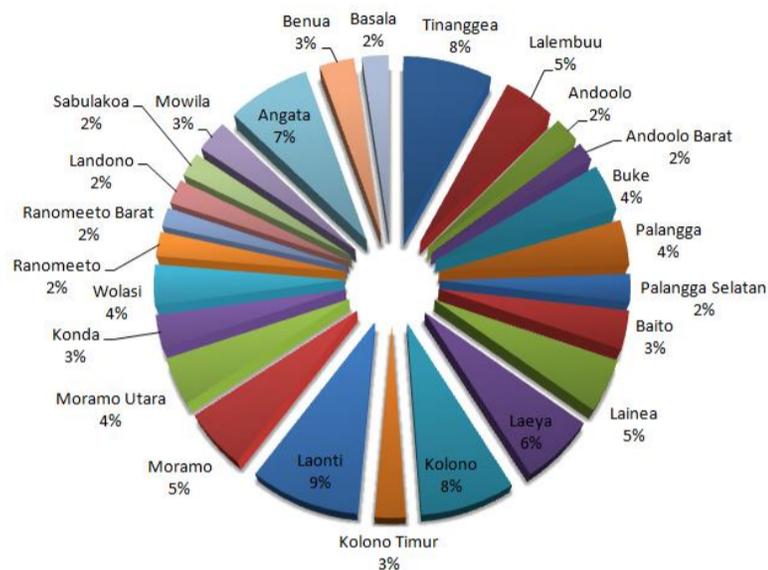
Sumber : Konawe Selatan dalam Angka, Tahun 2015.

Luas wilayah daratan Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut)



± 9.368 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai keseluruhan termasuk pulau-pulau kecil yaitu ± 200 Km.

Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Konawe Selatan Menurut Kecamatan, 2015



Sumber : BAPPEDA Kab. Konawe Selatan, 2016

selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, Konawe Selatan memiliki pulau kecil yang mempunyai potensi pengembangan pariwisata yang menjajikan antara lain Pulau Hari dan Pulau Senja.

### 2.1.1.2 Topografi

Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit oleh dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan di sektor pertanian. Berdasarkan garis ketinggian menurut hasil penelitian wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat dibedakan atas 5 kelas sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7. berikut.

Tabel 2.2 Luas Daratan Kabupaten konawe Selatan Menurut Ketinggian diatas Permukaan Air Laut

Tinggi diatas Permukaan Laut	Luas Daratan (Ha)	Persentase (%)
0-25	36.610,16	8,11
25-100	142.739,00	31,62
100-500	177.769,20	39,38



500-1.000	61.663,97	13,66
1.000 keatas	32.637,67	7,23
<b>Jumlah</b>	<b>451.420,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan

Selain menurut ketinggian, dilakukan juga pemetaan terhadap klasifikasi kemiringan dan jenis tanah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. Jenis tanah di Kabupaten Konawe Selatan meliputi Latosol dengan luas 105.451,71 Ha atau 23,36 persen, Podzolik seluas 127.074,73 Ha atau 28,15 persen, Organosol seluas 21.261,88 Ha atau 4,71 persen, Mediteran seluas 15.303,14 Ha atau 3,39 persen, Aluvial seluas 21.668,16 Ha atau 4,80 persen serta tanah Campuran seluas 160.660,38 Ha atau 35,59 persen.

Tabel 2.3 Kemiringan Tanah yang Telah di Petakan

Tingkat Kemiringan Tanah		Luas (Ha)	Persen (%)
Persen (%)	Derajad (0°)		
00-02	0,00-1,8	137.773,38	30,52
03-15	1,8-13,5	147.208,06	32,61
16-40	13,5-36,0	123.373,09	27,33
41 keatas	36,0-90,0	43.065,47	9,54
<b>Jumlah</b>		<b>451.420,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan

### 2.1.1.3 Geologi

Secara geologi Sebagian Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yaitu di Kecamatan Lainea dan Kolono serta Moramo khususnya Dearah Amohola merupakan daerah yang menunjukkan fenomena geologi khusus berupa gejala panas bumi.

Menurut Survei Terpadu Geologi Geokimia Daerah Panas Bumi Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, oleh Pusat Sumber Daya Geologi tahun 2010. Daerah panas bumi Lainea secara umum berada pada tatanan geologi yang didominasi oleh batuan Metamorf dan endapan rombakan. Litologinya terdiri dari batuan malihan Sabak berumur Pra-

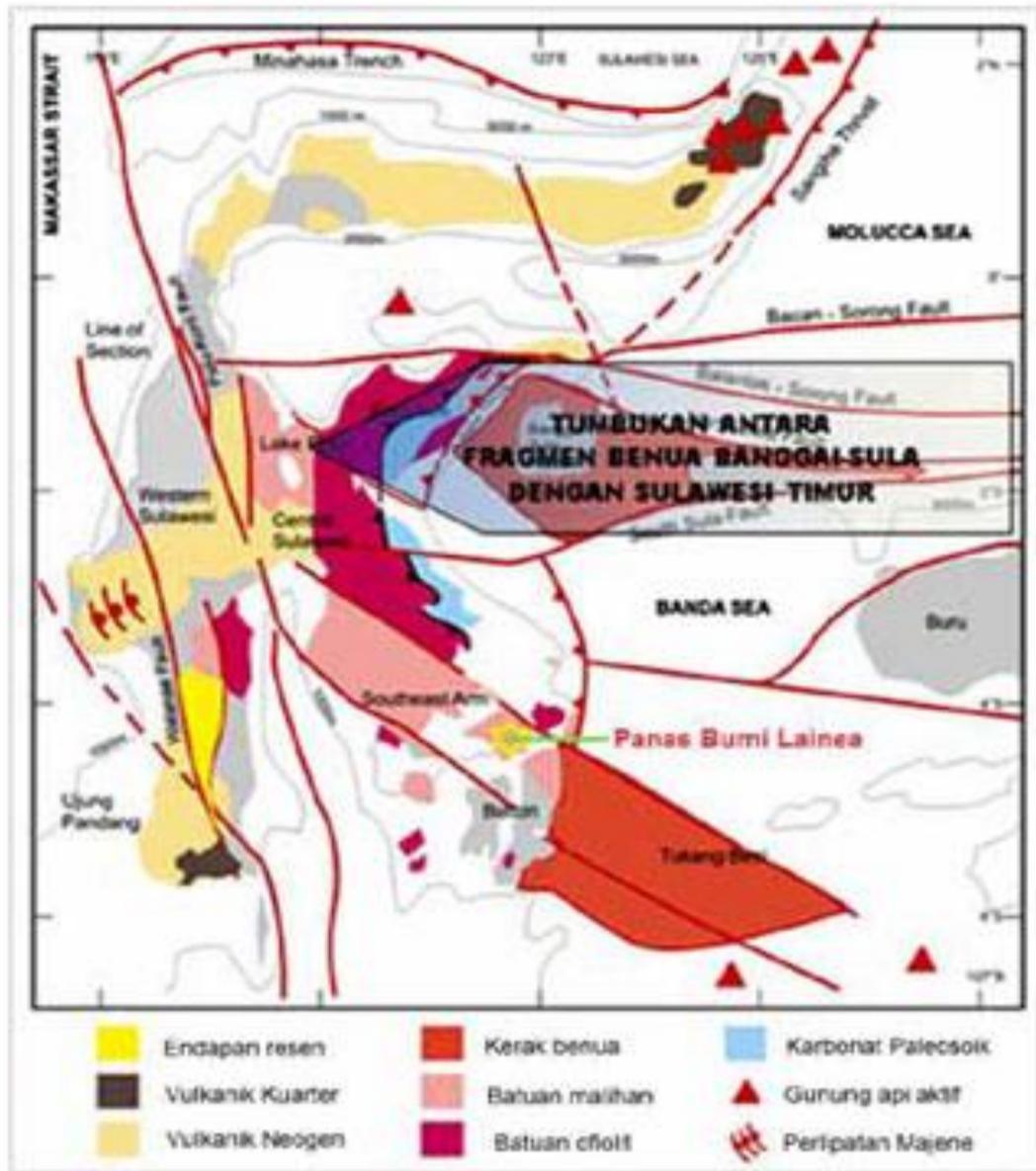


Tersier, batuan Meta-gamping kristalin yang berumur pra-Tersier, batuan endapan rombakan (reworked) yang tersusun oleh komponen-komponen batuan lebih tua, tidak padu, berumur Kwartar.

Terdapat gejala mineralisasi berupa urat-urat kuarsa dan mineral-mineral sulfida, yang menandakan adanya gejala hidrotermal fosil. Alterasi hidrotermal sangat intensif di zone mineralisasi berupa ubahan *clay* atau *argillic*.

Gejala panas bumi ini diperlihatkan oleh sejumlah manifestasi panas bumi berupa mata air panas dengan temperatur mencapai 80 °C di Sungai Lainya, tanah panas serta zona alterasi mineral lempung yang termasuk dalam zona argilik dengan penyebaran yang cukup luas di sekitar Sungai Landai.

Struktur geologi yang dijumpai di daerah Konawe Selatan meliputi lipatan, kekar dan sesar. Lipatan dapat dijumpai di beberapa tempat dimana batupasir malih tersingkap, namun sangat sulit untuk menentukan arah sumbu lipatannya karena telah terjadi perombakan. Kekar dijumpai di hampir seluruh satuan batuan penyusun daerah ini kecuali alluvium, dan batuan kompak, batuan molasa yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Sesar utama yang terjadi di daerah konawe selatan dapat dijumpai di wilayah kolono, yang memotong hampir semua batuan kecuali alluvial.



Gambar 2.3. Peta Sebaran Batuan Penyusun Formasi Geologi Sulawesi

Berdasarkan gambar 2.3. di atas dan data geologi lembar mamuju, Sulawesi, yang dilaporkan Ratman, N. Dkk 1993 dan Simandjuntak, T.O. dkk (1993) pusat penelitian dan pengembangan geologi Bandung, diketahui bahwa Wilayah Konawe Selatan di dominasi oleh satuan batuan malihan dan berada di antara 2 sesar. Selain itu terdapat juga susunan batuan choit. Ciri dan lokasi batuan tersebut di Konawe Selatan adalah :



**a) Satuan Batu Pasir Malih**

Satuan batu pasir malih ini tersebar di beberapa lokasi, yaitu di daerah kolono, Lainea dan Laeya

**b) Satuan Batu Gamping Malih**

Satuan batu gamping malih ini tersebar di sekitar daerah moramo, moramo utara dan kolono, lainea, laeya dan palangga serta palangga selatan.

**2.1.1.4 Hidrologi**

Dalam upaya untuk memelihara keseimbangan ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu dicermati sirkulasi air yang masuk (dalam bentuk curah hujan) dan jumlah air yang keluar melalui cara evapotranspirasi, pengisian air tanah (*ground wafer recface*) dan jumlah air yang mengalir sebagai run off (*surface and subsurface*).

Konawe Selatan mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Lapoa, Laeya dan Sungai Roraya.

**2.1.1.5 Klimatologi**

Konawe Selatan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau terjadi antara Juni sampai dengan September, dimana angin timur yang bertiup dari Australia tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya musim hujan terjadi antara Desember sampai dengan Maret, dimana angin barat yang bertiup dari Benua Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan atau yang lebih dikenal sebagai musim pancaroba. Akan tetapi akhir-akhir ini akibat dari perubahan kondisi alam yang sering tidak menentu, keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan.

Curah hujan dipengaruhi oleh perbedaan iklim, orografi dan perputaran arus udara sehingga menimbulkan perbedaan curah hujan setiap



bulan. Curah hujan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2014 mencapai 2.450,5 mm dalam 185 Hari Hujan (HH)

Tinggi rendahnya suhu udara dipengaruhi oleh letak geografis wilayah dan ketinggian dari permukaan laut. Konawe Selatan yang terletak di daerah khatulistiwa dengan ketinggian pada umumnya di bawah 1.000 meter, sehingga beriklim tropis. Pada tahun 2014, suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 30°C - 34°C, dan suhu minimum rata-rata berkisar antara 19°C - 24°C. Tekanan udara rata-rata 1.011,5 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 82 persen. Kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu disekitar 3 m/sec.

## **2.1.2 Penggunaan Lahan**

### **2.1.2.1 Kawasan Lindung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nomor 19 Tahun 2013, penetapan kawasan lindung bawahan terdiri dari :

1. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 44.251 Ha, yang tersebar pada Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Lainea, Konda, Ranomeeto, Wolasi, Baito, Landonu, Mowila, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea.

2. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan Perlindungan Setempat terdiri Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan sekitar Waduk/rencana waduk, dan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

a. Sempadan pantai

Sempadan pantai terdiri atas Sepanjang pantai di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, Lainea dan Tinanggea

b. Sempadan sungai

Sempadan sungai terdiri atas Sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa,



DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Osen, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya dan DAS Konaweha

c. Kawasan sekitar Waduk

Rencana waduk direncanakan di Kecamatan Laeya, Moramo, Palangga Selatan dan Baito.

d. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang telah ada terdiri atas jalur hijau (Sepanjang ruas-ruas jalan di Kecamatan Andoolo, Palangga dan Laeya), Taman kota (Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan), Tempat Pemakaman Umum (Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Laeya meliputi di Kelurahan Laeya, Desa Aepodu dan Lerepako). Sedangkan Rencana Ruang Terbuka Hijau Perkotaan terdiri atas Taman kota, jalur hijau dan alun-alun (Kecamatan Lalembuu, Benua, Angata, Tinanggea, Lainea, Kolono, Laonti dan Moramo).

3. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam;

Kawasan Hutan Konservasi ditetapkan seluas 77.588 Ha terdapat di kecamatan Lalembuu, Benua, Angata, Tinanggea, Lainea, Kolono, Laonti dan Moramo



- a. Kawasan Suaka Margasatwa
    - 1) Suaka Margasatwa Tanjung Amolengu ditetapkan seluas 850 Ha terdapat di kecamatan Kolono
    - 2) Suaka Margasatwa Tanjung Peropa ditetapkan seluas 38.000 Ha terdapat di kecamatan Laonti
    - 3) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo ditetapkan seluas 4.016 Ha terdapat di Kecamatan Angata, Basala, Lalembuu, Tinanggea dan Benua.
  - b. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai seluas 35.614 Ha terdapat di Kecamatan Angata, Basala, Lalembuu, Tinanggea dan Benua
4. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- a. Situs makam Raja Silondae di Kecamatan Andoolo
  - b. Situs makam Pejuang Lamarota di Kecamatan Tinanggea
  - c. Situs makam Pejuang Laulewulu di Kecamatan Mowila
  - d. Situs makam Pejuang Lapadi di Kecamatan Lainea
  - e. Situs makam Pejuang Tongasa di Kecamatan Palangga
  - f. Situs makam Pejuang Polingai di Kecamatan Palangga
  - g. Situs makam Pejuang Tawulo di Kecamatan Laeya
  - h. Situs makam Pejuang Lababa di Kecamatan Lalembuu
  - i. Situs Benteng Lapadi di Kecamatan Lainea
  - j. Situs Goa Jepang di Kecamatan Laeya
5. Kawasan rawan bencana alam
- a. Kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Laonti yaitu di Desa Laonti, Labuan Beropa, Batu Jaya, Tambolosu, Woru-Woru, Baho dan Namu Kecamatan Kolono yaitu di Desa Lamotau, Ulusena dan Tiraosu Kecamatan Lainea yaitu di Desa Lainea dan Bangun Jaya Desa Anduna Kecamatan Laeya Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Desa Tanea Kecamatan Konda Kompleks perkantoran Andoolo di Kecamatan Andoolo Desa Arongo Kecamatan Landono Desa Tambosupa Kecamatan Moramo
  - b. Kawasan rawan banjir yang berpotensi terkena dampak luapan Sungai Roraya, Sungai Laeya, Sungai Bakutaru, Sungai Roda, Sungai Awunio,



Sungai Asole dan Rawa Aopa terdapat di kecamatan Tinanggea, Andoolo, Baito, Buke, Laeya, Kolono, Palangga, Angata, Laonti dan Moramo.

- c. Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di kecamatan Lainea, Moramo Utara, Lalembuu, Tinanggea, Landono, Andoolo, Angata, Mowila dan Konda.
6. Kawasan lindung geologi.
- a. Kawasan rawan bencana alam geologi
    - 1) Kawasan rawan gempa bumi
      - Titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi pada Wilayah daratan di Kecamatan Wolasi, Moramo Kolono Wilayah laut di Kecamatan Laonti.
      - Potensi rawan gempa bumi pada jalur patahan (sesar) pada Wilayah yang dilalui sesar naik dan turun di Kecamatan Lainea, Laeya, Wolasi, Palangga, Baito, Kolono, Moramo, Laonti, Buke dan Lalembuu
    - 2) Kawasan rawan tsunami dan abrasi

Kawasan rawan tsunami dan abrasi berada pada Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, Lainea, Laeya, Palangga Selatan dan Tinanggea

Pesisir pantai di setiap Kecamatan Moramo, Laonti dan Kolono

Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, Lainea, Palangga Selatan dan Tinanggea

Pesisir pantai di seluruh Kecamatan Laeya
    - 3) Kawasan rawan gerakan tanah
      - Zona kerentanan menengah berada pada Kecamatan Baito, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto dan Wolasi
      - Zona kerentanan rendah berada pada Kecamatan Andoolo, Angata, Baito, Basala, Benua, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara,



- Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Tinanggea dan Wolasi
- Zona kerentanan sangat rendah berada pada Kecamatan Andoolo, Angata, Basala, Benua, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landonno, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Tinanggea
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
    - 1) Kawasan imbuhan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Andoolo (Lalongga Somale) dan CAT Ambesea
    - 2) Sempadan Mata Air yaitu kawasan sekitar mata air di setiap kecamatan.
  - c. Kawasan Karst berada di kecamatan Kolono, Laeya, Laonti, Moramo dan Wolasi

#### **2.1.2.2 Kawasan Budidaya**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Pasal 63, yang tertuang dalam Perda RTRW Kab. Konawe Selatan menyatakan bahwa rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

#### **2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nomor 19 Tahun 2013, penetapan kawasan budidaya terdiri dari :

##### **2.1.3.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan pengelolaan hutan, diklasifikasikan kedalam 2 jenis hutan produksi, yaitu kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

##### **1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Keberadaan



kawasan hutan produksi terbatas ini mempertimbangkan kelerengan serta melindungi kawasan hutan tersebut dari akibat penggundulan hutan. Adapun rencana kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan seluas 3.707 Ha yang lokasinya terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya dan Moramo Utara.

## 2. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Adapun rencana kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan seluas 65.017 Ha terdapat di Kecamatan Angata, Benua, Konda, Moramo, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Moramo Utara, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Landonu, Buke, Lainea, Baito dan Laeya.

### 2.1.3.2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Adapun rencana kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan seluas 4.639,95 Ha terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Buke, Kolono dan Andoolo.

### 2.1.3.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan Pertanian direncanakan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian.

#### 1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Rencana pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan pada :

- a. mempertahankan fungsi lahan di kawasan pertanian tanaman pangan.
- b. meningkatkan jumlah lahan pertanian tanaman pangan. dan
- c. meningkatkan produktifitas lahan pertanian tanaman pangan baik lahan kering maupun lahan basah melalui upaya pengelolaan pertanian berbasis kondisi dan karakteristik fisik lahan.

Mengacu pada kondisi tanah tersebut maka rencana pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Konawe Selatan lebih dititik beratkan pada lahan palawija (ubi kayu, jagung, ubi jalar, kacang tanah dan padi) dengan jenis pola budidaya tanaman jangka pendek. Oleh karena itu rencana pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan diarahkan di



seluruh wilayah kabupaten Konawe Selatan, yang meliputi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas 23.662 Ha dengan komoditi padi sawah tersebar di setiap kecamatan, dan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija tersebar di setiap kecamatan. Serta kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija yang tersebar di setiap kecamatan.

## 2. Kawasan Hortikultura

Pada dasarnya hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat dikembangkan kegiatan pertanian hortikultura. Karena itu, pengembangan pertanian hortikultura juga sangat diutamakan mengingat cukup tingginya tingkat kebutuhan sayur-sayuran di Kabupaten Konawe Selatan selama ini, yang mana tingkat kebutuhan tersebut belum sebanding dengan tingkat produksi pertanian yang dihasilkan. kawasan tanaman hortikultura meliputi komoditi tanaman sayuran dan buah-buahan dan kawasan kebun Jeruk terdapat di Kecamatan Basala, Andoolo dan Lalembuu

## 3. Kawasan Perkebunan

Jenis budidaya perkebunan yang diusahakan dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari jenis Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi, Vanili, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, Sagu, Kemiri, Pala dan rencana tanaman nilam. Adapun komoditi perkebunan yang menonjol di Kabupaten Konawe Selatan adalah .

### a. Kakao

Diarahkan pada daerah yang memiliki ketinggian 0-40 mdpl nya penanaman coklat dan pada daerah-daerah lain yang potensial (lahan - lahan kering). Tanaman coklat diarahkan di 20 kecamatan kecuali Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Kecamatan Ranomeeto Barat.

### b. Kelapa

Pengembangan tanaman Kelapa di Kabupaten Konawe Selatan ditujukan pada pemeliharaan intensifikasi maupun rehabilitasi jenis kelapa dalam dan kelapa Hibrida pengembangan pada wilayah



dengan ketinggian 0 - 800 mdpl, diantaranya Kecamatan Laonti, Kecamatan Kolono, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Lainea, Kecamatan Laeya dan Kecamatan Moramo.

c. Kopi,

Pengembangan tanaman kopi di Kabupaten Konawe Selatan ditujukan pada pemeliharaan intensifikasi maupun rehabilitasi jenis kopi robusta dan pengembangan jenis kopi arabika pada wilayah dengan ketinggian >800 mdpl, diantaranya Kecamatan Wolasi, Kecamatan laonti, Kecamatan Buke, Kecamatan Lalembuu, Kecamatan Basala, Kecamatan Angata, Kecamatan Kolono, Kecamatan Landono dan Kecamatan Benua.

d. Vanili

Vanili sangat mungkin dikembangkan di kabupaten Konawe Selatan mengingat banyak tersedia lahan lerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan kakao.

e. Cengkeh,

Pengembangan cengkeh dilaksanakan pada daerah potensial yakni di 20 Kecamatan kecuali Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda,

f. Jambu Menteh,

Pengembangan diarahkan pada daerah-daerah potensial dan untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi lebih diutamakan pada daerah sentra-sentra produksi dan sumberdaya alamnya mendukung, khususnya Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Wolasi Kecamatan Palangga, Kecamatan Lainea, Kecamatan Angata dan Kecamatan Mowila.

g. Kapas,

Pengembangan tanaman kapas sebaiknya diaktifkan kembali pada kawasan PT Kapas yang dikelola oleh pemerintah setempat diarahkan pada upaya intensifikasi pada daerah penghasil diantaranya adalah Kecamatan Laeya

h. Lada

Tanaman lada mempunyai prospek yang cukup baik dengan. Untuk pengembangan pada masa yang akan datang kegiatan intensifikasi,



ekstensifikasi dan diversifikasi terus ditingkatkan sehingga nilai tambah produk tersebut semakin tinggi. Pengembangan diarahkan pada 25 kecamatan.

#### 4. Kawasan Peternakan

Berdasarkan keunggulan populasi ternak di Kabupaten Konawe selatan, pengembangan jenis ternak dapat diklasifikasikan yaitu ternak besar yaitu Sapi dengan populasi besar dan dominan terdapat di Kecamatan Andoolo, Konda, Landono, Laeya, Buke, Mowila dan Tinanggea. Ternak kecil meliputi Kambing dengan populasi besar dan dominan terdapat di Kecamatan Palangga Selatan, Lalembuu, dan Moramo sedangkan Babi terdapat di Kecamatan Ranomeeto Barat, Mowila dan Landono, Dan ternak unggas meliputi ayam ras dengan populasi besar dan dominan terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Ranomeeto Barat dan Tinanggea, sedangkan ayam kampung dan itik tersebar di setiap kecamatan.

#### 2.1.3.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Untuk menunjang pemanfaatan dan pengembangan kegiatan sektor perikanan dan kelautan maka berdasarkan arahan pengelolaan wilayah dalam Kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 tahun 2010 terdapat arahan bagi kegiatan pengembangan budidaya perikanan dan kelautan pada wilayah perairan Kabupaten Konawe Selatan meliputi:

##### 1. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap

Rencana kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas 154.112 Ha terdapat di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Lainea, Palangga Selatan, Laeya dan Laonti. Adapun rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap akan diarahkan dengan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang meliputi.

- a. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu TPI/PPI Torobulu di Kecamatan Laeya dan TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea.



- b. Rencana TPI/PPI di Kecamatan Kolono.
2. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya
  - a. Kawasan budidaya laut

Dengan mempertimbangkan potensi perikanan budidaya laut pada setiap wilayah maka rencana pengembangan kawasan budidaya laut lainnya berdasarkan komoditi utamanya dikembangkan budidaya rumput laut di seluruh wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Selatan, budidaya mutiara di Kecamatan Laeya, Moramo Utara, Laonti dan Kolono dan budidaya teripang di Kecamatan Laonti dan Moramo
  - b. Kawasan budidaya air tawar

Kawasan budidaya air tawar tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Benua, Wolasi dan Baito.
  - c. Kawasan budidaya air payau

kawasan budidaya air payau direncanakan pada kawasan potensi pengembangan tambak di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Laonti, Palangga Selatan, Lainea, Laeya dan Tinanggea.
3. Kawasan Pengolahan Hasil Perikanan
  - a. Kawasan Minapolitan

Kawasan pengembangan minapolitan diarahkan pada daerah pesisir disepanjang garis pantai di Kabupaten Konawe Selatan dengan pusat pertumbuhan terdapat di Kecamatan Tinanggea dan Kolono.
  - b. Kawasan Pulau-Pulau Kecil

Keberadaan pulau-pulau kecil sebagai kawasan budidaya tidak hanya mendorong berkembangnya sektor kelautan dan perikanan akan tetapi akan mengangkat potensi pariwisata apabila dikelola secara efektif. Kawasan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 26 pulau yang meliputi :

    - 1) Pulau berpenghuni sebanyak enam pulau meliputi Pulau Burung, Cempedak Atas, Cempedak Bawah, Gala, Tawatawaro, Wawatu dan Wawosunggu. dan
    - 2) Pulau tidak berpenghuni sebanyak dua puluh pulau meliputi Pulau Burung, Hari, Hari Kecil, Kapal Tengah, Kapal Timur, Kapal Utara, Kapal, Lalowatu, Lara, Lemo, Moramo, Palioboru Kecil, Palioboru, Pondiana Utara, Pondiana, Watulumango



Tengah, Watulumango Utara, Watulumango, Watundoluboto dan Wawosunggu Kecil.

#### 2.1.3.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Berdasarkan Wilayah Pertambangan (WP) di Kabupaten Konawe Selatan dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

##### 1. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. WUP di Kabupaten Konawe Selatan direncanakan seluas 132.852,29 Ha dengan komoditi tambang terdiri atas :

- a. mineral logam terdiri atas Nikel Laterit tersebar di Kecamatan Laeya, Laonti, Lalembuu, Palangga, Palangga Selatan dan Tinanggea dan Emas tersebar di Kecamatan Lainea, Moramo, Wolasi dan Lalembuu dan Angata.
- b. mineral bukan logam terdiri atas Kuarsit tersebar di Kecamatan Moramo, Lainea, Tinanggea, Ranomeeto, Landono dan Konda, Oker di Kecamatan Angata, Asbes di Kecamatan Angata, Batu Setengah Permata di Kecamatan Lainea dan Kolono, Jenis Talk di Kecamatan Angata, Dolomit di Kecamatan Laeya, Pasir kuarsa di Kecamatan Kolono dan Ultra Basa di Kecamatan Laeya, Palangga, dan Tinanggea.
- c. Batuan terdiri atas Marmer tersebar di Kecamatan Moramo, Wolasi, Konda dan Kolono, Batu Sabak di Kecamatan Kolono, Wolasi, Angata, Batu Gamping di Kecamatan Moramo, Tinanggea, Palangga Selatan dan Kolono, Batu Gunung di Kecamatan Moramo, Angata, Wolasi, Kolono dan Tinanggea, Pasir di Kecamatan Kolono, Tanah Liat tersebar di Kecamatan Konda, Ranomeeto, Landono dan Tinanggea, Sirtu tersebar di Kecamatan Konda, Ranomeeto, Landono, Andoolo, Lainea, Moramo dan Tinanggea.
- d. Panas Bumi terletak di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara dan Desa Moramo Kecamatan Moramo.

##### 2. Wilayah Pencadangan Negara



Wilayah Pencadangan Negara (WPN) merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. WPN di Kabupaten Konawe Selatan direncanakan seluas 1.631,51 Ha dengan cadangan Nikel Laterit yang tersebar pada kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Lalembuu dan Kolono.

#### 2.1.3.6 Kawasan Peruntukan Industri

##### 1. Kawasan Peruntukan Industri Besar

Rencana industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan kerajinan rumah tangga terdapat dalam kawasan industri terpadu yang berpusat di Kecamatan Palangga Selatan

##### 2. Kawasan Peruntukan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

###### a. Industri pengolahan hasil pertanian

1) industri pengolahan kedelai meliputi industri pengolahan pembuatan Tahu dan Tempe terdapat di Kecamatan Konda, Buke, Andoolo, Tinaggea, Lainea, Laeya, Moramo dan Landono.

2) industri pengolahan sagu terdapat di Kecamatan Konda, Lainea, Laeya, Angata, Benua dan Landono.

###### b. industri pengolahan hasil perkebunan

1) industri pengolahan jambu mete yaitu pengupasan biji mete terdapat di Kecamatan Lainea, Laeya, Lalembuu, Basala, Tinanggea, Kolono, Ranomeeto dan Konda.

2) industri pengolahan Kakao yaitu pengeringan Kakao terdapat di Kecamatan Basala, Lalembuu, Tinanggea, Laeya, Konda, Kolono, Moramo, Mowila, Angata dan Benua.

3) industri pengolahan kopi yaitu penggilingan kopi dan kopi bubuk terdapat di seluruh Kecamatan.

4) industri pengolahan kelapa yaitu minyak kelapa dan gula merah terdapat di Kecamatan Kolono, Laonti, Ranomeeto Barat, Lainea, Moramo, Buke dan Moramo Utara.

5) Rencana industri pengolahan briket dari arang kelapa terdapat di Kecamatan Moramo Utara.

###### c. industri pengolahan hasil perikanan



- 1) industri pengolahan rumput laut yaitu pengeringan rumput laut terdapat di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo dan Laonti serta pembuatan makanan ringan dan selai rumput laut terdapat di Kecamatan Kolono.
  - 2) industri pengolahan perikanan meliputi abon ikan, kerupuk ikan dan ikan asin terdapat di seluruh Kecamatan pesisir, pembekuan ikan terdapat di Kecamatan, pembuatan terasi dengan sentra pengembangan di Kecamatan Tinanggea, Lainea dan Kolono.
  - 3) rencana industri pembekuan di Kecamatan Tinanggea.
- d. Industri pengolahan hasil hutan
- 1) industri pengolahan kayu terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Landono, Moramo dan Angata, Laonti.
  - 2) industri pengawetan dan pengolahan rotan terdapat di Kecamatan Wolasi.
  - 3) industri anyaman bambu di Kecamatan Tinanggea, Laeya, Buke, Andoolo dan Landono.
  - 4) industri air kemasan di Kecamatan Moramo.
  - 5) sentra industri pembuatan Kapal di Kecamatan Laonti, Kolono, Tinanggea, Moramo, Moramo Utara, Lainea, Laeya dan Palangga Selatan.
- e. Industri Pengolahan Hasil Pertambangan
- 1) industri Batu Merah di Kecamatan Ranomeeto, Palangga, Moramo Utara, Tinanggea.
  - 2) industri Perak di Kecamatan Mowila.
  - 3) industri Marmer di Kecamatan Moramo.
  - 4) industri Batu Gunung dan suplit di Kecamatan Moramo dan Palangga.
  - 5) industri Batu Alam di Kecamatan Kolono.

#### **2.1.3.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Dari keanekaragaman potensi pariwisata Kabupaten Konawe Selatan akan dikembangkan dan direncanakan berdasarkan potensi alam obyek wisata.



1. Pariwisata Alam Laut/Bahari
  - a. Pulau Hari di Kecamatan Laonti.
  - b. Pulau Lara di Kecamatan Moramo Utara.
  - c. Pantai Polewali di Kecamatan Lainea.
  - d. Pantai Torobulu di Kecamatan Laeya.
  - e. Teluk Kolono di Kecamatan Kolono.
  - f. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Moramo Utara.
2. Pariwisata Alam Pegunungan/Hutan
  - a. wisata Air Terjun meliputi Air Terjun Moramo di Kecamatan Moramo, Air Terjun Labuan Beropa di Kecamatan Laonti, Air Terjun Laeya di Kecamatan Laeya, Air Terjun Baito di Kecamatan Baito dan Air Terjun Ranomeeto Barat di Kecamatan Ranomeeto Barat, Air Terjun Kolono di Kecamatan Kolono dan Air Terjun Wolasi di Kecamatan Wolasi.
  - b. wisata air panas meliputi Air Panas Kaindi dan Lainea di Kecamatan Lainea, Air Panas Lamokula di Kecamatan Moramo Utara, Air Panas Amohola di Kecamatan Moramo dan Air Panas Sungai Roda di Kecamatan Kolono.
  - c. wisata alam pegunungan Popalia di Kecamatan Wolasi.
  - d. Gua Kelelawar di Kecamatan Palangga Selatan.
  - e. wisata pemancingan alam pada Sungai Konaweha di Kecamatan Ranomeeto Barat.
  - f. agrowisata perkebunan di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda dan Wolasi.
  - g. rencana ekowisata di Kecamatan Laeya, Wolasi dan Kolono.
3. Pariwisata Budaya dan Sejarah
  - a. situs makam Raja Silondae di Kecamatan Andoolo.
  - b. situs makam Pejuang Lamarota di Kecamatan Tinanggea.
  - c. situs makam Pejuang Laulewulu di Kecamatan Mowila.
  - d. situs makam Pejuang Lapadi di Kecamatan Lainea.
  - e. situs makam pejuang Tongasa di Palangga.
  - f. situs makam Pejuan Polingai di Palangga.
  - g. situs makam pejuang Tawulo di Labokeo.



- h. situs makam pejuang Lababa di Kecamatan Lalembuu.
  - i. situs Benteng Lapadi di Kecamatan Lainea.
  - j. situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang Tentara Jepang di Gua Jepang Kecamatan Lainea.
  - k. situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang di Labuan Beropa Kecamatan Laonti.
  - l. situs kuburan massal Kecamatan Wolasi..
  - m. atraksi seni budaya Tari Lulo dan upacara adat Tolaki tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lalembuu dan Basala.
  - n. upacara adat Tolaki Lulo Ngganda di Kecamatan Benua yaitu atraksi pemukulan gong pada setiap tahun saat mulai menanam padi.
  - o. upacara adat Tolaki Lulo Totaenango di Kecamatan Benua yaitu atraksi pemukulan gong pada setiap tahun saat panen padi.
  - p. atraksi seni budaya tari Bali dan Upacara Adat Ngaben di Kecamatan Landono, Ranomeeto Barat, Lalembuu, Laeya dan Mowila.
  - q. pertunjukan seni wayang kulit di Kecamatan Andoolo, Baito, Lalembuu, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea.
  - r. pertunjukan seni kuda lumping di Kecamatan Palangga, Buke, Andoolo, Moramo, Lalembuu dan Baito.
  - s. seni budaya tenunan Tolaki di Kecamatan Andoolo, Laeya dan Palangga.
  - t. seni budaya tradisional Tolaki tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
  - u. seni budaya musik bambu tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.
4. Pariwisata Buatan
- a. wisata pemancingan buatan meliputi pemancingan Lalonggasu di Kecamatan Tinanggea, pemancingan Ranombayasa di Kecamatan Mowila dan pemancingan di Kecamatan Ranomeeto dan Konda.
  - b. wisata rekreasi bendungan di Kecamatan Mowila, Basala, Lalembuu, Andoolo, Laeya dan Tinanggea.
  - c. Bumi Perkemahan Andoolo di Kecamatan Andoolo dan Desa Tatangge di Kecamatan Tinanggea.



- d. Alun-Alun Kabupaten di Kecamatan Andoolo.
- e. Stadion Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Andoolo.
- f. Sarana Olahraga (SOR) di Kecamatan Andoolo.

#### **2.1.4 Wilayah Rawan Bencana**

##### **2.1.4.1 Kawasan Rawan Longsor**

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Konawe Selatan cukup memiliki potensi, karena sebagian wilayahnya berada pada kelerengan > 40%. Kawasan rawan longsor yang teridentifikasi di Kabupaten Konawe Selatan tersebar antara lain

1. Kecamatan Laonti yaitu di Desa Laonti, Labuan Beropa, Batu Jaya, Tambolosu, Woru-Woru, Baho dan Namu.
2. Kecamatan Kolono yaitu di Desa Lamotau, Ulusena dan Tiraosu.
3. Kecamatan Lainya yaitu di Desa Lainya dan Bangun Jaya.
4. Kecamatan Laeya yaitu Desa Anduna.

##### **2.1.4.2 Kawasan Rawan Banjir**

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Konawe Selatan terdapat pada lokasi yang berpotensi terkena dampak luapan Sungai Roraya, Sungai Laeya, Sungai Bakutaru, Sungai Roda, Sungai Awunio, Sungai Asole dan Rawa Aopa Watumohai yaitu Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Baito, Buke, Laeya, Kolono, Palangga, Angata, Laonti dan Moramo.

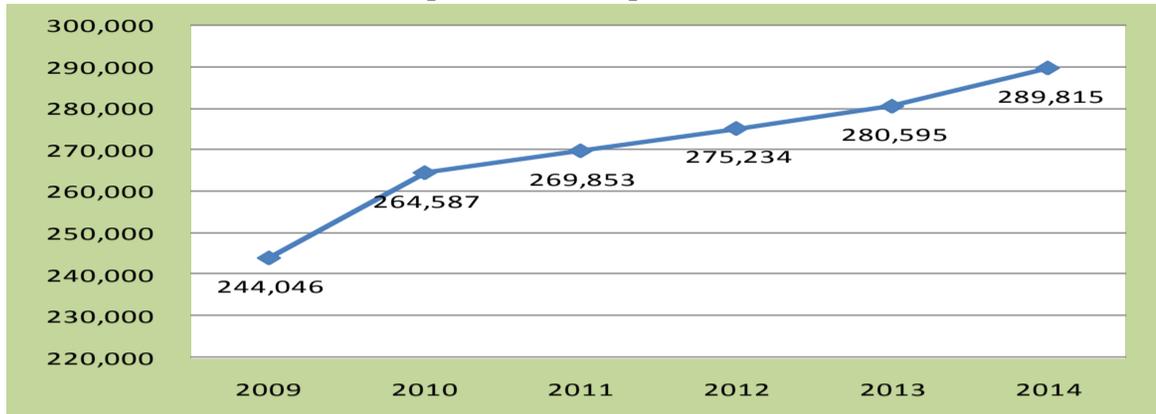
#### **2.1.5 Demografi**

##### **2.1.5.1 Perkembangan Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan terus bertambah. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 BPS. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Konawe Selatan tercatat 289.815 jiwa yang terdiri atas 148.003 jiwa laki-laki dan 141.812 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 2013/2014 tercatat 3,29 persen.



Grafik 2.1 Grafik pertumbuhan penduduk 2009-2014



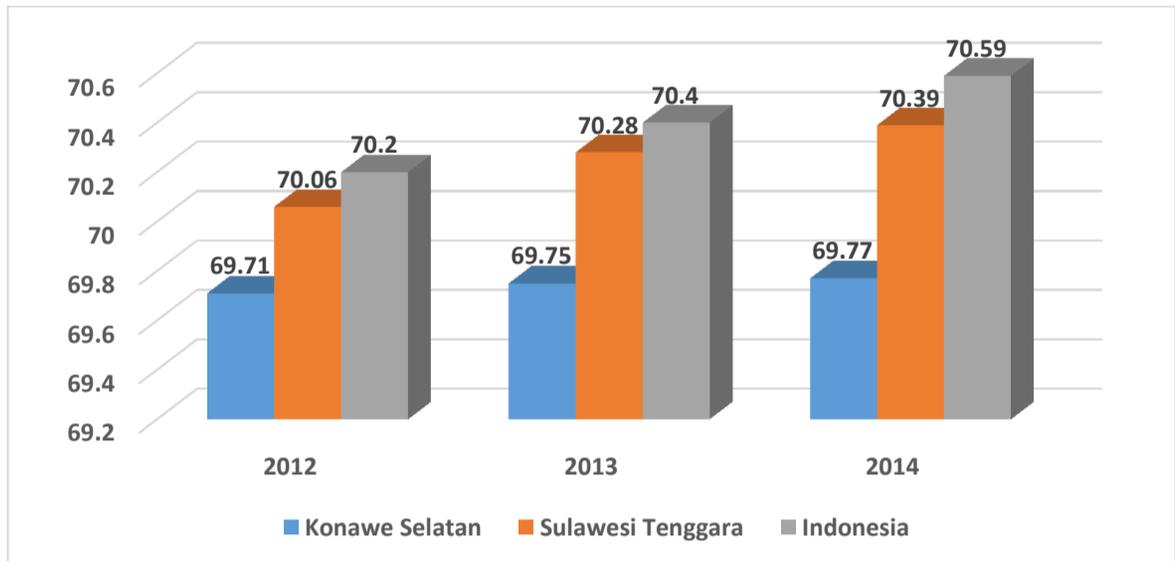
Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan

Sedangkan untuk rasio jenis kelamin penduduk Konawe Selatan pada tahun 2014 yaitu 104, yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

#### 2.1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menyangkut tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan. IPM juga digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal yang disebut *reduksi shortfall* per tahun. Angka ini mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi ideal. *Reduksi shortfall* disebut juga suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan manusia. Angka IPM Konawe Selatan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Konawe Selatan. Setiap komponen dari IPM Konawe Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa derajat masyarakat Konawe Selatan semakin baik. Hal ini merupakan salah satu implikasi meningkatnya angka IPM Konawe Selatan tiap tahunnya.

Grafik 2.2. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2012-2014.



Sumber : BPS Konawe Selatan Tahun 2015

Dengan metode baru pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people choices*). Indeks Pembangunan Manusia adalah Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- Pengetahuan (*knowledge*)
- Standar hidup layak (*decent standard of living*)

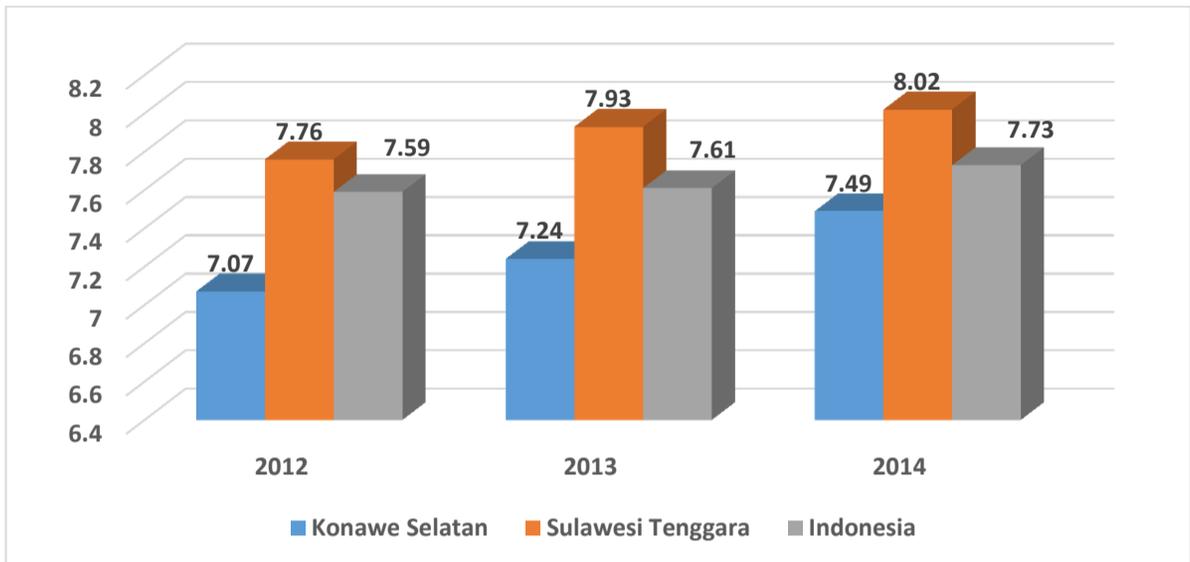
Manfaat Indeks Pembangunan Manusia :

- Merupakan Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Angka harapan hidup saat lahir - (AHH) (Life Expectancy- $e_0$ ) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.



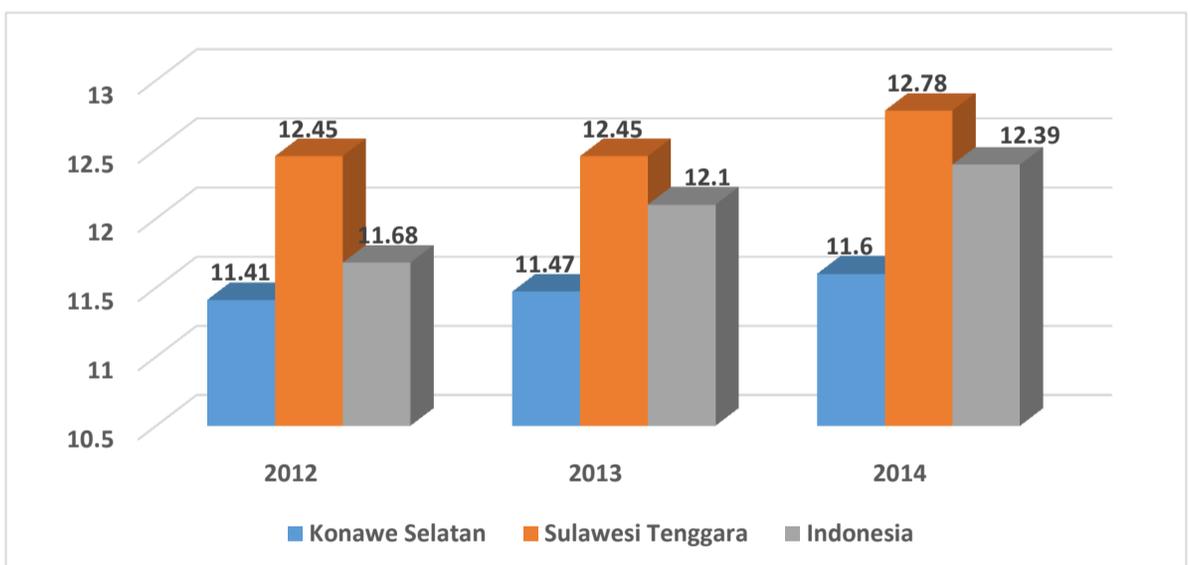
Grafik 2.3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2012-2014.



Sumber : BPS Konawe Selatan Tahun 2015

Rata-rata Lama Sekolah-RLS (Mean Years of Schooling-MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata rata lama sekolah suatu wilayah tidak turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Grafik 2.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2012-2014.



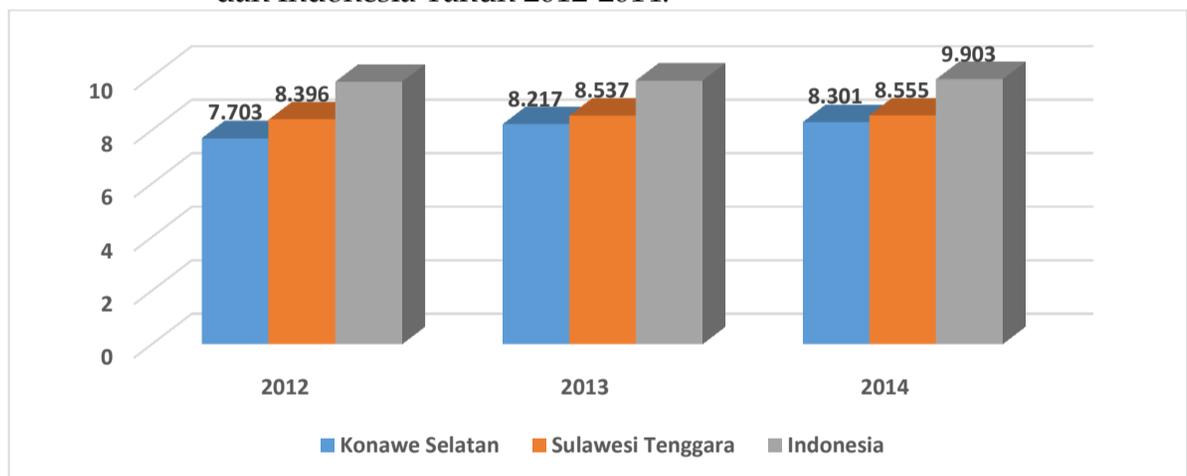
Angka Harapan Lama Sekolah HLS (Expected Years of Schooling-EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan



dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapitan dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari SUSENAS, dihitung dari level provinsi hingga level Kabupaten/Kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012 = 100.

Grafik 2.5. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rp/Orang/Tahun) di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2012-2014.

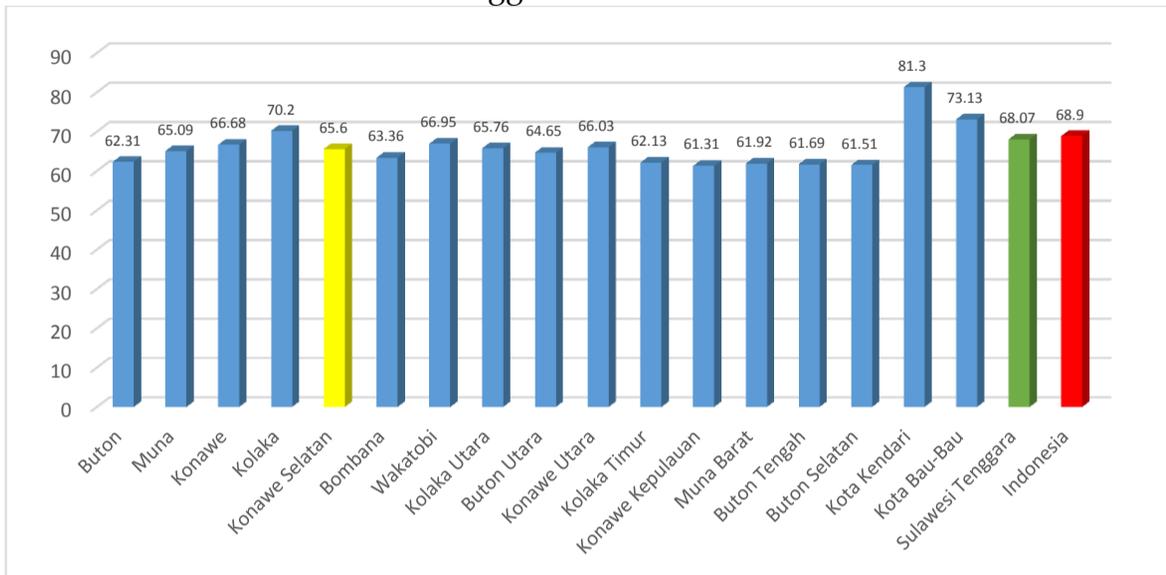


Sumber : BPS Konawe Selatan Tahun 2015.

Perhitungan paritas daya beli metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.



Grafik 2.6. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia Tahun 2012-2014.



Sumber : BPS Konawe Selatan Tahun 2015

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan tahun 2014 tercatat 7,06 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat tiga sektor yang pertumbuhan paling besar yaitu (1) sektor jasa keuangan dan asuransi 24,74 persen dari 2,90 persen, (2) sektor administrasi pemerintahan,

Tabel 2.4. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010 - 2014

Kode	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,23	32,99	31,12	30,54	29,73
B	Pertambangan dan Penggalian	18,42	20,2	21,57	21,12	21,98
C	Industri Pengolahan	2,68	2,72	2,58	2,55	2,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	9,11	8,99	8,61	8,53	8,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,68	8,59	8,53	8,42	8,68



<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	13,03	14,1	16,01	17,42	16,37
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,52	0,49	0,49	0,49
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,6	0,72	0,69	0,81
<b>L</b>	Real Estate	0,95	0,91	0,85	0,83	0,78
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,79	4,73	4,21	4,12	4,39
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	3,95	3,75	3,47	3,48	3,67
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,78	0,74	0,73	0,75
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	1,47	1,44	1,42	1,47	1,55
		100,63	100,65	100,65	100,72	100,94

Sumber : PDRB Konawe Selatan Tahun 2014, BPS 2015.

pertahanan dan jaminan sosial wajib 12,63 persen dari 4,53 persen, dan (3) sektor jasa pendidikan 12,82 persen dari 11,22 persen. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan untuk sektor tersebut cenderung lebih cepat dari sektor lainnya. Sedangkan sektor PDRB yang pertambahan pertumbuhannya cenderung melambat yaitu (1) sektor transportasi dan pergudangan -0,16 persen dari 7,00 persen, (2) sektor pengadaan listrik dan gas 9,24 persen dari 12,32 persen, dan (3) sektor informasi dan komunikasi 2,45 persen dari 12,86 persen. Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2014 pertumbuhannya -0,16 persen, yang berarti pertumbuhannya benar-benar melambat yang bahkan negatif dan merupakan pertumbuhan yang paling kecil.

Sesuai struktur PRDB tahun 2014, sektor yang tercatat mempunyai distribusi terbesar terhadap pembentukan PRDB Kabupaten Konawe Selatan yaitu (1) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29,73 persen, (2) sektor Pertambangan dan Panggalian 21,98 persen, dan (3) sektor Transporatsi dan Pergudangan 16,37 persen. Sedangkan sektor yang memiliki distribusi paling kecil terhadap pembentukkan PDRB Konawe Selatan yaitu (1) sektor Jasa Perusahaan 0,01 persen, (2) sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 persen,



dan (3) sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 persen.

### 2.2.1.2 PDRB per Kapita

Aspek kesejahteraan dapat diketahui dari peranan PDRB per Kapita Kabupaten Konawe Selatan, sektor yang memiliki PDRB perkapita terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 7,49 juta/kapita/tahun, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,54 juta/kapita/tahun dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,13 juta/kapita/tahun. Sedangkan sektor yang memiliki PDRB perkapita pertahun terkecil sektor Jasa Perusahaan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mencapai sebesar 0,01 juta/kapita/tahun. Pada Tabel 2.5. ditampilkan PDRB Per kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 2.5.PDRB Per kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2010 - 2014

Kode	Sektor Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,91	6,12	6,51	7	7,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3,09	3,75	4,52	4,84	5,54
C	Industri Pengolahan	0,45	0,5	0,54	0,58	0,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,53	1,67	1,8	1,96	2,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,46	1,59	1,79	1,93	2,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,62	3,35	4	4,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
J	Informasi dan Komunikasi	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,1	0,11	0,15	0,16	0,2
L	Real Estate	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2



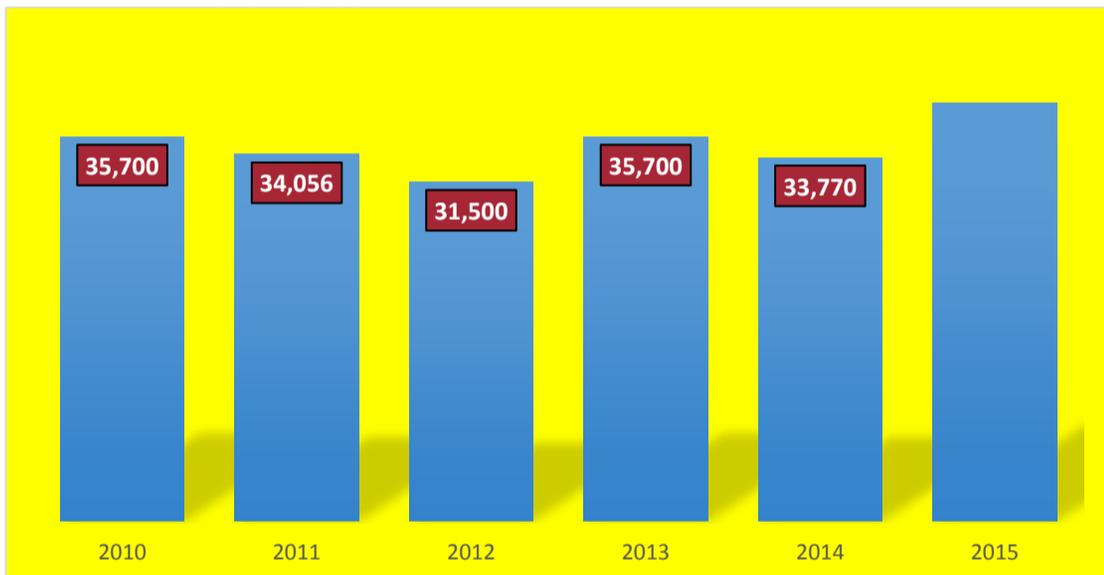
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8	0,88	0,88	0,94	1,11
P	Jasa Pendidikan	0,66	0,7	0,73	0,8	0,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19
	Total PDRB Per Kapita	16,78	18,56	20,93	22,93	25,2

Sumber : PDRB Konawe Selatan, Tahun 2015.

### 2.2.1.3 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan dapat diukur dari dinamika angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir, berdasarkan data pada grafik 2.7. diketahui, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya, dan naik kembali pada tahun 2015.

Grafik 2.7. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015.



Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K 2016.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 35.700 jiwa dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai dengan tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan dari segi jumlah yaitu sebesar 35.700 jiwa dan 33.770 jiwa pada tahun 2014.



#### 2.2.1.4 Angka Kriminalitas

Potret lain fokus pemerataan ekonomi masyarakat dapat diketahui dari jumlah angka kriminalitas sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. Jenis dan Jumlah Kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014.

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan
1	Pembunuhan	4	3
2	Aniaya Berat	2	0
3	Pencurian Berat	15	5
4	Pencurian dengan Kekerasan	3	0
5	Pencurian Kendaraan Bermotor	19	0
6	Pasal 359 KUHP	0	
7	Pembakaran	1	1
8	Perjudian	7	5
9	Perkosaan	15	13
10	Pengrusakan	8	6
11	Narkoba	4	4
12	Minuman Keras	0	0
13	Lainnya	0	0
	Total	78	37

Sumber : Konawe Selatan dalam angka, 2015

Terjadinya kriminalitas pada level komunitas atau lapisan masyarakat menunjukkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial.

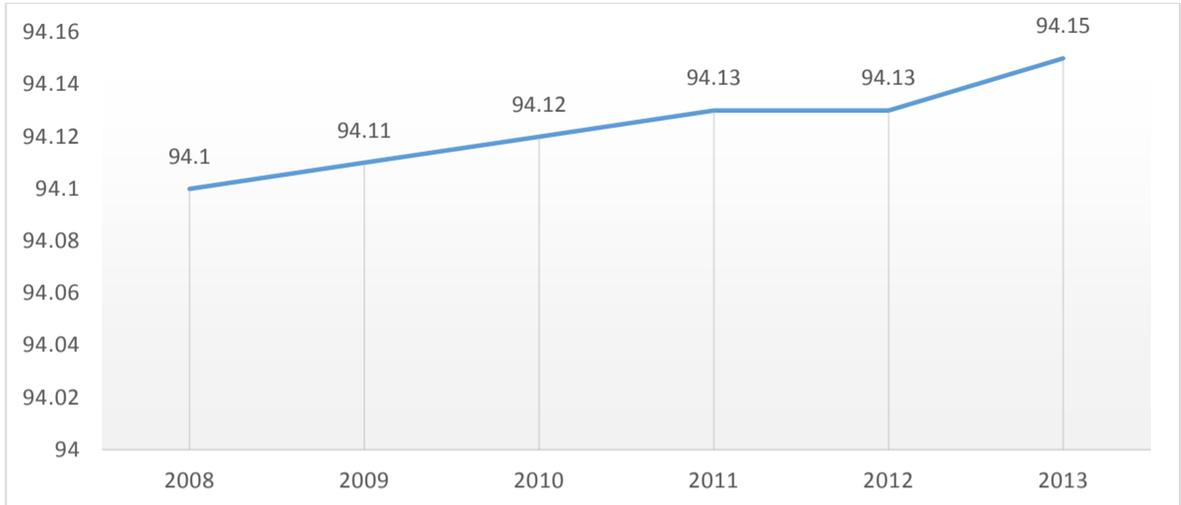
#### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

##### 2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH Kabupaten Konawe Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, AMH Konawe Selatan tercatat sebesar 94,10% naik menjadi 94,15% pada tahun 2013. Pada tahun 2013, masih terdapat 5,85% penduduk Konawe Selatan yang masih bersatus buta huruf dan sebagian besar adalah penduduk dengan usia diatas 50 tahun keatas.



Grafik 2.7. Jumlah Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2008 - 2013.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

#### 2.2.2.2. Angka Balita Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita semakin membaik. Hal ini terlihat dari indikator persentase penderita gizi kurang dan gizi buruk yang menurun dari 0,49 % pada tahun 2011 menjadi 0,11 % pada tahun 2015 untuk dan untuk penderita gizi kurang sebesar 5,00 % pada tahun 2011 dan 3,56 % pada tahun 2015.

Grafik 2.5 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Gizi di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2015.

Sedangkan jumlah kematian bayi di kabupaten Konawe Selatan dapat diketahui pada tabel 2.7. Pada tahun 2012 jumlah lahir mati mencapai 78 kasus dan jumlah bayi mati mencapai 64 kasus, sedangkan pada tahun 2013



jumlah lahir mati mencapai 74 kasus dan jumlah bayi mati mencapai 74 kasus.

Tabel 2.7. Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013.

No	Kabupaten/Kota	2012			2013		
		Jumlah Kelahiran	Lahir Meninggal	Jumlah Bayi Meninggal	Jumlah Kelahiran	Lahir Meninggal	Jumlah Bayi Meninggal
1	Buton	5739	60	82	5852	77	78
2	Muna	5783	77	122	5969	70	89
3	Konawe	4452	60	68	5007	50	70
4	Kolaka	6361	76	73	6071	78	52
5	Konawe Selatan	5413	78	64	5817	74	74
6	Bombana	3147	74	78	3374	60	72
7	Wakatobi	1851	35	31	1924	37	35
8	Kolaka Utara	2320	25	37	2407	23	22
9	Buton Utara	1235	23	44	1343	19	32
10	Konawe Utara	1226	6	31	1205	22	20
11	Kolaka Timur* Konawe	0	0	0	0	0	0
12	Kepulauan*	0	0	0	0	0	0
13	Kota Kendari	5729	18	28	6017	20	27
14	Kota Bau-Bau	2739	30	35	2953	30	35

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2014.

### 2.2.2.2 Pendukung Kesejahteraan Sosial

Aspek lain dari kesejahteraan sosial adalah jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau (PMKS) yang merupakan populasi tertinggi dari angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan. Pada tabel 2.8 ditampilkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Tahun 2014.

Tabel 2.8 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Tahun 2014.

No	Kecamatan	Penyandang Cacat	Eks. Penyakit Kronis	Jompo Terlantar	Anak Terlantar	Eks Narapidana
1	Tinanggea	138	18	802	583	8
2	Lalembuu	100	7	568	230	7
3	Andoolo	94	15	392	283	10
4	Buke	84	3	415	380	9
5	Palangga	56	6	380	377	14



6	Palangga Selatan	49	3	481	276	11
7	Baito	113	5	278	362	7
8	Lainea	69	10	610	215	16
9	Laeya	74	9	318	410	22
10	Kolono	58	5	457	508	10
11	Laonti	119	7	632	849	7
12	Moramo	42	3	486	540	1
13	Moramo Utara	78	9	507	485	5
14	Konda	60	7	407	342	10
15	Wolasi	37	6	196	445	4
16	Ranomeeto	70	8	480	405	7
17	Ranomeeto Barat	47	4	497	366	3
18	Landono	9	4	385	409	6
19	Mowila	29	1	499	393	5
20	Angata	39	3	355	509	12
21	Benua	8	2	386	400	7
22	Basala	16	7	392	294	5
	<b>Total</b>	<b>1389</b>	<b>142</b>	<b>9923</b>	<b>9061</b>	<b>186</b>

Sumber : Konawe Selatan dalam angka, BPS 2015

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Urusan Wajib

##### 2.3.1.1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 - 2014.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI selama kurun waktu 2010- 2014 mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar 98,20 menjadi 100,26 persen pada tahun 2014. Sama halnya tingkat SD/MI Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SMP mengalami peningkatan dari 96,85 persen pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 99,31 persen pada tahun 2014. Pada tingkat SMA, angka partisipasi kasar naik menjadi 99,89 persen pada tahun 2014 dari tahun 2010 yang hanya mencapai 90,51 persen.



Tabel 2.9. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Kab. Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.

Jenjang	Persentase Angka Partisipasi Kasar (% APK)				
	2010	2011	2012	2013	2014
SD	98,2	98,86	99,1	100,04	100,26
SMP	96,85	98,21	98,86	99,12	99,31
SMA	90,51	92,86	94,45	97,81	99,89

Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 - 2014

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang Sekolah Dasar mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebesar 96,86 % dan pada tahun 2014 naik sebesar 99,78 %. Angka Partisipasi Murni tingkat sekolah menengah pertama meningkat dari tahun 2010 yang mencapai 90,51 persen menjadi 99,89 persen pada tahun 2014. Sama halnya pada tingkat SD/MI dan SMP angka partisipasi Murni tingkat SMA pada tahun 2010 - 2014 mengalami peningkatan pada tahun 2010 APM SMA sebesar 70,12 persen naik menjadi 78,81 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.10. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.

Jenjang	Persentase Angka Partisipasi Murni (% APM)				
	2010	2011	2012	2013	2014
SD	96,68	97,26	98	98,2	99,78
SMP	90,51	92,86	94,45	97,81	99,89
SMA	70,12	72,15	74,32	75,39	78,81

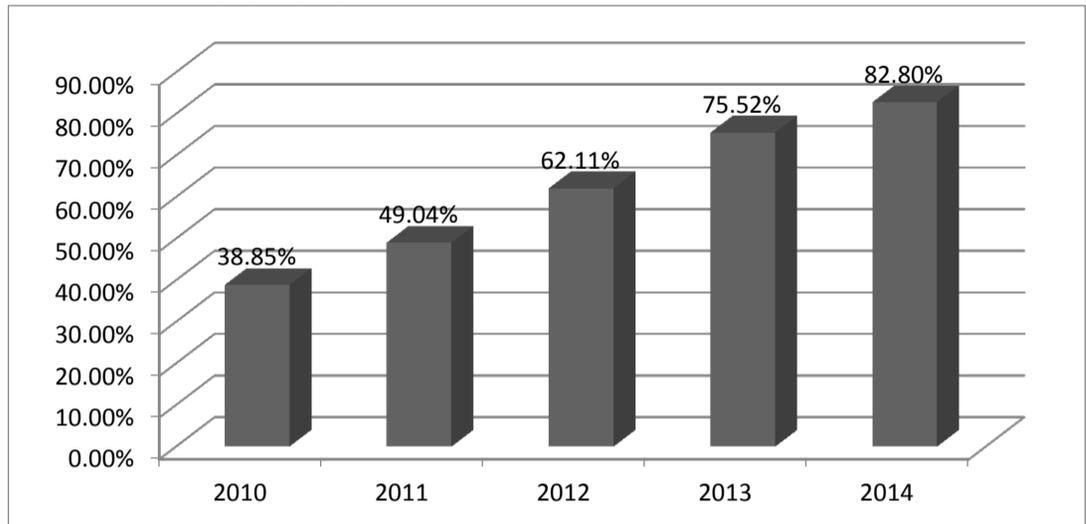
Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

c. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi sertifikasi dan standar kompetensi

Jumlah guru yang memenuhi data kualifikasi, sertifikasi dan standar kompetensi mengalami peningkatan secara signifikan dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 38,85 persen naik menjadi 82,80 persen pada tahun 2014.



Grafik 2.8. Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi dan Standar Kompetensi di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2014.

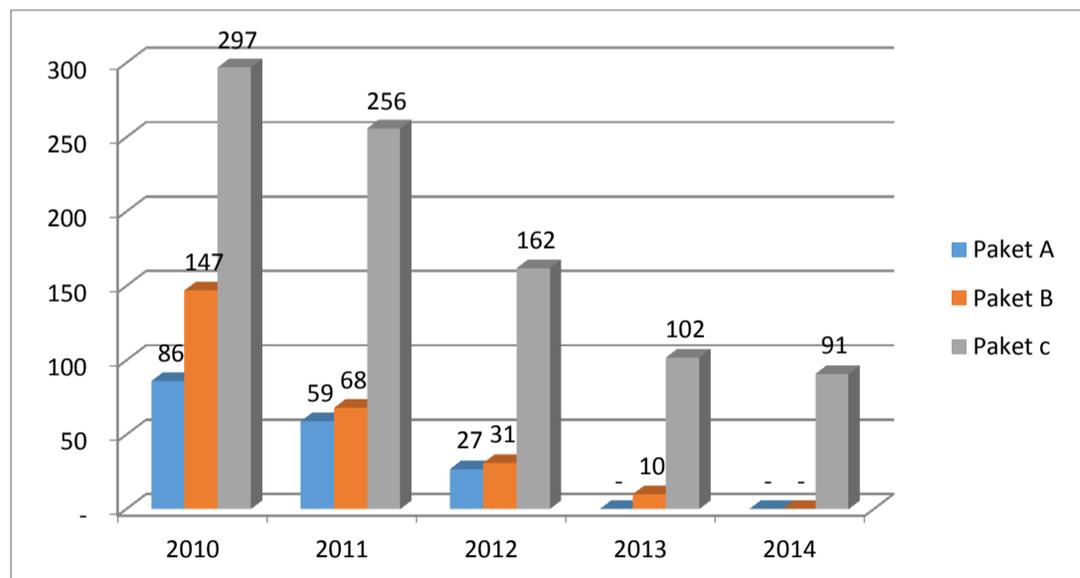


Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, LKPJ Konsel 2010-2015

- d. Jumlah anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar Paket A, B dan C Tahun 2010 - 2014.

Jumlah anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar Paket A, B dan C selama tahun 2010 - 2014 mengalami penurunan, dengan demikian dapat diasumsikan telah terjadi keberhasilan dalam peningkatan jumlah siswa pada pendidikan formal secara signifikan.

Grafik 2.9. Jumlah Anak Putus Sekolah yang menyelesaikan Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2014.



Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, LKPJ Konsel 2010-2015



### 2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Secara nasional, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dengan kondisi tersebut, target capaian MDGs secara nasional yang ditetapkan adalah 32 per 1000 kelahiran hidup telah tercapai dan dianggap telah berhasil menurunkan angka kematian balita, dan akan terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Saat ini, Angka Kematian Balita di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 sebesar 5/1.000 dimana angka tersebut lebih kecil dari target nasional yaitu 32/1.000 dengan kata lain upaya untuk menurunkan angka kematian balita telah sesuai target.

Khusus angka Kematian Bayi memperlihatkan penurunan dari tahun ke tahun. Di kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2010 AKB tercatat hanya 14 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2014 yaitu sebesar 13 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Tetapi pada tahun 2015 angka kematian bayi meningkat sebesar 15 kematian per 1.000 kelahiran hidup, yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan. Pencapaian ini tidak terlepas dari akibat cakupan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan maupun kondisi, kualitas layanan ANC K4 sebesar 21,6 % (Hasil Riskesdas, 2010) dan status kesehatan ibu.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan *millennium*, yaitu tujuan kelima : meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai  $\frac{3}{4}$  resiko jumlah kematian ibu.



Tabel 2.11. Capaian Indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 – 2015.

No	Indikator SPM Kesehatan	Satuan	Capaian					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kematian Balita	1000 Khi	16	18,1	9,9	14	17	5
2	Jumlah Kematian Balita	Jiwa	78	91	53	80	95	71
3	Angka Kematian Bayi	1000 Khi	14	16,3	10	13	13	15
4	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	68	82	52	74	75	76
5	Jumlah Kematian Ibu Hamil	Jiwa		1	0	0	0	0
6	Jumlah Kematian Ibu Bersalin	Jiwa		2	8	5	8	8
7	Jumlah Kematian Ibu Nifas	Jiwa		2	1	0	0	0
8	Persentase Cakupan Kunjungan Bayi	%		85%	97%	99%	82%	
9	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa		90	22	23	16	
10	Persentase Cakupan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%		83,60%	77,10%	83,80%	82,36%	82,70%
11	Persentase Cakupan Neonatus Komplikasi yang ditangani	%		98%	59%	71%	49%	
12	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%		65%	82%	79%	84%	
13	Persentase Cakupan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin	%		57,70%	62,60%	49,54%		

Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Konawe Selatan tidak menggunakan angka per 100.000 Kelahiran Hidup hal ini dikarenakan jumlah ibu melahirkan di Kabupaten Konawe Selatan tidak mencapai angka 100.000. sehingga yang digunakan adalah jumlah kematian ibu melahirkan sebagai acuan penghitungan. Dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan jumlah kasus kematian ibu cenderung fluktuatif dikarenakan oleh berbagai faktor.

Khusus sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di Ibukota Andoolo, mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari Capaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 – 2014, sebagaimana Tabel 2.12



Tabel 2.12. Capaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 – 2014.

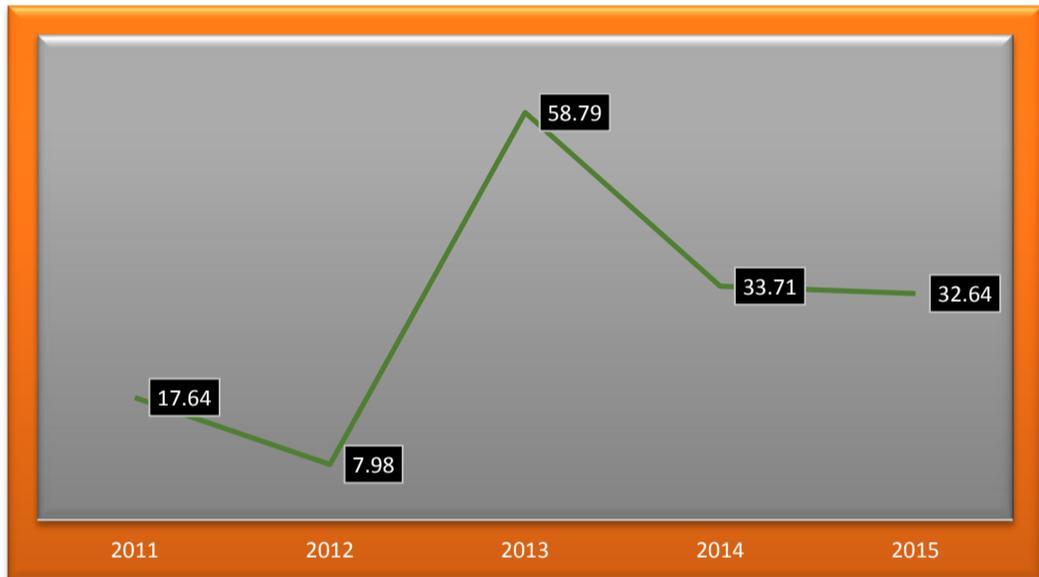
No	Indikator Keluaran	Keterangan	Standar	Tahun						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	<i>Peringkat Akreditasi yang diperoleh</i> a. Tercapainya Penetapan BLUD RS Konawe Selatan								Penetapan BLUD Penuh	
2	<i>Indeks Pelayanan yang dicapai BLUD RS Konawe Selatan</i> a. BOR (Bed Occupancy Rate) b. LOS (Length of Stay) c. BTO (Bed Turn Over) d. TOI (Turn Over Interval) e. Kunjungan Pasien - Rawat Jalan - Rawat Inap	(Angka Penggunaan Tempat Tidur) (Angka rata-rata lama Perawatan) Angka Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (Angka Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur)	(60-85%) (6-9 hari) (40 - 50 Kali) (1-3 hari)	46.5 9 20 10 3.865 523	52.0 9 21 8 5.208 718	61.0 9 24 6 6.917 942	62.0 6 30 4 7.670 1.294	64.0 5 39 3 10.991 1.924		

### 2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang

#### 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

Kondisi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Konawe Selatan dari data 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Dimana sampai pada tahun 2013 meningkat sebesar 58,79 %, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 33,71 % dan 32,64 %.

Gambar 2.6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011-2015



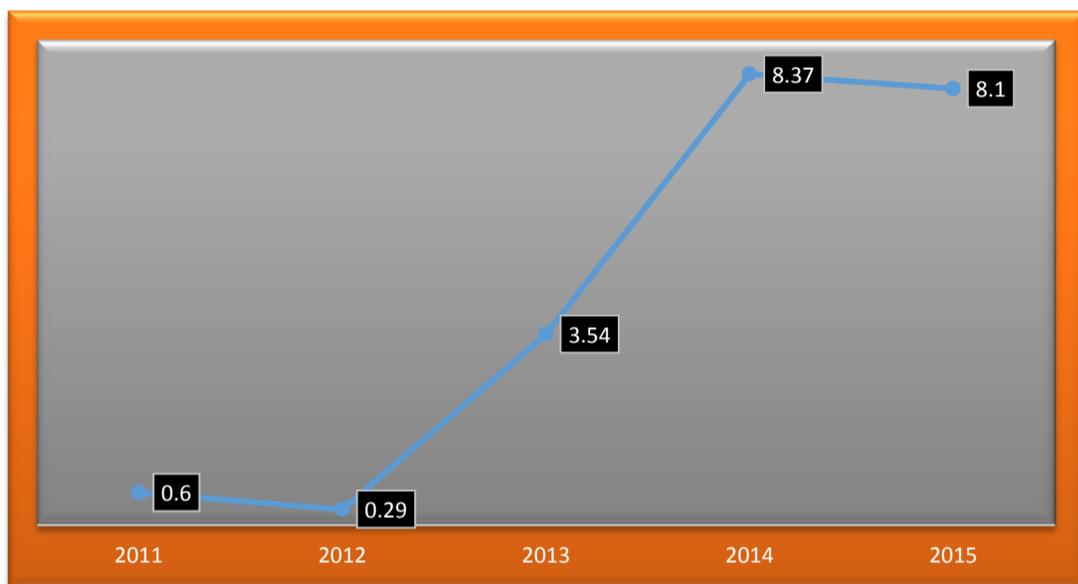
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan, 2015.

#### 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan

Secara nasional akses penduduk terhadap sanitasi yang layak di Indonesia pada saat ini (2010) sebesar 62,41% dengan proporsi lebih tinggi di perkotaan, yaitu 76,82 % dibandingkan dengan di pedesaan, yaitu 55,55 %. Capaian pelayanan sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong masih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 51,19 %, demikian pula target MDGs 2015 sebesar 75 %.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan target MDGs 2015 dari data 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 0,6 % dan terus meningkat sampai tahun 2015 sebesar 8,01 %, sanitasi dimaksud adalah jamban, sarana pembuangan Air Limbah (SPAL) dan tempat pembuangan Air Sampah.

Gambar 2.7. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan, 2015.

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum melalui misi utama yaitu meningkatkan prasarana di bidang keciptakarya kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang representative dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu tersedianya sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, selama kurun waktu 2010-2014 pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan melalui Dinas Pekerjaan Umum bidang cipta karya Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan 4 program prioritas yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Program Fasilitas dan Stimulasi Sarana Prasarana Perumahan.

Khusus sumberdaya air, selama tahun 2010-2014 sasaran pembangunannya adalah menyediakan, memelihara dan mengendalikan sarana prasarana sumber daya air, yang merupakan tugas dan fungsi sub bidang sumber daya air (SDA). Pelaksanaan pembangunan SDA yang diwujudkan dengan pelaksanaan program pengembangan, pengendalian dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, untuk melihat pelaksanaan selama periode tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada rangkuman dibawah ini.

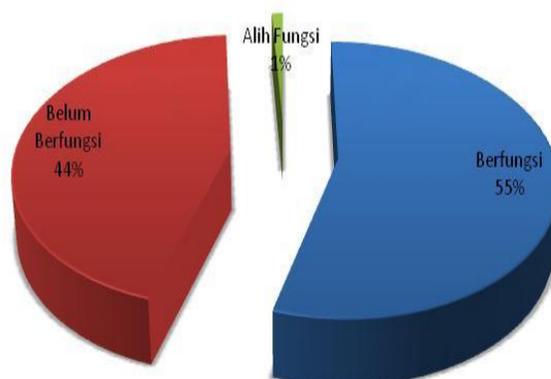
Tabel 2.13. Daerah Irigasi Menurut Fungsinya Tahun 2010 - 2014

Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)			
		Potensi	Berfungsi	Belum Berfungsi	Alih Fungsi
Irigasi Teknis	7	8.650	4.009	4.537	104
Irigasi Semi Teknis	20	6.190	4.464	1.532	194
Irigasi Desa	236	23.862	12.911	10.862	89
Irigasi Rawa	7	1.531	636	895	-
<b>Jumlah</b>	<b>270</b>	<b>40.233</b>	<b>22.020</b>	<b>17.826</b>	<b>387</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Selatan, 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2014 daerah irigasi berjumlah 270 dibagi menurut fungsinya antara lain daerah irigasi yang memiliki potensi seluas 40.233 Ha dengan daerah irigasi yang berfungsi seluas 22.020 Ha atau 55 persen sedangkan yang belum berfungsi seluas 17.826 atau 44 persen serta yang mengalami alih fungsi seluas 387 Ha atau hanya 1 persen.

Gambar 2.8. Jenis Irigasi Menurut Fungsi di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014.





#### 2.3.1.4. Urusan Perencanaan Pembangunan

Capaian program dan kegiatan yang selama tahun 2012–2015 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditampilkan pada Tabel 2.14, Tema pembangunan ini menjadi Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun 2012 – 2015.

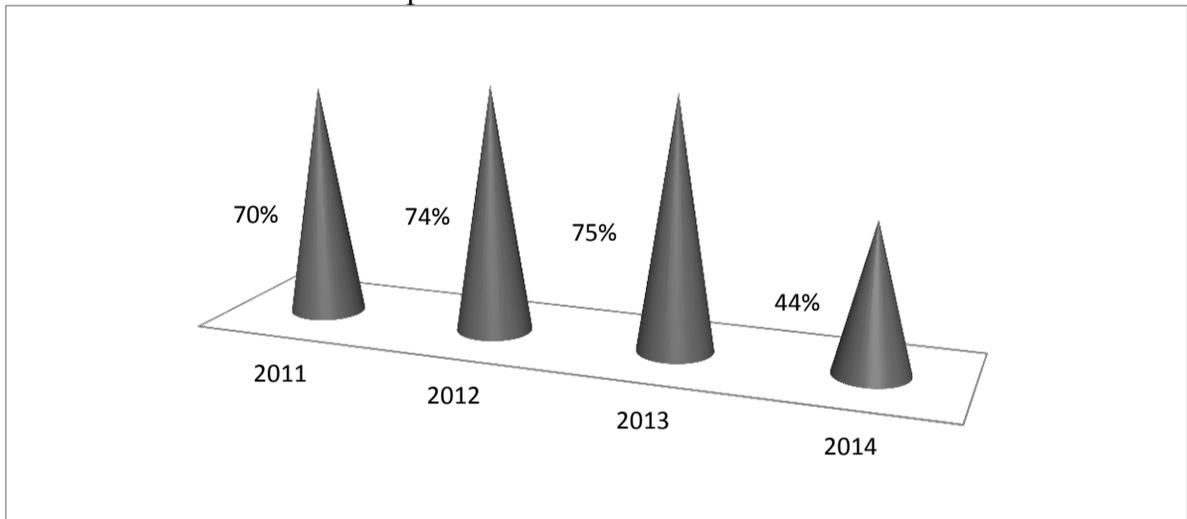
Tabel 2.14. Tema Pembangunan Setiap Tahun selama Periode 2012–2015 Kabupaten Konawe Selatan.

Tahun	Tema RKPD
2012	Kita Mantapkan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Melalui Tata Kelola Pemerintahan dan Sinergi Minapolitan dan Agropolitan.
2013	Revitalisasi Pelayanan Dasar serta Infrastruktur Wilayah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan
2014	Percepatan Pencapaian Visi Minapolitan, Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penuntasan Pelayanan Dasar.
2015	Optimalisasi Pencapaian Visi Minapolitan Melalui Peningkatan Infrastruktur, nilai tambah, daya Saing Produk Pertanian, Perikanan & Kehutanan.

#### 2.3.1.5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB

Indikator Kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB yang utama adalah Persentase Pasangan Usia Subur yang ikut KB Aktif. Selama tahun 2011 sampai tahun 2014 persentase Pasangan Usia Subur yang ikut KB Aktif cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2014 sebesar 44% dari jumlah pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Konawe Selatan.

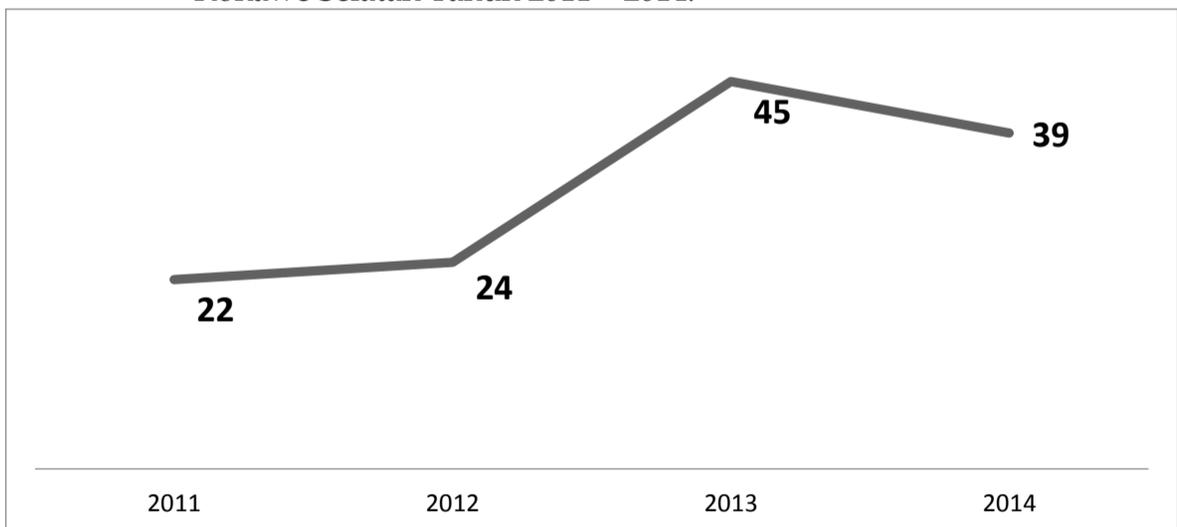
Grafik 2.10. Persentase Pasangan Usia Subur yang Ikut Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 - 2013.



Sumber : LKPJ Kab. Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Indikator program lain Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB adalah Jumlah Pengaduan dan Pengaduan Kasus KDRT di Kabupaten Konawe Selatan. Dari tahun ke tahun selama periode 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 Jumlah Pengaduan Kasus KDRT sebanyak 22 kasus dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 39 kasus.

Grafik 2.11. Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Kasus KDRT di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 - 2014.



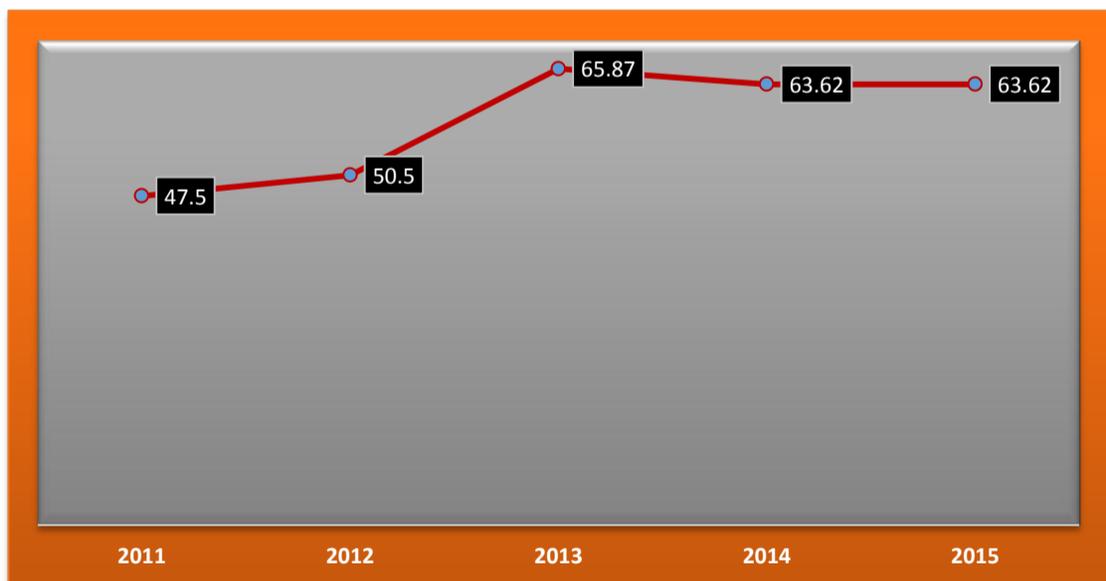
Sumber : LKPJ Kab. Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

### 2.3.1.6. Urusan Sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, diamanatkan agar daerah melakukan pendataan PMKS dan PSKS. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : (a) rehabilitasi sosial; (b) jaminan sosial; (c) pemberdayaan sosial; (d). perlindungan sosial; dan (e) penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Konawe Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana pada tahun 2010 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Konawe Selatan sebesar 45,0 % sampai pada tahun 2013 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Konawe Selatan naik menjadi 65,9 %. Meskipun cakupan tersebut belum mencapai target MDGs pada tahun 2015, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu percepatan target MDGs.

Gambar 2.9. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Selatan 2015.

### 2.3.1.7. Urusan Ketenagakerjaan

Selama kurun waktu 2010-2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran antara lain



menyediakan keterampilan bagi calon tenaga kerja atau pengangguran dan membina kawasan dan eks transmigrasi. Pada tabel berikut ditampilkan capaian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010 - 2014.

Tabel. 2.15. Capaian Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 - 2014

No	Indikator Keluaran	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yg mematuhi UU Ketenagakerjaan (Perusahaan)	6	9	20	6	9
2	Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial (Kasus)	6	6	6	11	8
3	Jumlah dan Jenis Pelatihan di Setiap Kecamatan (Kecamatan)	6	11	35	22	0
4	Jumlah Tenaga Kerja Pengangguran yang terserap sementara melalui padat karya (Orang)	153	396	468	586	264
5	Jumlah Pengangguran yg menjadi Tenaga Kerja Profesional/Wirausaha melalui TTG dan Padat Karya Produktif (Orang)	75	45	100	40	0
6	Jumlah kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan (Buah)	2	0	1	0	0

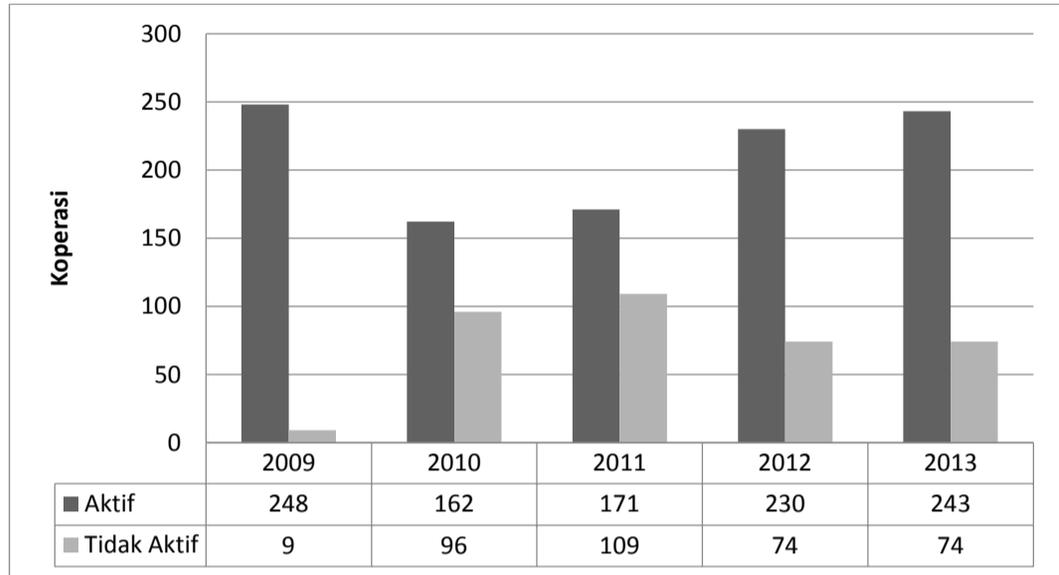
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe Selatan, 2015.

#### 2.3.1.8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selama tahun 2010 - 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe Selatan mendapat amanat untuk menumbuhkan kembali semangat ekonomi kerakyatan melalui koperasi aktif, wirausahawan baru dan UMKM yang mandiri. Pada tabel berikut ditampilkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2013. Sampai tahun 2013 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Konawe Selatan mencapai 243 Koperasi dan yang tidak aktif mencapai 74 koperasi yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan.



Grafik 2.12. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009-2013.

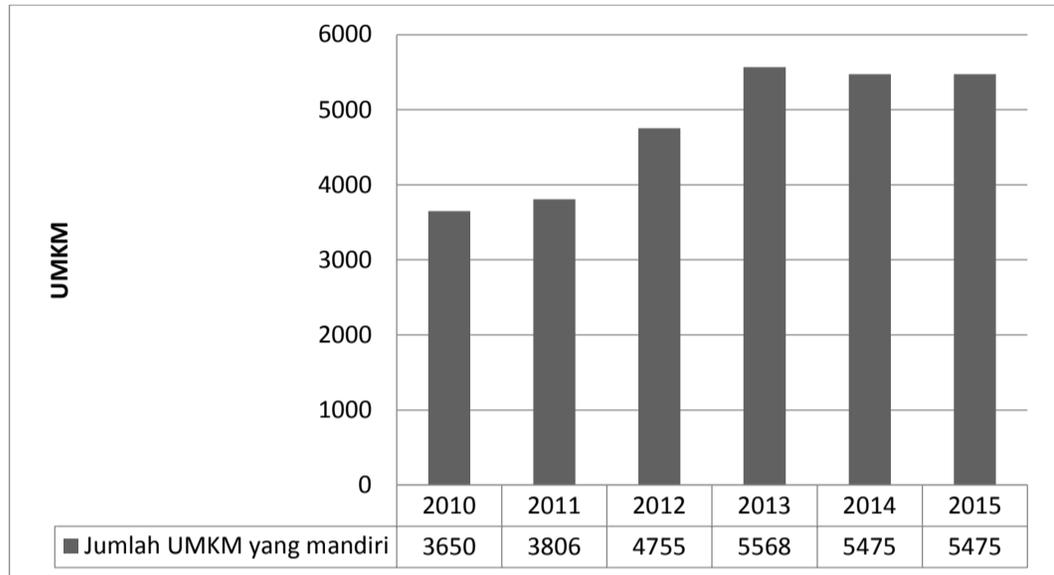


Sedangkan untuk jumlah UMKM yang mandiri di Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, bila pada tahun 2010 mencapai 3.650 UMKM pada tahun 2014 sudah mencapai 5.475 atau naik 150 persen. Pada grafik berikut ditampilkan jumlah UMKM Mandiri di Kabupaten Konawe Selatan.

Khusus pertumbuhan wirausahawan baru, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Koperasi dan UMKM telah berhasil memberikan fasilitasi kepada para wirausahawan baru melalui berbagai program dan kegiatan selama 5 tahun terakhir, dengan tumbuhnya wirausahawan baru maka akan memberikan multiplier effect kepada perekonomian daerah khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dipedesaan. Jumlah wirausahawan baru di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2010 mencapai 20 wirausahawan dan pada tahun 2015 sudah mencapai 154 wirausahawan.

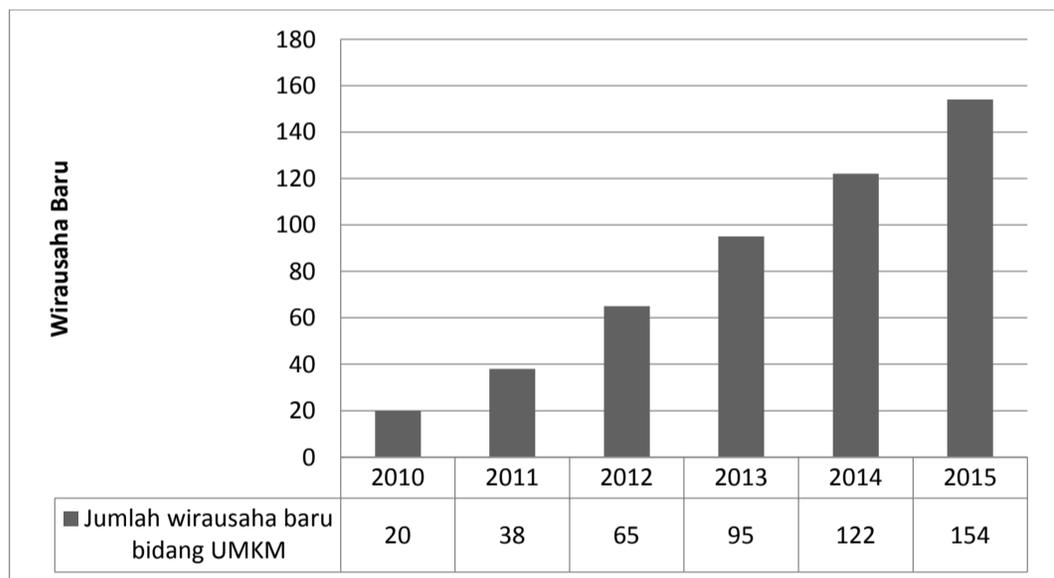


Grafik 2.13. Jumlah UMKM yang Mandiri di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Grafik 2.14. Jumlah Wirausaha Baru di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

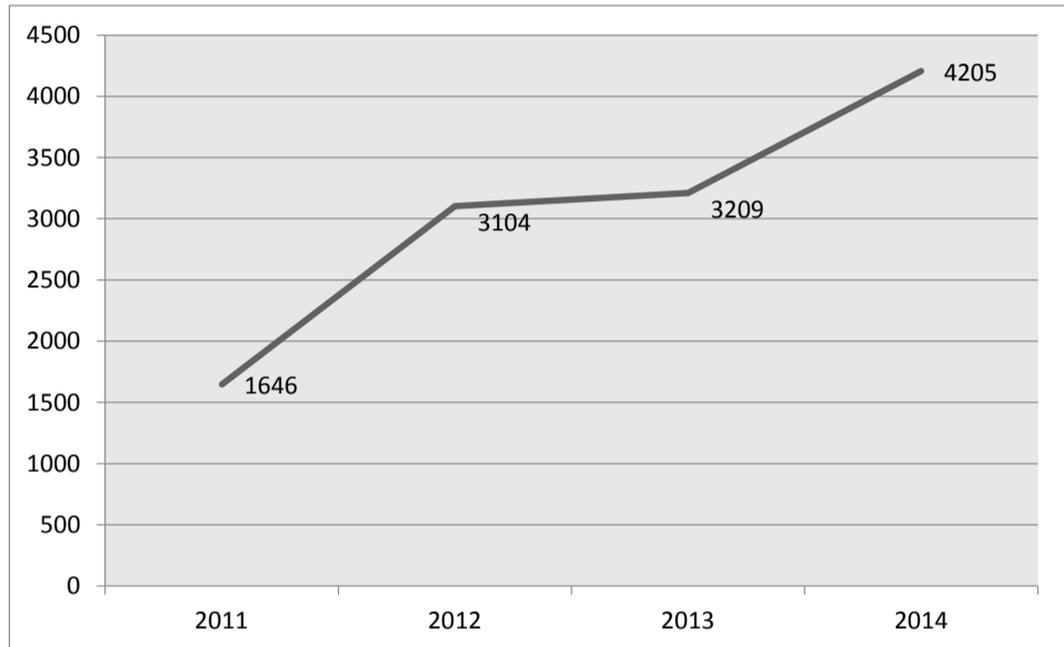
### 2.3.1.9. Urusan Penanaman Modal

Kinerja pelayanan perizinan di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan trend positif, pada tahun 2011 jumlah perizinan yang



dikeluarkan sebanyak 1.646 izin, dan pada tahun 2014 sudah mencapai 4.205 izin. Perkembangan yang cukup signifikan dapat menunjukkan pula tumbuhnya sektor rill di Kabupaten Konawe Selatan.

Grafik 2.15. Jumlah Izin yang Diterbitkan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015.



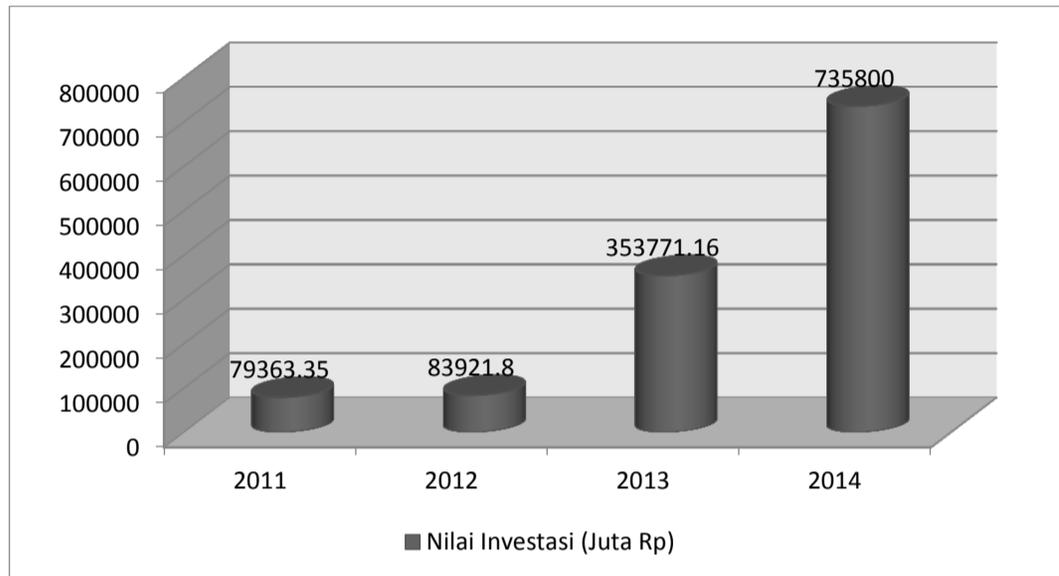
Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Disamping itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan, mengemban amanah untuk melaksanakan urusan Penanaman Modal sejak tahun 2013. Selama 5 tahun jumlah nilai realisasi investasi di Konawe Selatan meningkat signifikan yaitu sebesar 927,13 persen, dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 79,363 milyar dan pada tahun 2014 sudah mencapai 735,8 milyar. Peningkatan nilai realisasi investasi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian sektor real di Kabupaten Konawe Selatan.

Dukungan kebijakan yang ramah terhadap investor memberikan peluang terhadap peningkatan daya saing investasi di Kabupaten Konawe Selatan, namun disisi lain masih perlu pembenahan regulasi khususnya



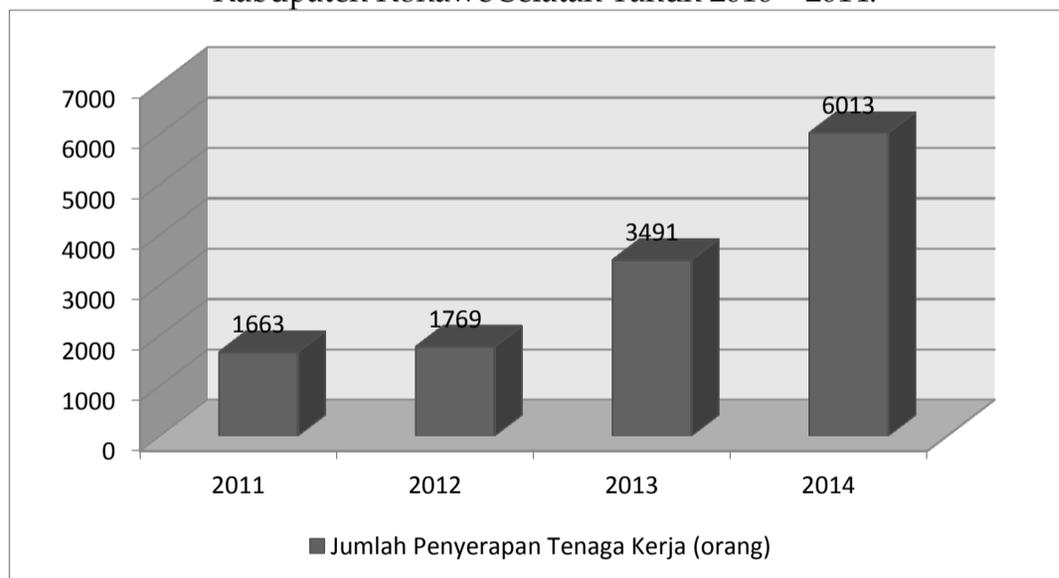
Grafik 2.16. Nilai Investasi di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

tata ruang wilayah yang lebih informatif dan memberikan kepastian tata batas dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai manfaat mutualisma antara investor dan masyarakat Konawe Selatan. Pada grafik 2.17 ditampilkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh investasi di Kabupaten Konawe Selatan.

Grafik 2.17. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dari Investasi di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.

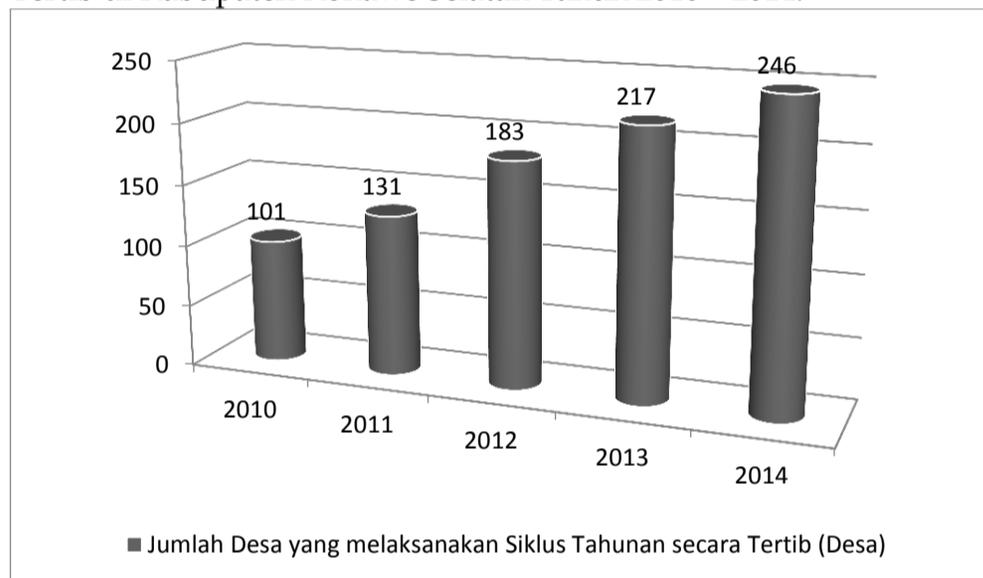


Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

### 2.3.1.10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagian besar adalah kawasan perdesaan yang memiliki 331 desa dan 15 kelurahan. Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Kawasan Perdesaan. Pada grafik dibawah ini, ditampilkan jumlah desa yang telah melaksanakan siklus tahunan secara tertib di Kabupaten Konawe Selatan, siklus tahunan yang dimaksud adalah penyusunan RKP desa dan APBD desa.

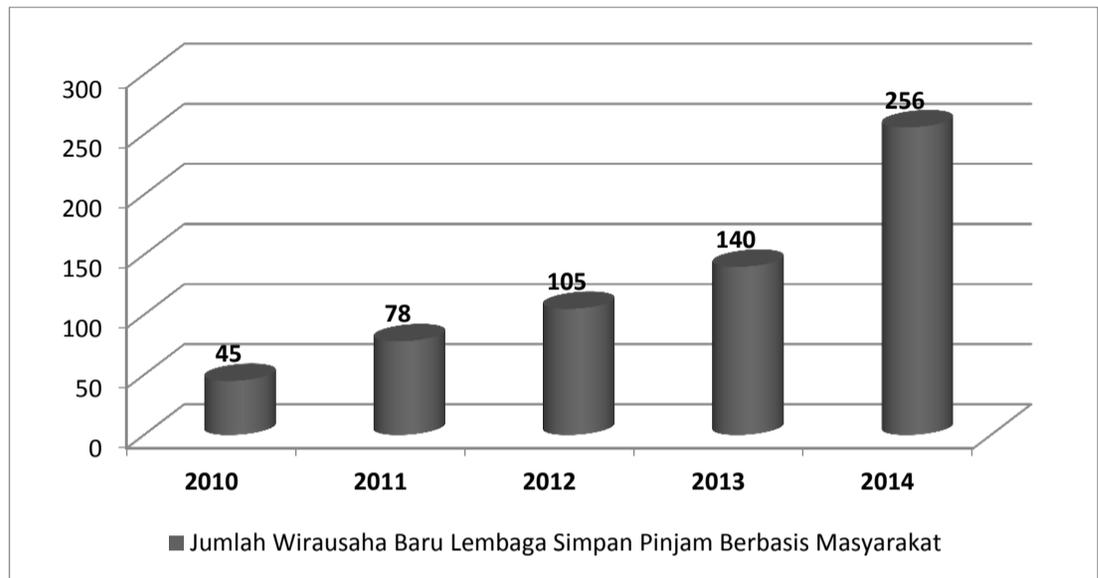
Grafik 2.18. Jumlah Desa yang Melaksanakan Siklus Tahunan Secara Tertib di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Ketertiban dalam melaksanakan siklus tahunan, menunjukkan aparatur pemerintahan desa telah memiliki kemampuan pengelolaan pemerintahan desa, diharapkan pula aparatur pemerintahan desa dapat menggerakkan perekonomian desa. Pada grafik 2.19 ditampilkan jumlah wirausaha baru lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan, pada tahun 2010 mencapai 45 wirausaha baru dan pada tahun 2014 telah mencapai 256 wirausaha baru.

Grafik 2.19. Jumlah Wirausaha Baru Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 – 2015.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

#### 2.3.1.11. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Cetak biru pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah dimulai sejak tahun 2016 dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksiya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Pada tahun 2017, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Konawe Selatan akan menghubungkan 5 SKPD yaitu Sekretariat Daerah, DPKAD, BAPPEDA, Inspektorat dan Sekretariat DPRD sebagai *backbone* jaringan intranet pemda Kabupaten



Konawe Selatan berbasis *fiber optict*. Dengan jaringan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan khususnya dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di Konawe Selatan. Diharapkan sampai dengan Tahun 2021 seluruh kantor pada pusat Pemerintahan Pemda Kabupaten Konawe Selatan telah terkoneksi sehingga pada sistem jaringan yang terpusat diharapkan pelayanan publik di Konawe Selatan dapat dilaksanakan secara online. Beberapa pelayanan di Konawe Selatan telah dilaksanakan secara online berbasis internet diantaranya adalah Portal Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, LPSE (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik), SIPERDA, SIMONEV, dan SIM Perijinan. Tapi hingga saat ini keseluruhan system teknologi informasi tersebut masih bersifat parsial sehingga diharapkan kedepannya akan diintegrasikan kedalam suatu *Digital Government System* (DGS) terpadu yang diharapkan dapat memudahkan dalam perawatan dan konektivitas data.. Selanjutnya dengan konsep e-gov tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep ini dinamakan layanan teknologi informasi *Integrated Digital Governemnt Services* (IDGS).

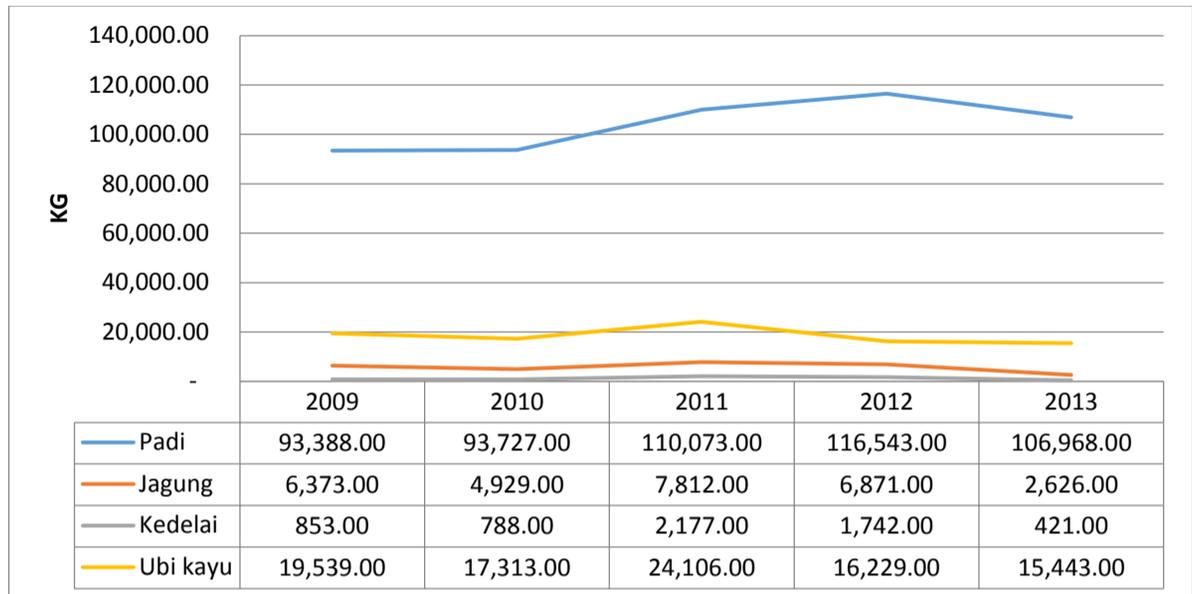
### **2.3.2. Urusan Pilihan**

#### **2.3.2.1. URUSAN PERTANIAN**

Fokus pembangunan disektor pertanian adalah peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama sektor ini yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Selama kurun waktu 2009-2013 terjadi fluktuasi produksi dengan kecenderungan semakin meningkat, hal ini diakibatkan kondisi iklim yang cukup ekstrim, banyaknya infrastruktur yang sudah tidak layak digunakan akibat usia yang sudah tua dan akibat bencana alam banjir yang pernah melanda Kabupaten Konawe Selatan. Namun secara jumlah Kabupaten Konawe Selatan dari produksi beras sampai tahun 2013 masih dalam kondisi surplus sebesar 36.180,27 ton, kondisi ini permasalahan pangan terutama beras Kabupaten Konawe Selatan dalam kondisi kecukupan pangan.



Grafik 2.21. Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009–2013.



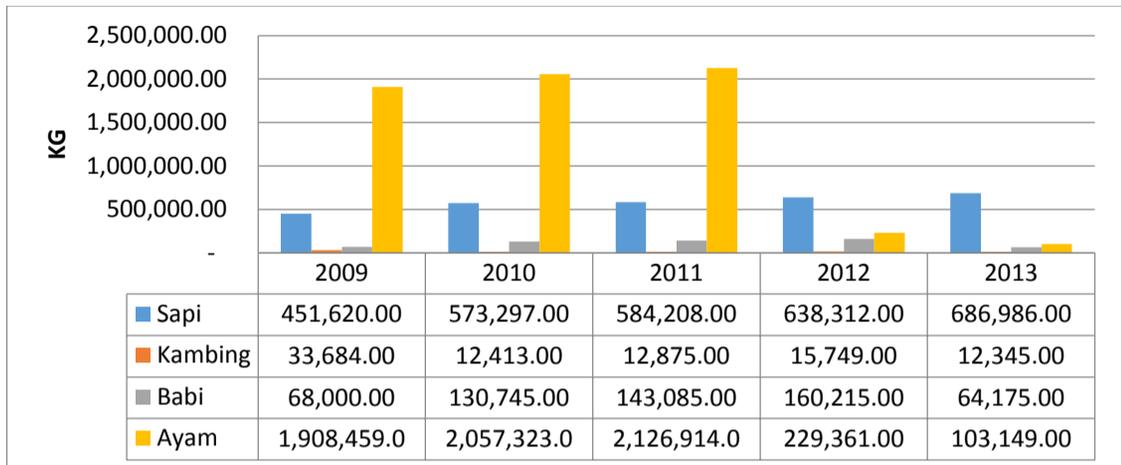
Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Perkembangan sektor peternakan dalam hal ini produksi daging selama kurun waktu 2009 - 2013 berfluktuasi dengan kecenderungan juga semakin meningkat khususnya daging dari ternak sapi, dimana Kabupaten Konawe Selatan merupakan sentra pengembangan sapi di Sulawesi Tenggara. Dari produksi daging Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2013 masih dalam kondisi Surplus sebesar 515.676 Kg, dengan kondisi ini permasalahan pangan khususnya protein yang bersumber dari daging hewan di Kabupaten Konawe Selatan dalam kondisi kecukupan pangan, namun belum mencapai ketahanan pangan daerah.

Fokus pembangunan sektor perkebunan selama tahun 2010 - 2014 adalah peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pada sektor ini. Pada grafik dibawah ini ditampilkan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Konawe Selatan khususnya tanaman kelapa, kakao dan jambu mete sebagai komoditas primadona di Kabupaten Konawe Selatan. Perkembangan sektor perkebunan selama kurun waktu 2009 - 2013 berfluktuasi dengan kecenderungan semakin meningkat, hal ini diakibatkan kondisi iklim yang cukup ekstrim terutama pada komoditas Jambu mete.



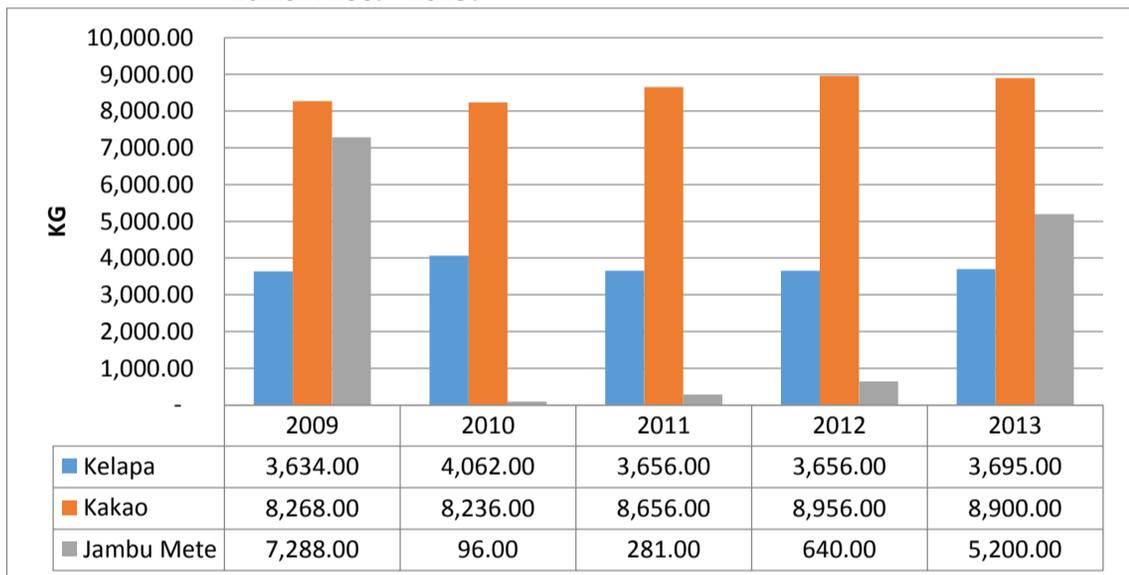
Grafik 2.22. Produksi Daging Sektor Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 –2013.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Sedangkan untuk komoditas Kakao dan Kelapa pertumbuhannya cukup meningkat. Kedua komoditas ini merupakan produk unggulan Kabupaten Konawe Selatan yang

Grafik 2.23. Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009–2013.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

sudah berskala ekspor, namun data ekspor dua komoditi belum akurat dimana data ekspor yang ada masih sangat kurang yang disebabkan banyak ekspor kedua komoditas ini tercatat di Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai pelabuhan besar tempat pengeluaran dua komoditas ini.

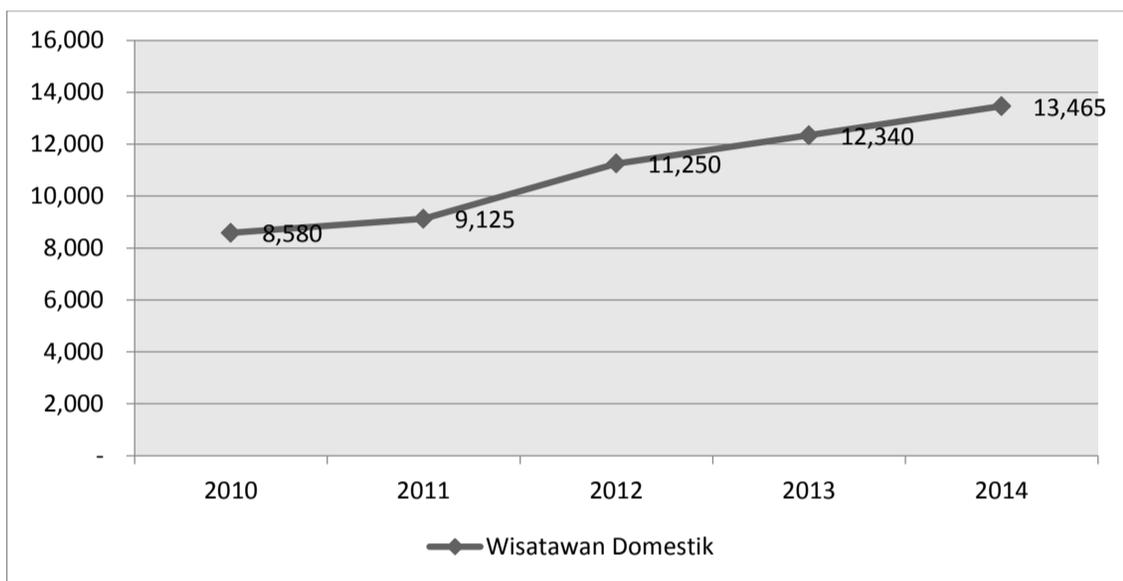
### 2.3.2.2. URUSAN PARIWISATA

Fokus pembangunan pada Dinas Pariwisata adalah sebagai marketing destinasi wisata di Kabupaten Konawe Selatan, dengan tetap memperhatikan



infrastruktur pariwisata yang ada. Dinamika kepariwisataan dunia dan regional menuntut Dinas Pariwisata untuk fokus pada destinasi wisata unggulan seperti Pengembangan Destinasi Pulau Hari dan Air Terjun Moramo, dengan demikian dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Konawe Selatan. Pada grafik berikut ditampilkan jumlah wisatawan di Kabupaten Konawe Selatan selama tahun 2010-2014.

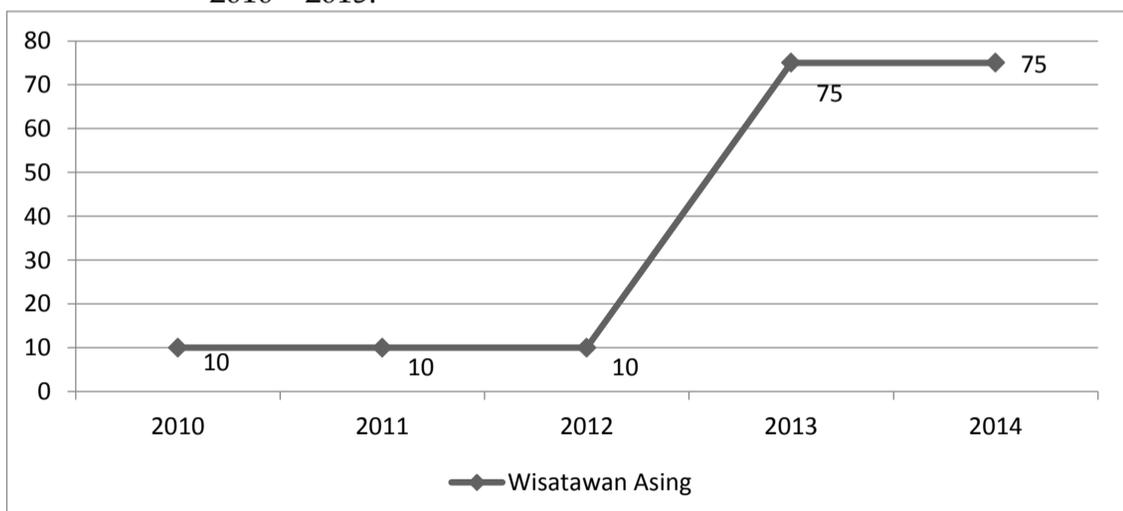
Grafik 2.24. Jumlah Wisatawan Domestik di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.



Sumber : LKPJ Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015

Pada tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Konawe Selatan hanya mencapai 8.580 wisatawan meningkat. 56,93 persen pada tahun 2014 yang mencapai 13.465 wisatawan.

Grafik 2.25. Jumlah Wisatawan Asing di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015.



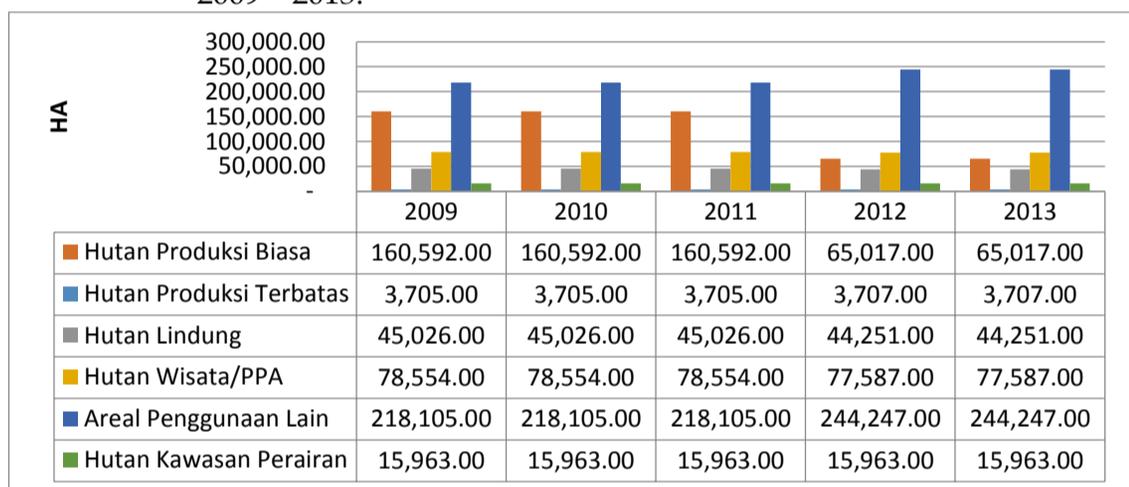


Khusus jumlah wisatawan asing di Kabupaten Konawe Selatan masih membutuhkan kerja keras untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing.

### 2.3.2.3. Urusan Kehutanan

Fokus pembangunan sektor kehutanan selama tahun 2010-2014 diarahkan untuk menciptakan kelestarian kawasan hutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kawasan hutan, disisi lain pemanfaatan kawasan hutan diupayakan sesuai dengan standar dan norma Kementerian Kehutanan tentang Pengelolaan Hutan Terpadu.

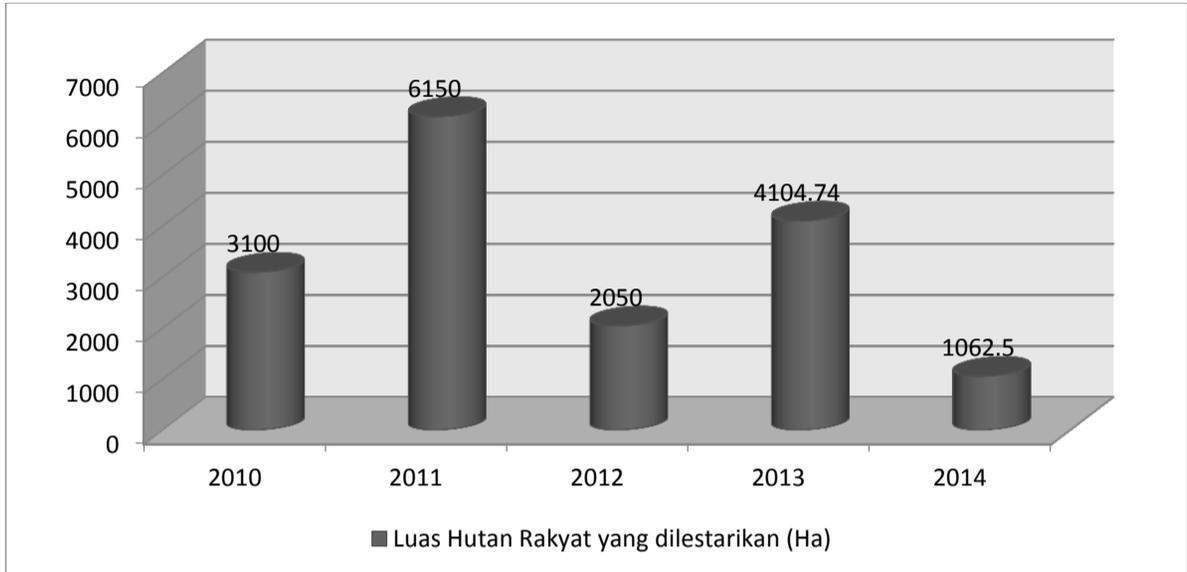
Grafik 2.26. Perkembangan Luas Hutan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 - 2013.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015

Selama kurun waktu 2009 - 2013, perkembangan luas hutan masih stabil, hanya pada hutan produksi biasa yang terjadi penurunan status pada tahun 2012, hal ini disebabkan beralihnya fungsi hutan produksi biasa ke peruntukan lain seperti perkebunan dan pemukiman.

Grafik 2.27. Luas Hutan Rakyat yang Dilestarikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

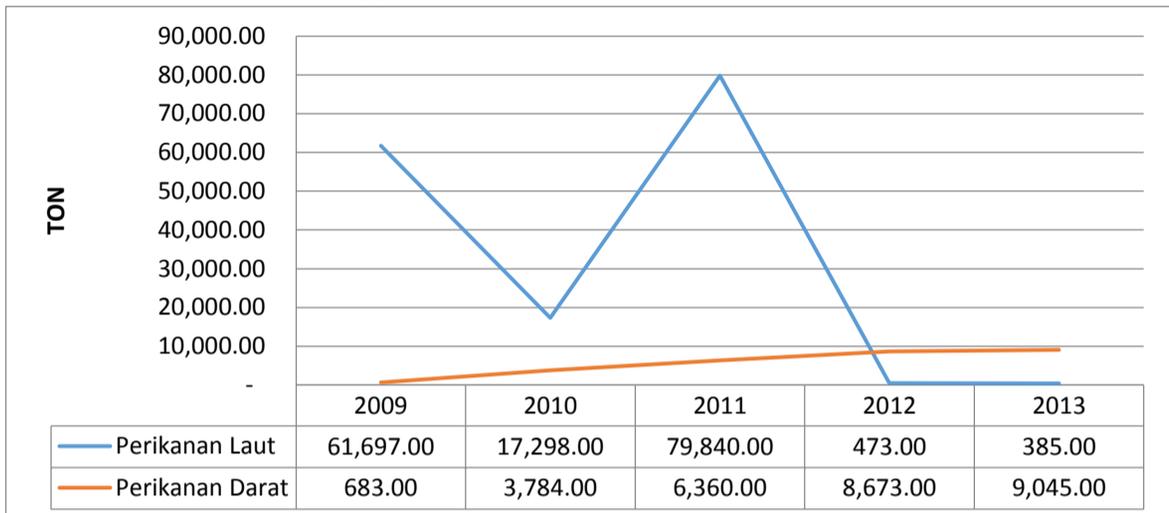
Khusus luas hutan rakyat di Kabupaten Konawe Selatan mengalami penurunan seiring dengan dinamika pembangunan masyarakat Konawe Selatan, sampai tahun 2014 luas hutan rakyat mencapai 1062,5 ha, jauh menurun dibanding tahun 2010 yang mencapai 3.100 ha. Pada grafik diatas ditampilkan luas hutan rakyat di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010-2014.

#### 2.3.2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan laut sampai tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tajam seiring dengan kapal dan alat tangkap nelayan yang kalah bersaing dengan nelayan lainnya. Penurunan produksi ikan laut ini semakin besar, karena kondisi iklim yang menyebabkan perahu dan kapal nelayan Konawe Selatan sulit beradaptasi, sehingga hasil tangkapan menjadi rendah.



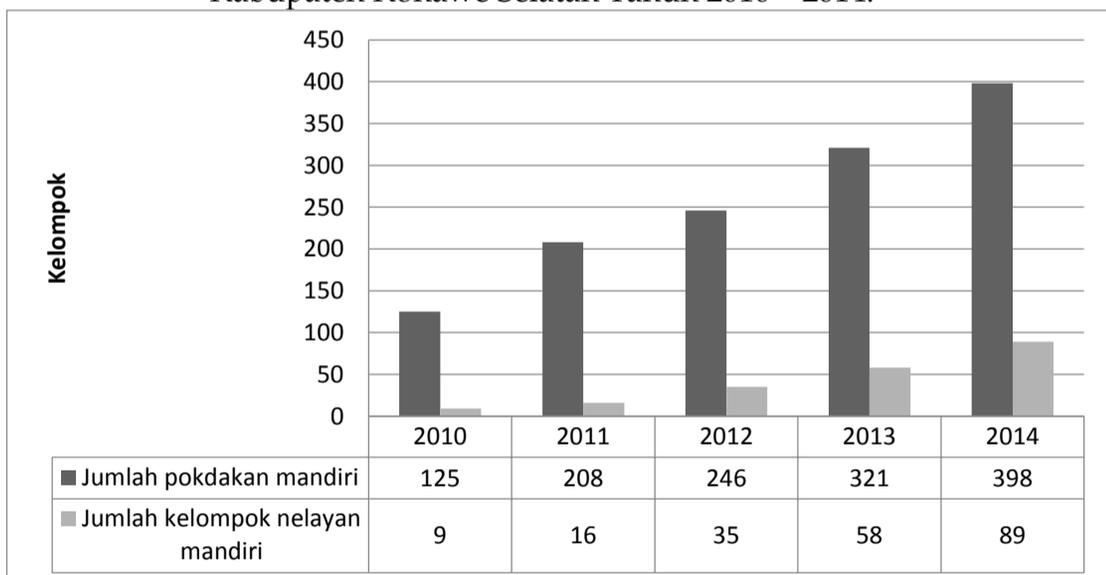
Grafik 2.28. Perkembangan Jumlah Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 - 2013.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.

Sebagai gambaran, kapal yang beroperasi diperairan Konawe Selatan rata-rata hanya dibawah 10 GT, semntara itu dengan jenis perairan di seputaran luat Banda dan sekitarnya dibutuhkan kapal diatas 20 - 30 GT. Jumlah kapal di Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2014 mencapai 481 unit, sementara dalam rangka optimalisasi produksi perikanan tangkap dengan potensi lestari 12.000 ton/tahun masih dibutuhkan sekitar 209 kapal type 20-30 GT.

Grafik 2.29. Perkembangan Jumlah Kelompok Nelayan Sektor Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2014.



Sumber : LKPJ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015.



Namun seiring penurunan produksi perikanan laut, produksi perikanan darat mengalami peningkatan mencapai 9.045 ton pada tahun 2014 atau naik 1224,3 persen dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai 683 ton. Peningkatan ini diperoleh melalui berbagai program dan kegiatan yang difokuskan kepada peningkatan produksi perikanan darat khususnya tambak. Begitu pula halnya dari sisi Sumberdaya Manusia sektor perikanan, jumlah kelompok nelayan mandiri meningkat menjadi 398 kelompok pada tahun 2014 dibanding tahun 2010 yang mencapai 125 kelompok mandiri.

## 2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Tabel 2.16. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan per kapita Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014.

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
		1	Buton	65,82
2	Muna	58,73	57,45	57,64
3	Konawe	67,1	55,5	57,29
4	Kolaka	68,78	55,28	57,3
5	Konawe Selatan	62,35	57,82	58,34
6	Bombana	66,65	61,93	62,55
7	Wakatobi	63,68	54,78	56,23
8	Kolaka Utara	63,91	54,49	56,01
9	Buton Utara	66,34	58,76	60
10	Konawe Utara	65,16	59,81	60,35
13	Kota Kendari	57,1	49,96	50,36
14	Kota Bau-Bau	59,43	49,39	50,32
	Sulawesi Tenggara	64,2	55,95	57

Sumber : TNP2K, 2015.



Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

#### 2.4.1.2. Panjang Jalan

Jalan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas penduduk dari suatu tempat ketempat lain, disamping itu juga jalan berfungsi memperlancar kegiatan perekonomian. Pelaksanaan pembangunan jalan di Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2010 - 2014 dapat dilihat dari Capaian Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Melalui (Dana DAK dan APBD)

Tabel 2.17  
Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Melalui ( Dana DAK dan APBD ) Tahun 2010 - 2014

Tahun	Peningkatan Jalan Aspal	Peningkatan Jalan Kerikil	Rehabilitasi Jalan Aspal	Rehabilitasi Jalan Kerikil	Pemeliharaan Rutin Jalan
2010	2,07	1,70	0,46	10,00	97,00
2011	5,93	3,22	0,50	125,76	45,90
2012	5,86	81,85	-	38,70	121,45
2013	15,19	99,44	-	2,86	21,60
2014	19,03	15,36	-	22,48	-
<b>Jumlah</b>	<b>48,08</b>	<b>201,57</b>	<b>0,96</b>	<b>199,80</b>	<b>285,95</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Selatan, 2014

sepanjang 736,35 Km meliputi peningkatan jalan aspal sepanjang 48,08 Km, peningkatan jalan kerikil sepanjang 201,57 Km, rehabilitasi jalan aspal sepanjang 0,96 Km, rehabilitasi jalan kerikil sepanjang 199,80 Km dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 285,95 Km.

Berdasarkan jenis permukaannya jalan dapat dikategorikan jalan aspal, Jalan kerikil, telford dan tanah. Panjang jalan aspal pada tahun 2014 sepanjang 149,22 km. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 terdapat peningkatan sepanjang 38,58 km dimana panjang jalan aspal pada tahun 2010 sepanjang 110,64 Km. Untuk jalan dengan jenis permukaan kerikil mempunyai volume yang cukup besar dan merupakan jalan dengan jenis permukaan yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Konawe Selatan yaitu sepanjang 870,56 Km. Sedangkan jalan dengan kategori jalan tanah



pada tahun 2014 sepanjang 12,26 km, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 jalan dengan kondisi permukaan tanah mengalami penurunan sepanjang 40,39 km. Dengan demikian berkurangnya kondisi jalan dengan permukaan tanah menjadi permukaan kerikil tiap tahunnya disebabkan oleh peningkatan jalan kerikil.

Tabel 2.18. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2010 – 2014

Tahun	Panjang Jalan	Jenis Permukaan			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Terinci
2010	777,45	110,64	614,16	52,65	-
2011	1.032,04	114,64	831,75	85,65	-
2012	1.032,04	120,50	824,89	86,65	-
2013	1.032,04	130,19	855,20	46,65	-
2014	1.032,04	149,22	870,56	12,26	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Selatan, 2014

Berdasarkan kondisi jalan permukaan yaitu kondisi baik, sedang dan rusak. Tahun 2010–2014 jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2013 kondisi jalan baik mencapai 355,94 Km, jika dibandingkan tahun 2010 kondisi jalan baik sepanjang 168,26 Km. sedangkan untuk kondisi sedang mengalami peningkatan menjadi 328,50 Km selama tahun 2010-2014. Adapun jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan menjadi 183,80 Km.

Tabel 2.19 Jumlah Jembatan Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jembatan Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Jembatan	Jenis Jembatan											
		Baja		Beton		Semi Permanen		Kayu		Darurat		Tidak Ada Jembatan	
		Bh	M'	Bh	M'	Bh	M'	Bh	M'	Bh	M'	Bh	M'
2010	371,00 / 2.869,90	8,00 / 320,00	211,00 / 1.572,70	123,00 / 737,70	17,00 / 111,50	5,00 / 41,00	7,00 / 87,00						
2011	396,00 / 3.415,95	10,00 / 381,05	234,00 / 2.057,70	123,00 / 737,70	17,00 / 111,50	5,00 / 41,00	7,00 / 87,00						
2012	438,00 / 3.731,45	15,00 / 580,55	247,00 / 2.156,70	123,00 / 737,70	27,00 / 114,50	5,00 / 41,00	21,00 / 101,00						
2013	468,00 / 3.591,50	8,00 / 315,50	318,00 / 2.332,00	84,00 / 539,00	7,00 / 57,00	33,00 / 162,00	18,00 / 186,00						
2014	. / .	/	/	/	/	/	/						

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Selatan, 2014



Berdasarkan kondisi jembatan dapat dirinci yaitu kondisi baik, sedang dan rusak. Tahun 2010–2014 jembatan dengan kondisi baik mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2014 kondisi jembatan mencapai 141 jembatan baik yang jika dibandingkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu 54 buah dalam keadaan baik. Sedangkan untuk kondisi jembatan sedang juga mengalami peningkatan sebesar 90 buah dalam keadaan sedang, dimana pada tahun 2010 berjumlah 23 buah. Adapun jembatan dengan kondisi rusak kembali mengalami peningkatan dimana untuk tahun 2010 berjumlah 157 buah, pada tahun 2014 menurun menjadi 44 buah. Berdasarkan kondisi diatas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Konawe Selatan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap daya dukung kegiatan produksi dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat yang baik dan memadai.

#### 2.4.1.3. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah sekitarnya.



Tabel 2.20. Nilai Indeks Pembangunan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

No	Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
								Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
1	Buton	54	52,35	32,95	82,8	45,78	62,04	35,24	64,76	0	210
2	Muna	55,47	58,68	33,55	75,73	45,28	68,96	24,27	75,73	0	206
3	Konawe	54,14	52,31	36,01	78,33	46,79	63,68	25,31	73,86	0,83	241
4	Kolaka	57,75	56,17	37,21	82,72	49,42	71,73	17	83	0	100
5	Konawe Selatan	52,94	44,09	36,05	80,88	50,24	69,03	34,6	65,4	0	341
6	Bombana	48,47	47,03	29,42	72,29	44,46	56,36	54,7	45,3	0	117
7	Wakatobi	52,62	54,41	34,63	72,6	43,23	60,99	34,67	65,33	0	75
8	Kolaka Utara	53,84	50,38	38,17	76,51	47,82	64,1	33,59	66,41	0	128
9	Buton Utara	53,31	54,23	34,04	77,34	47,81	55,77	34,62	65,38	0	78
10	Konawe Utara	48,4	36,12	30,37	83,26	47,55	62,58	61,48	38,52	0	135
11	Kolaka Timur	48,86	41,77	29,89	77,32	47,45	62,22	47,01	52,99	0	117
12	Konawe Kepulauan	37,81	25,88	26,06	60,43	43,59	52,64	94,44	5,56	0	72
	Sulawesi Tenggara	52,35	48,48	33,83	78,07	47,09	64,03	37,69	62,2	0,11	1820

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014, Bappenas RI.



#### 2.4.1.4. Ship Share dan Location Question

Analisis basis ekonomi digunakan untuk mengetahui berapa tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu daerah atau sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Salah satu teknik yang digunakan adalah location question. Location question banyak digunakan sebagai alat sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah /kabupaten pada sektor-sektor tertentu. Location question ini digunakan secara luas sehingga satuan pengukuran apa saja dapat digunakan untuk menghitungnya.

Tabel 2.21. Nilai Share dan LQ Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan

No	Jenis Komoditi	Share	LQ
1	Padi	19,06	1,25
2	Jagung	3,89	0,26
3	Ubi Kayu	8,55	0,56
4	Ubi Jalar	9,63	0,63
5	Kacang Tanah	3,99	0,26
6	Kedelai	11,7	0,77
7	Kacang Hijau	10,43	0,69
8	Pisang	19,28	0,58
9	Jeruk	74,04	2,51
10	Mangga	20,88	0,05
11	Cabai	25,35	2,52
12	Bawang Merah	0,99	0,01
13	Kentang	0	0
14	Kunyit	47,22	0,34

Sumber : Sensus Tani Indonesia, Laporan Akhir Potensi Ekonomi & Penyusunan Data Base Sumber Daya Alam dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di kabupaten Konawe Selatan, Bappeda 2014

Tabel 2.22. Nilai Share dan LQ Komoditas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan

No	Jenis Komoditi	Share	LQ
1	Akasia	14,8	0,49
2	Bambu	18,05	0,6
3	Jati	29,31	0,97
4	Mahoni	23,7	0,78
5	Sengon	54,43	1,8
6	Jabon	13,27	0,44
7	Waru	89,7	2,96
8	Jati Putih	44,94	1,49
9	Suren	0	0

Sumber : Sensus Tani Indonesia, Laporan Akhir Potensi Ekonomi & Penyusunan Data Base Sumber Daya Alam dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di kabupaten Konawe Selatan, Bappeda 2014



Tabel 2.23. Nilai Share dan LQ Komoditas Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014

No	Jenis Komoditi	Share	LQ
1	Aren/Enau	2,37	0,11
2	Asam Jawa	4,67	0,21
3	Cengkeh	6,45	0,3
4	Jambu Mete	18,06	0,83
5	Jarak Pagar	0,71	0,03
6	Kakao	19,26	0,88
7	Kapok	4,77	0,22
8	Kelapa Sawit	26,33	1,21
9	Kelapa	21,75	1
10	Kemiri	26,6	1,22
11	Kopi	22,19	1,02
12	Lada	44,04	2,02
13	Panili/Vanili	43,25	1,98
14	Pala	14,55	0,67
15	Pandan Anyaman	0	0
16	Pinang/Jambe	15,26	0,7
17	Sagu	32,06	1,47

Sumber : Sensus Tani Indonesia, Laporan Akhir Potensi Ekonomi & Penyusunan Data Base Sumber Daya Alam dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di kabupaten Konawe Selatan, Bappeda 2014

Tabel 2.24. Nilai Share dan LQ Komoditas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014

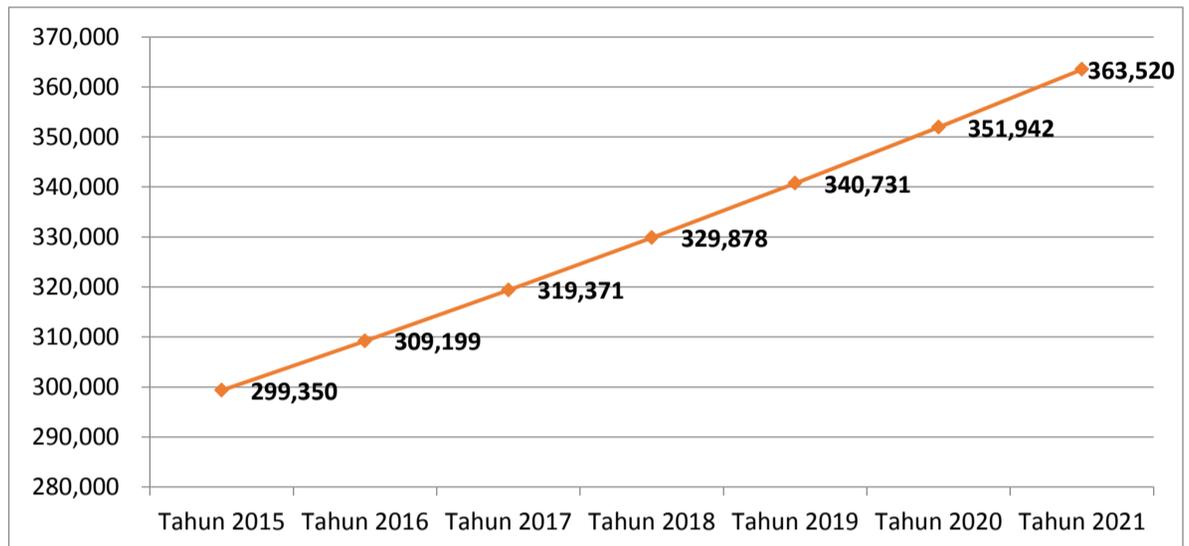
No	Jenis Komoditi	Share	LQ
1	Perairan Laut	19,52	1,06
2	Lahan Tambak	17,68	0,96
3	Lahan Kolam	21,96	1,2

Sumber : Sensus Tani Indonesia, Laporan Akhir Potensi Ekonomi & Penyusunan Data Base Sumber Daya Alam dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di kabupaten Konawe Selatan, Bappeda 2014



#### 2.4.1.5. Jumlah Penduduk

Grafik 2.30. Proyeksi Penduduk (Jiwa) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 - 2021.



Sumber : Konawe Selatan dalam Angka Tahun 2015.

Tabel 2.25. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2015

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	85.990	83.843	95.175
SMTP	46.493	46.225	48.690
SMTA Umum	38.315	39.979	38.232
SMTA Kejuruan	5.274	7.989	5.341
Diploma	6.081	5.105	1.990
Universitas	6.411	9.044	7.414
<b>Jumlah</b>	<b>188.564</b>	<b>192.185</b>	<b>196.842</b>

Tidak bisa dipungkiri bahwa komposisi penduduk usia kerja di Kabupaten Konawe Selatan tidak jauh berbeda dari Nasional dan provinsi yakni dengan masih dominannya penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan Maksimum SD. Tahun 2013 persentase penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan Maksimum SD masih sebesar 45,60 persen, tahun 2014 menurun menjadi sebesar 43,63 persen dan tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi sebesar 48,35 persen. Secara umum, dilihat dari kualitas tenaga kerja di Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2013-2015 masih dikatakan rendah karena 73,45



persen lebih masih berpendidikan di bawah SLTA begitu juga dengan SLTA dan sederajat di tahun yang sama jumlah tenaga kerja sebesar 70,22 persen. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya dinas yang terkait yang menangani. Sedangkan persentase penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan universitas trendnya berfluktuatif pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja sebesar 3,40 persen, kemudian tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 4,71 persen, selanjutnya tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,77 persen. masalah pendidikan agar dapat memaksimalkan anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen dari total anggaran sehingga beberapa tahun ke depan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Konawe Selatan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dari sekarang.

#### **2.4.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sering digunakan untuk melihat seberapa besar tenaga kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan). Selama tiga tahun terakhir berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2013-2015 menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Konawe Selatan terus mengalami kenaikan dari yang sebesar 67,85 persen tahun 2013 menjadi 69,58 tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kenaikan cukup tinggi menjadi sebesar 73,60 persen.

#### **2.4.1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur**

TPAK golongan umur 15-19 tahun selama tiga terakhir sangat fluktuatif dengan besaran yang cukup tinggi. Tahun 2013 TPAK kelompok umur ini sebesar 41,15 persen, kemudian tahun 2014 turun menjadi menjadi 37,69 persen dan tahun 2015 meningkat tajam sebesar 45,11 persen. Cukup tingginya TPAK golongan umur ini menunjukkan bahwa anak-anak yang seharusnya masih berada di bangku sekolah sudah banyak yang beredar di pasar kerja. Hal yang sama terjadi pada golongan umur 20-24 tahun, dimana pada golongan umur ini seharusnya masih berada di bangku kuliah. Tingginya TPAK golongan umur ini dikhawatirkan adalah kontribusi dari lulusan SMTA baik Umum maupun Kejuruan yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.



Tabel 2.26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur  
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2015 (%)

Golongan Umur	2013	2014	2015
15-19	41,15	37,69	45,11
20-24	60,65	70,78	72,21
25-29	68,96	70,93	75,31
30-34	73,40	73,48	79,14
35-39	77,91	84,93	83,85
40-44	84,20	83,64	85,33
45-49	76,89	84,61	92,07
50-54	84,63	82,82	85,61
55-59	77,76	77,27	78,42
60-64	73,91	64,29	64,98
65+	44,81	42,85	50,39
Jumlah	<b>67,85</b>	<b>69,58</b>	<b>73,60</b>

Sumber : BPS, (Agustus) data diolah

#### 2.4.1.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Dinamisnya pembangunan di sektor pendidikan, menyebabkan TPAK menurut tingkat pendidikan selama periode 2013-2015 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Selama periode tersebut, TPAK tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan tinggi, pada tahun 2013 TPAK sebesar 99,33 persen, kemudian pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 86,91 persen kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2015. Tingginya TPAK tingkat pendidikan ini dapat dimaklumi karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan merasa malu apabila hanya berdiam diri, mereka akan berusaha untuk bekerja agar status sosial di masyarakat menjadi lebih baik. TPAK terbesar kedua, terdapat pada tingkat pendidikan diploma dan cenderung menurun yakni dari 91,78 persen tahun 2013 menjadi 90,10 persen tahun 2015. TPAK terendah terdapat pada tingkat pendidikan SMTP yang langsung terkait dengan program pendidikan 9 tahun. TPAK



tersebut cenderung meningkat yakni dari 54,51 pada tahun 2013 menjadi 64,83 pada tahun 2015. Namun TPAK dengan tingkat pendidikan SD terlihat masih cukup tinggi, dan terus mengalami peningkatan yakni 68,68 tahun 2013 meningkat menjadi 74,73 pada tahun 2015. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian lulusan SD masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTP dan lulusan SD masih banyak yang memasuki pasar kerja, sehingga program pendidikan dasar 9 tahun sepenuhnya dapat memperlambat tambahan angkatan kerja.

Tabel 2.27. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2015 (%)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	68,68	70,93	74,73
SMTA	54,51	59,69	64,83
SMTA Umum	73,02	69,83	75,30
SMTA Kejuruan	68,41	78,18	78,23
Diploma	91,78	90,87	90,10
Universitas	99,33	86,91	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>67,85</b>	<b>69,58</b>	<b>73,60</b>

Sumber :BPS, (Agustus) data diolah

Tingkat pendidikan Maksimum SD TPAK-nya masih cukup tinggi dengan kecenderungan terus meningkat. Tahun 2012 TPAK tingkat pendidikan ini sebesar 70,62 persen, terus meningkat tahun 2013 menjadi 72,91 persen dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 75,65 persen. Trend TPAK yang terus meningkat pada tingkat pendidikan ini dikarenakan secara kualitas mereka tidak mempunyai kualifikasi pendidikan yang cukup untuk dapat bersaing di pasar kerja tetapi karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka untuk tetap aktif secara ekonomi apapun jenis pekerjaan yang didapatnya.

#### 2.4.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Pada periode 2013-2015, TPAK laki-laki cenderung fluktuatif dengan besaran yang cukup tinggi. Tahun 2013 TPAK laki-laki mencapai 87,57 persen, kemudian naik cukup turun menjadi sebesar 85,86 persen tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 88,9 persen. Tingginya TPAK laki-laki cukup beralasan dikarenakan kedudukan laki-laki



sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga mengharuskan mereka lebih aktif untuk mencari pekerjaan dibandingkan perempuan.

Tabel 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2015 (%)

JenisKelamin	2013	2014	2015
Laki-laki	87,57	85,86	88,9
Perempuan	47,02	52,64	57,72
<b>Jumlah</b>	<b>67,85</b>	<b>69,58</b>	<b>73,6</b>

Sumber :BPS, (Agustus) data diolah

TPAK perempuan pada periode yang sama lebih cenderung terus mengalami peningkatan meskipun dengan besaran TPAK jauh di bawah TPAK laki-laki. Tahun 2013 TPAK-nya sebesar 47,02 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 52,64 persen tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan cukup tinggi menjadi sebesar 57,72 persen. Rendahnya TPAK perempuan cukup bisa dipahami karena kodrat perempuan yang lebih diposisikan untuk mengurus anak dan rumah tangga. Namun, dengan adanya trend TPAK perempuan yang terus meningkat bisa diartikan juga bahwa perempuan perlahan-lahan mulai ikut aktif secara ekonomi dengan tujuan membantu perekonomian keluarga karena merasa penghasilan suaminya belum mencukupi kebutuhan keluarga seluruhnya. Ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan perempuan di Kabupaten Konawe Selatan tampaknya juga ikut meningkatkan TPAK perempuan dalam tiga tahun terakhir.



### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Tujuan otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol pengelolaan dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi pendanaan pemerintahan yang khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah sehingga kemandirian fiskal daerah semakin meningkat tiap tahunnya.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis kinerja keuangan daerah masa lalu pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja keuangan daerah di masa lalu sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut yang mencakup pelaksanaan APBD dan neraca daerah yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Struktur APBD Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Konawe Selatan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.



**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015**

No.	Uraian	2010 Realisasi	2011 Realisasi	2012 Realisasi	2013 Realisasi	2014 Realisasi	2015 Realisasi	Rata-rata Pertumbuhan
1	<b>PENDAPATAN</b>	510.718.412.808,15	580.653.906.140,00	665.029.243.235,00	793.487.278.860,00	865.566.864.169,00	1.055.300.506.172,00	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	11.848.680.000,00	12.562.810.617,00	18.035.018.429,00	25.760.478.124,00	45.766.897.223,00	43.77.671.471,00	
1.1.1	Pajak Daerah	990.112.154,00	1.774.371.975,00	3.052.194.232,00	3.979.986.300,00	11.179.152.941,00	8.032.817.085,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	3.414.398.556,00	4.330.318.674,00	4.604.818.895,00	8.350.584.443,00	10.319.388.713,00	2.277.440.822,00	
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.187.881.217,00	2.035.128.962,00	3.320.176.083,00	4.519.772.043,00	4.226.155.010,00	4.108.467.700,00	
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	4.849.358.102,00	4.422.991.006,00	7.057.829.219,00	8.910.135.338,00	20.042.200.559,00	29.358.945.864,00	
1.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	451.28.403.791,00	454.528.385.390,00	593.033.898.528,00	695.885.279.350,00	737.786.987.240,00	811.636.994.652,00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Hasil bukan pajak	32.808.802.991,00	35.142.660.390,00	44.307.811.528,00	59.251.701.350,00	50.022.571.240,00	51.918.623.652,00	
1.2.2	Dana alokasi umum	366.666.100.800,00	362.035.225.000,00	481.737.617.000,00	538.654.988.000,00	581.807.666.000,00	598.467.031.000,00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	51.853.500.000,00	57.350.500.000,00	66.988.470.000,00	97.978.590.000,00	105.956.750.000,00	161.251.340.000,00	
1.3	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	31.429.835.033,00	113.562.710.133,00	53.960.326.278,00	71.841.521.386,00	82.012.979.706,00	199.885.840.049,00	
1.3.1	Pendapatan hibah	1,071.736.000,00	1.500.000.000,00	0,00	105.000.000,00		10.000.000,00	
1.3.2	Dana darurat		1.000.000.000,00					
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari prov dan pemerintah daerah lainnya	4.930.487.313,00	4.360.254.227,00	5.778.857.580,00	11.264.682.036,00	13.609.860.706,00	15.990.941.049,00	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	22.080.218.012,00	104.469.097.560,00	44.475.787.000,00	52.791.604.000,00	62.868.119.000,00	177.997.135.000,00	
1.3.5	Bantuan keuangan dari Prov atau pemerintah daerah	3.190.364.000,00	2.072.564.000,00	3.411.293.650,00	7.646.385.350,00	5.535.000.000,00	5.887.764.000,00	
1.3.6	Pendapatan lainnya	157.029.029.708,00	160.794.346,00	294.388.048,00	33.850.000,00	0,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	469.473.773.047,00	575.163.977.589,00	647.393.223.082,00	757.065.040.356,00	920.167.180.936,00	1.003.732.921.399,00	
2.2	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	291.153.537.135,00	333.358.236.831,00	346.986.150.471,00	363.833.869.382,00	446.185.382.079,00	574.867.175.852,00	
2.2.1	Belanja pegawai	230.262.092.124,00	286.232.643.375,00	312.669.042.521,00	327.890.478.351,00	353.189.173.136,00	403.844.983.089,00	



2.2.2	Belanja hibah	27.747.217.400,00	18.534.659.000,00	500.000.000,00	170.000.000,00	5.600.000.000,00	30.368.400.000,00	
2.2.3	Belanja bantuan sosial	1.630.884.000,00	1.053.102.000,00	8.327.000.000,00	4.320.000.000,00	3.811.973.143,00	0,00	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan pemerintah desa	30.262.164.000,00	27.101.365.000,00	25.223.021.000,00	30.453.391.031,00	83.584.235.800,00	140.653.792.763,00	
2.2.5	Belanja tidak terduga	1.251.179.611,00	436.467.456,00	267.086.950,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
<b>2.3</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	178.320.235.912,00	241.805.740.758,00	300.407.072.611,00	393.231.170.974,00	473.981.798.857,00	428.865.745.547,00	
2.3.1	Belanja pegawai	13.596.839.690,00	13.030.640.250,00	21.827.941.534,00	24.343.303.052,00	20.742.375.000,00	15.977.806.728,00	
2.3.2	Belanja barang dan jasa	64.919.259.879,00	100.595.500.565,00	128.154.801.507,00	164.595.850.604,00	201.244.795.310,00	159.533.594.430,00	
2.3.3	Belanja modal	99.804.136.343,00	128.179.599.943,00	150.424.329.570,00	204.292.017.318,00	251.994.628.547,00	253.354.344.389,00	
	<b>SURPLUS/ ( DEFISIT )</b>	24.762.215.806,00	5.489.928.551,00	17.636.020.153,00	36.422.238.504,00	( 54.600.316.767,00 )	51.567.584.773,00	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	( 5.626.777.864,17 )	10.089.308.337,83	7.575.029.597,83	23.663.732.950,83	58.324.453.674,83	1.224.136.907,83	
	Penggunaan sisa lebih Perhitungan anggaran ( SILPA	( 5.626.777.864,17 )	10.089.308.337,83	7.575.029.597,83	23.663.732.950,83	58.324.453.674,83	1.224.136.907,83	
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00	8.000.157.291,00	1.500.000.000,00	1.685.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	
	Penyertaan modal ( investasi ) Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.685.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	
	Pembayaran pokok utang	3.000.000.000,00	6.000.157.291,00					
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>				( 58.400.971.454,83 )	( 1.224.136.907,83 )		
	Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan				( 58.400.971.454,83 )	( 1.224.136.907,83 )		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	( 8.626.777.864,17 )	2.089.151.046,83	6.075.028.597,83	21.978.732.950,83	55.824.453.674,83	924.136.907,83	
	<b>SILPA</b>	16.099.437.941,83	7.579.079.597,83	23.711.049.750,83	58.400.971.454,83	1.224.136.907,83	52.491.721.680,83	

Sumber : DPKAD Kab. Konawe Selatan, 2016



Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah, (belanja tidak langsung dan belanja langsung) merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai. Pengukuran kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Struktur pendapatan Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kemampuan Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian Daerah (%)
2010	11.441.750.029	494.199.988.853	2,32
2011	12.562.810.617	580.653.906.140	2,16
2012	18.035.018.429	665.029.243.235	2,71
2013	25.760.478.124	767.091.000.000	3,36
2014	45.876.446.163	865.676.413.109	5,30
2015	43.777.671.471	1.055.300.506.172	4,15

Sumber : DPKAD Konawe Selatan 2016, Data diolah



Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selama tahun anggaran 2010-2015 masih tergantung kepada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015 terhadap total realisasi pendapatan disajikan pada tabel 3.2

Persentase PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Konawe Selatan masih di bawah 6 persen yang menunjukkan ketergantungan pendapatan Kabupaten Konawe Selatan terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi. Komponen PAD Kabupaten Konawe Selatan berasal dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah, terdiri pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) perusahaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan penerimaan lain-lain yang sah.

## **2. Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus.

- a. Dana Bagi Hasil, dana dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib, pajak



orang pribadi dalam negeri dan PPh 21, dan bagi hasil PBB migas.

- b. Dana Alokasi Umum, dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja pegawai sebagai prioritas.
- c. Dana Alokasi Khusus, sama halnya dengan DAU, merupakan dana transfer dari pusat atas beberapa kegiatan yang sudah ditentukan pembedangannya.

### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lainnya yang sah.

#### **3.1.2 Neraca Daerah**

Pada tabel 3.6. ditampilkan neraca daerah kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masal Lalu**

Berbagai tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi Kabupaten Konawe Selatan selama tahun 2010–2015, tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional, khususnya kebijakan fiskal dan sektor real yang mempengaruhi dinamika kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, selama tahun 2010–2015 konsisten dengan tetap mendorong upaya meningkatkan investasi, menjaga stabilitas perekonomian daerah, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah dengan mempertajam sasaran belanja sesuai dengan RPJMD tahun 2010 - 2015. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan



demikian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010–2015, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan berada pada kisaran 6,65 persen sampai dengan 7,25 persen sudah tercapai. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan stabilitas ekonomi yang terjaga selama 5 tahun, pengangguran terbuka diharapkan pada dibawah level antara 5,0 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 11,50 – 10,0 persen pada tahun 2015.

### 3.2.1 Proporsi belanja kebutuhan Aparatur dan belanja Modal.

Proporsi belanja selama periode 2010 – 2015, diupayakan menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan non aparatur. Dikotomi belanja langsung dan tidak langsung tidak memberikan gambaran real komposisi belanja pada APBD, karena pada belanja langsung terdapat juga belanja pegawai dan begitu sebaliknya pada Belanja tidak langsung terdapat juga belanja Bantuan Keuangan yang berhubungan langsung dengan pencapaian target kerja pada tingkat Desa. Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, maka analisis proporsi belanja yang tepat adalah proporsi belanja pemenuhan aparatur sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1	Tahun 2012	349.359.504.189	648.893.223.082	<b>53,84</b>
2	Tahun 2013	367.259.123.782	758.750.040.356	<b>48,40</b>
3	Tahun 2014	398.942.166.469	922.667.180.936	<b>43,24</b>
4	Tahun 2015	387.016.827.242	1.006.232.921.399	<b>38,46</b>



Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2012 - 2015 menunjukkan *trend positif*, dimana proporsi belanja kebutuhan pemenuhan untuk aparatur yang semakin kecil dibanding total pengeluaran. Proporsi belanja pemenuhan aparatur tahun 2012 mencapai 53,84 persen dan tahun 2015 mencapai 38,46 persen. Trend positif ini diharapkan dapat berlanjut pada pengelolaan APBD periode 2016 - 2021, dengan dukungan kebijakan dan strategi pengelolaan APBD yang berpihak kepada belanja untuk kebutuhan publik

Sejalan dengan pemenuhan belanja aparatur, proporsi belanja modal terhadap total belanja terus meningkat bagi kebutuhan pembangunan dan kepentingan publik. Selama periode tahun 2010-2015, proporsi belanja modal terhadap total belanja menunjukkan trend positif khususnya pada tahun 2010 - 2014, yang mencapai 27,36 persen. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan proporsi belanja modal yang mencapai 25,24 persen. Pada tabel 3.4 berikut dapat dilihat proporsi belanja modal terhadap total belanja tahun 2010 - 2015.

**Tabel 3.4. Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015**

Tahun	Belanja Modal (Rp)		Total Belanja (Rp)	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)
	Target	Realisasi		
2010	112.014.190.716	99.804.136.343	<b>469.473.773.047</b>	21,26
2011	160.571.040.528	128.179.599.943	<b>575.163.977.589</b>	22,29
2012	168.458.256.742	150.424.329.570	<b>647.393.223.082</b>	23,24
2013	231.528.621.063	204.292.017.318	<b>757.065.040.356</b>	26,98
2014	288.542.762.726	251.787.579.197	<b>920.167.180.936</b>	27,36
2015	276.762.430.353	253.354.344.389	<b>1.003.732.921.399</b>	25,24

Sumber : Data diolah, 2016



### 3.2.2. Defisit Real Anggaran

Rata-rata defisit real anggaran Kabupaten Konawe Selatan selama tahun 2010 - 2014, mengalami fluktuasi seiring dinamika pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir, defisit anggaran terjadi bila realisasi jumlah pendapatan lebih kecil dibanding dengan realisasi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tabel 3.5 Rata-rata defisit real anggaran tahun 2010 - 2014 sebesar Rp. **16.365,326.515,-**.

Penurunan surplus anggaran dan terjadinya defisit anggaran disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar di bandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Peningkatan belanja daerah di dominasi oleh peningkatan belanja aparatur. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi dibandingkan untuk memberikan pelayanan public. Defisit anggaran juga merupakan indikasi adanya pemborosan APBD.



Tabel 3.5. Rata-Rata Defisit Real Anggaran Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Konawe Selatan

No	Uraian	2010 (Audited)	2011 (Audited)	2012 (Audited)	2013 (Audited)	2014 (Audited)	Rata-Rata Defisit Riil Anggaran (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah <b>Dikurangi</b>	494.199.988.853	580.653.906.140	665.029.242.633	793.487.278.860	865.566.864.169	
2	Belanja Daerah	469.473.673.047	575.163.977.589	647.393.223.082	757.065.040.356	920.167.180.936	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	8.000.157.291	1.500.000.000	1.685.000.000	2.500.000.000	
		<b>24.726.315.806</b>	<b>(2.510.228.740)</b>	<b>16.136.019.551</b>	<b>34.737.238.504</b>	<b>(57.100.316.767)</b>	<b>(16.365.326.515)</b>

Sumber : Data diolah, 2016.



Tabel 3.6. NERACA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010 - 2015

N0	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	<b>ASET LANCAR</b>						
	kas di kas daerah	14.025406.648,83	12.955.838.221,83	32.832.317.009,83	72.792.127.648,83	10.949.839.243,83	51.551.410.736,83
	Kas dibendahara						
	pengeluaran	7.749.479.277,00	2.058.820.553,00	2.142.390.559,00	6.873.214.768,00	4.234.650.890,00	5.318.823.402,00
	Kas dibendahara						
	penerimaan	149.105.000,00	24.150.000,00	69.712.000,00	785.823.500,00	0,00	72.786.540,00
	Piutang pajak daerah	130.355.000,00	255.409.615,00	244.963469,00	293.226.791,00	8.410.912.616,00	400.637.616,00
	Piutang retribusi daerah	123.342.500,00	140.467.500,00	145.567.500,00	174.517.500,00	213.692.500,00	199.180.000,00
	Piutang pendapatan Hasil						
	pengelolaan	1.104.934.785,00	1.429.220.600,00	4.988.530.391,00	2.999.378.086,00		
	Kekayaan daerah yang						
	dipisahkan	0,00	3.320.176.084,00	3.930.675.530,00	5.914703.331,00	4.108.467.701,00	3.960.035.607,00
	Piutang lainnya	19.886.544,71	10.312.544,71	224.625.000,00	320.291.077,00	1.222.752.800,00	892.284.735,00
	Persediaan	2.164.483.562,00	1.765.274.367,94	1.670.476.620,00	2.762.473.014,00	4.031.917.081,00	3.855.709.050,00
	Belanja dibayar dimuka	0,00	187.500.000,00	0,00	0,00		
	<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>25.466.993.317,54</b>	<b>22.147.169.486,48</b>			<b>29.137.765.475,49</b>	<b>76.531.540.739,45</b>
II	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	Investasi nonpermanen						
	Dana bergulir	224.625.000,00	224.625.000,00				
	Investasi permanen					17.813.872.914,90	18.113.872.914,90
	Penyertaan modal						
	pemerintah daerah	6.400.000.000,00	8.687.500.000,00			17.813.872.914,90	18.113.872.914,90



	Jumlah investasi jangka panjang	6.624625.000,00	8.912.125.000,00			17.813.872.914,90	18.113.872.914,90
III	<b>ASET TETAP</b>						
	Tanah	72.487.550.169,00	71.999.633.345,00	73.557.117.327,00	73.714.136.581,00	33.864.410.001,00	36.276.113.614,00
	Peralatan dan mesin	163.738.786.562,00	162.895.274.594,00	189.353.755.799,00	217.198.939.740,00	259.443.667.839,00	280.853.618.110,00
	Gedung dan bangunan	317.831.532.248,00	380.860.820.905,00	437.087.057.698,00	517.265.185.946,00	618.169.151.343,00	678.960.832.145,00
	Jalan, irigasi, dan jaringan	325.742.361.689,00	356.618.262.630,00	416.589.444.779,00	491.039.744.781,00	600.716.297.367,00	763.620.262.737,00
	Aset tetap lainnya	11.600.662.880,00	16.894.385.238,00			38.908.115.224,00	43.794.832.315,00
	Konstruksi dalam pengerjaan	34.270.822,00	16.263.434.700,00			47.349.262.517,00	53.568.479.364,00
	Akumulasi penyusutan	0,00	0,00			0,00	( 48,318.353.982,00 )
	Jumlah aset tetap	925.671.716.430,00	1.005.621.811.412,00			1.598.450.904.291,00	1.808.755.784.303,00
IV	<b>DANA CADANGAN</b>						
V	<b>ASET LAINNYA</b>						
	Tagihan tuntutan ganti rugi	0,00	0,00	1.623.808.365,00	1.522.692.000,00	973.084.800,00	973.084.800,00
	Tagihan tuntutan perbendaharaan	0,00	2.739.754.000,00	2.739.754.000,00	2.739.754.000,00	2.739.754.000,00	2.739.754.000,00
	Aset tak berwujud	948.987.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Aset lain-lain	1.303.135.000,00	69.371.465.358,00	82.468.840.808,00	88.266.164.303,00	95.976.141.258,00	101.980.996.614,00
	Jumlah aset lainnya	2.252.122.000,00	73.739.227.723,00			99.688.980.058,00	105.693.835.414,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	960.015.456.747,54	1.110.420.333.621,48	1.312.014.891.103,83	1.574.840.976.628,83	1.745.091.522.739,39	2.009.033.371,35
VI	<b>KEWAJIBAN</b>						
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
	Utang PFK	5.675.447.984,71	7.432.059.911,00	11.263.657.818,00	21.264.370.962,00	14.727.951.633,00	6.457.956.548,00
	Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		



	Utang jangka pendek lainnya	7.704.276.316,00	3.099.397.520,00	6.337.986.091,60	8.507.802.361,60	11.408.274.886,60	14.587.560.036,60
	Jumlah kewajiban jangka pendek	13.379.724.300,71	10.531.457.431,60			26.136.226.519,60	24.489.334.476,60
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Jumlah kewajiban</b>	13.379.724.300,71	10.531.457.431,60			26.136.226.519,60	24.489.334.476,60
VII	<b>EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR</b>						
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA )	16.099.437.941,83	7.579.079.597,83	23.711.049.750,83	58.400.971.454,83		
	Pendapatan yang ditangguhkan	149.105.000,00	27.669.266,00	69.712.000,00	785.823.500,00		
	Cadangan piutang	1.378.518.829,71	5.155.586.343,71	9.534.361.890,00	9.702.116.785,00		
	Cadangan persediaan cadangan belanja dibayar dimuka	2.164.483.562,00	1.765.274.367,94	1.670.476.620,00	2.762.473.014,00		
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	( 7.704.276.316,71 )	( 3.099.397.520,60 )				



VIII	Jumlah ekuitas dana lancar	12.087.269.016,83	11.615.712.054,88			
	<b>EKUITAS DAN INVESTASI</b>					
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka panjang	6.624.625.000,00	8.912.125.000,00	10.337.500.00,00	12.022.500.000,00	
	Diinvestasikan Dalam aset tetap	929.671.716.430,00	1.005.621.811.412,00	1.168.595.729.852,00	1.377.374.110.610,00	
	Diinvestasikan dalam aset lainnya	2.252.122.000,00	73.739.227.723,00	86.832.403.173,00	92.528.610.303,00	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran					
	Utang jangka pendek	0,00	0,00			
	Jumlah ekuitas dan investasi	934.548.463.430,00	1.088.273.164.135,00			
IX	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>					
	Diinvestasikan dalam dana cadangan	0,00	0,00			
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	946.635.732.446,83	1.099.888.876.189,88	1.312.014.891.103,00	1.574.840.976.628,83	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	960.015.456.747,54	1.110.420.333.621,48		2.009.095.033.371,35	1.745.091.522.739,39



### 3.3. ANALISIS KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 – 2021

Analisis kerangka pendanaan tahun 2016 – 2021 bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Kabupaten Konawe Selatan yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kerangka pendanaan dilaksanakan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 – 2021 dalam rangka membiayai program dan kegiatan pada RPJMD Kabupaten Konawe Selatan, melalui tahapan :

1. Menganalisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat sebagaimana tabel 3.8
2. Menganalisis Kapasitas Real Kemampuan Daerah sebagaimana tabel 3.9
3. Menganalisis Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tabel 3.10
4. Terakhir, mengalokasikan Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana tabel 3.11.



### 3.3.1. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2021.

Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Pada Rencana Anggaran 2016-2021 Kabupaten Konawe Selatan.

No	Uraian	2016 Raperda)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>455.557.556.785</b>	488.063.106.895	520.568.657.005	553.074.207.116	585.579.757.226	618.085.307.335,8
1	Belanja Gaji & Tunjangan	394.574.303.035	421.959.671.520	449.345.040.005	476.730.408.491	504.115.776.976	531.501.145.460,8
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil	-	-	-	-	-	-
5	<b>Bantuan Keu (ADD)</b>	60.983.253.750	78.442.562.395	83.263.343.690	88.084.124.985	92.904.906.280	97.725.687.575,3
		-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>42.096.236.235</b>	44.279.657.259	46.463.078.283	48.646.499.308	50.829.920.332	53.013.341.355,8
1	<b>Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis</b>	-	-	-	-	-	-
	a. Belanja Jasa Dokter/Tenga Spesialis lainnya	-	-	-	-	-	-
2	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan</b>	350.880.000	409.360.000	467.840.000	526.320.000	584.800.000	643.280.000,0
	a. Penyediaan Beasiswa Retrieval untuk Anak Putus Sekolah	-	-	-	-	-	-
	b. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak mampu	-	-	-	-	-	-



	c. Pemberian Beasiswa kepada masyarakat berprestasi	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	41.745.356.235	43.870.297.259	45.995.238.283	48.120.179.308	50.245.120.332	52.370.061.355,8
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	<b>Total A+B+C</b>	<b>497.653.793.020</b>	<b>532.342.764.154</b>	<b>567.031.735.289</b>	<b>601.720.706.423</b>	<b>636.409.677.557</b>	<b>671.098.648.692</b>

Sumber : Data Diolah, 2016

- **Proyeksi belanja tidak langsung tidak termasuk Dana Desa**



Analisis terhadap pengeluaran mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor dan sejenisnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis dan belanja sejenis lainnya.

Sesuai hasil analisis terhadap belanja wajib dan mengikat diperoleh rata-rata pertumbuhan untuk belanja Wajib dan Mengikat di Kabupaten Konawe Selatan selama tahun 2010 - 2015 adalah belanja tidak langsung yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta alokasi dana desa sebesar Rp. 32.505.550.110,2 (32,5 Milyar setiap tahun) atau tumbuh sebesar 1,27 persen dari total belanja gaji dan tunjangan ditambah alokasi dana desa. Sedangkan untuk belanja langsung yang terdiri atas honorarium tenaga dokter spesialis, tenaga medis lainnya, beasiswa pendidikan serta belanja Jasa Kantor mengalami pertumbuhan selama tahun 2010 - 2015 sebesar Rp. 2.183.421.024,2 atau tumbuh 0,82 persen setiap tahunnya. (Hasil Analisis Terlampir).

Berdasarkan hasil analisis 5 tahun sebelumnya, maka untuk kebutuhan indikatif belanja wajib dan mengikat selama 5 tahun ke depan tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut : Tahun 2016 sebesar Rp. 497.653.793.020, Tahun 2017 sebesar Rp. 532.342.764.154, Tahun 2018 sebesar Rp. 567.031.735.289, Tahun 2019 sebesar Rp. 601.720.706.423, Tahun 2020 sebesar Rp. 636.409.677.557 dan Tahun 2012 sebesar Rp. 671.098.648.692 atau total kebutuhan Indikatif belanja wajib dan



mengikat selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp. 3.506.257.325.135 (3,506 Triliun)



### 3.3.2. Analisis Kapasitas Real Kemampuan Daerah

Tabel 3.9. Kapasitas Real Kemampuan Daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.087.767.137.272	1.186.694.995.342	1.285.622.853.412	1.384.550.711.482	1.483.478.569.551	1.582.406.427.621
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	1.087.767.137.272	1.186.694.995.342	1.285.622.853.412	1.384.550.711.482	1.483.478.569.551	1.582.406.427.621
4	<i>Dikurangi</i> Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	497.653.793.020	532.342.764.154	567.031.735.289	601.720.706.423	636.409.677.557	671.098.648.692
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>590.113.344.252</b>	<b>654.352.231.188</b>	<b>718.591.118.123</b>	<b>782.830.005.059</b>	<b>847.068.891.994</b>	<b>911.307.778.930</b>



Sumber : Data diolah, 2016

- Untuk proyeksi pendapatan tahun 2016-2021 tidak termasuk dana desa.
- Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran diasumsikan 0

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Konawe Selatan untuk memenuhi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, dengan menggunakan tabel 3.10 sebagai berikut :



Tabel 3.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	590.113.344.252	654.352.231.188	718.591.118.123	782.830.005.059	847.068.891.994	911.307.778.930
II.a	Belanja Langsung	524.184.798.482	581.828.892.244	639.472.986.005	697.117.079.767	754.761.173.529	812.405.267.290
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	<b>Dikurangi</b>						
II.C	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	42.096.236.235	44.279.657.259	46.463.078.283	48.646.499.308	50.829.920.332	53.013.341.356
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0	0	0	0	0	0
II	<b>Total Rencana Pengeluaran prioritas I (II a + II b - II.c-II. D</b>	<b>482.088.562.247</b>	<b>537.549.234.985</b>	<b>593.009.907.722</b>	<b>648.470.580.460</b>	<b>703.931.253.197</b>	<b>759.391.925.935</b>
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I- II)	108.024.782.005	116.802.996.203	125.581.210.401	134.359.424.599	143.137.638.797	151.915.852.995
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	599.188.498.066	650.527.658.221	701.866.818.376	753.205.978.532	804.545.138.687	855.884.298.842
	<b>Dikurangi</b>						
III.b	Belanja tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	455.557.556.785	488.063.106.895	520.568.657.005	553.074.207.116	585.579.757.226	618.085.307.336
III	<b>Total rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)</b>	<b>143.630.941.281</b>	<b>162.464.551.326</b>	<b>181.298.161.371</b>	<b>200.131.771.416</b>	<b>218.965.381.461</b>	<b>237.798.991.506</b>
	Suprlus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	(35.606.159.276)	(45.661.555.123)	(55.716.950.970)	(65.772.346.817)	(75.827.742.664)	(85.883.138.511)

Sumber : Data diolah, 2016 \*Untuk Proyeksi Belanja tidak langsung tidak termasuk Dana Desa.



Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, akan dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

**Prioritas I :**

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan kesehatan. Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi memberikan dampak yang luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi Kabupaten Konawe Selatan. Disamping itu, prioritas I juga diperuntukan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh Prioritas I :

- a. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan (Pembangunan Jalan, Jembatan, Irigasi)
- b. Program Peningkatan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan/Kesehatan

**Prioritas II :**

Program prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Contoh Prioritas II :



- a. Program Penerapatan Teknologi Tepat Guna (BPMD)
- b. Program Peningkatan Kapasitas UKM/UMKM (Koperasi & UKM)

**Prioritas III :**

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : *tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga*. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan Kabupaten Konawe Selatan dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.11.

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 -2021

No	Jenis Dana	Alokasi											
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		%	Rp										
1	Prioritas I	81,69	482.088.562.247	82,15	537.549.234.985	82,52	593.009.907.722	82,84	648.470.580.460	83,10	703.931.253.197	83,33	759.391.925.935
2	Prioritas II	24,34	143.630.941.281	24,83	162.464.551.326	25,23	181.298.161.371	25,57	200.131.771.416	25,85	218.965.381.461	26,09	237.798.991.506
3	Prioritas III	-6,03	(35.606.159.276)	-6,98	(45.661.555.123)	-7,75	(55.716.950.970)	-8,40	(65.772.346.817)	-8,95	(75.827.742.664)	-9,42	(85.883.138.511)
	Total	100,00	590.113.344.252	100	654.352.231.188	100	718.591.118.123	100	782.830.005.059	100	847.068.891.994	100	911.307.778.930

Sumber : Data diolah, 2016



Pada Tabel 3.11. tentang Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah, berdasarkan hasil proyeksi terhadap besaran belanja tidak langsung dan belanja langsung selama tahun 2010 - 2015 diperoleh informasi bahwa kapasitas riil keuangan Kabupaten Konawe Selatan *tidak dapat membiayai sampai Prioritas III*, yang meliputi belanja tidak langsung seperti hibah, bantuan sosial dan belanja tidak langsung lainnya diluar gaji dan tunjangan. Oleh karena itu, kebijakan anggaran pada tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan pendapatan atau mengefisienkan belanja setiap tahunnya.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, III) bukan menunjukkan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal dalam menetapkan pagu program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (Prioritas I dan II), dan sisanya dialokasikan untuk persentase final prioritas III

### **3.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUTUP DEFISIT :**

1. Efisiensi Anggaran melalui efektivitas sasaran program dan kegiatan.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Kontrak Multiyears
4. Penerbitan Saham/Obligasi Daerah
5. Pinjaman Daerah/Utang
6. Lelang Aset / Privatisasi Aset

Bila pinjaman daerah sebagai opsi menutup defisit, dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan pinjaman
  - a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksiman 75 persen dari penerimaan PAD tahun sebelumnya
  - b. Debt service coverage ratio (**DSCR**) minimal 2,5
2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman



- a. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat
- b. Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas
3. Ketentuan yang menyangkut prosedur
  - a. Mendapat persetujuan dari DPRD
  - b. Dituangkan dalam kontrak

#### ***Obligasi Pemerintah Daerah***

adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat (pasal 22, 23 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005)

Identifikasi Proyeksi Pendapatan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan :

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi Indikator makro ekonomi (PDRB/Laju pertumbuhan, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
4. Kebijakan dibidang Keuangan Daerah



## BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

### 4.1. Permasalahan Pembangunan

#### 4.1.1. Bidang Pemerintahan

1. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik
2. Belum maksimalnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data secara online
3. Belum adanya pusat data terpadu Kab. Konawe Selatan yang terintegrasi dengan sistim informasi dari provinsi dan pusat
4. Sistim pengelolaan keuangan dan penganggaran daerah masih bersifat konvensional.
5. Penyerapan Anggaran yang lambat untuk selalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan DPRD
6. Kultur Birokrasi masih ditandai dengan subordinasi, tidak satu tindakan, satu kebijakan
7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya.
8. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, keterampilan dan spesifikasi.
9. Fasilitas untuk Aparatur masih terbatas
10. Pemberian Reward dan Punishment belum diterapkan.

#### 4.1.2. Bidang Fisik, Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
  - a. Konversi lahan hutan ke lahan pertanian dan lahan terbuka menyebabkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama atau daerah aliran sungai.
  - b. Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian yang berpotensi pada menurunnya tingkat produksi pertanian.
  - c. Menurunnya daya tampung dan daya dukung Lingkungan.
  - d. Perlu penataan dan pengelolaan tambang-tambang rakyat sehingga dampak lingkungan dapat dikendalikan.
  - e. Masih kurangnya RTH sesuai perda 19 Tahun 2013 (30 % dari Lahan Ber-HPL dan HGB)
2. Sumber Daya Air
  - a. Mayoritas daerah masih sangat rawan kekeringan
  - b. Sumber Air Minum dan Air Pertanian mulai terdegradasi
3. Aksesibilitas
  - a. Moda transportasi umum dalam daerah belum dikelola dengan baik
  - b. Terminal yang dibangun belum berfungsi sesuai yang diharapkan
  - c. Kualitas jalan kewenangan kabupaten masih sangat rendah
  - d. Masih kurang jalan alternatif sebagai penghubung antar wilayah dan kawasan



4. Energi dan Sumberdaya non Mineral
    - a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi
    - b. Masih terdapat desa yang belum masuk listrik
    - c. Masih rendahnya pemenuhan energi baru dan terbarukan misalnya bio gas, panas bumi dll
    - d. Pengelolaan sumber daya mineral yang masih belum menganut prinsip kelayakan lingkungan dan keberlanjutan.
    - e. Jaringan listrik PLN hanya untuk pemenuhan rumah tangga sehingga industri sulit berkembang
  5. Tata Ruang
    - a. Banyak aktivitas pembangunan belum berbasis tata ruang
    - b. Masih sering terjadinya konflik pemilikan lahan antara masyarakat, dan investor dan pemerintah.
  6. Komunikasi dan Informatika
    - a. Jaringan komunikasi masih menggandakan satelit (telkomsel, Indosat dan XL)
  7. Bencana Alam
    - a. Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe Selatan yang didukung oleh regulasi, kebijakan serta perencanaan dan penganggaran Penanggulangan Bencana yang memadai
- 4.1.3. Bidang Ekonomi dan Pengembangan
1. Investasi, Industri, dan Perdagangan
    - a. Investasi
      - 1) Pengembangan investasi kurang memperhatikan daya dukung lingkungan
      - 2) Nilai manfaat pengembangan investasi terhadap masyarakat masih rendah
    - b. Industri
      - 1) Belum optimalnya pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah
      - 2) Daya saing produk UMKM lokal belum baik dan kuat
      - 3) Infrastruktur pada sentra-sentra belum baik
      - 4) Penggunaan teknologi tepat guna belum optimal
      - 5) Sumber energi untuk industri masih sangat kurang
    - c. Perdagangan
      - 1) Akses pasar komoditas unggulan masih rendah
      - 2) Masih menjual bahan mentah
      - 3) Peran tengkulak masih cukup tinggi
  2. Ketahanan Pangan
    - a. Belum optimalnya diversifikasi pola pangan harapan
    - b. Ketersediaan cadangan pangan masih riskan diakibatkan tata niaga yang sulit dikendalikan
    - c. Masih ada daerah rawan pangan



- d. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum seperti harapan.
  - e. Sistem pengelolaan cadangan pangan belum berjalan dengan baik.
3. Pertanian
- a. Belum ada regulasi mengenai lahan pangan berkelanjutan
  - b. Alih fungsi lahan dari pertanian ke peruntukan lain tinggi.
  - c. Agribisnis pertanian yang di dukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
  - d. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
  - e. Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan
  - f. Sumber daya air pertanian makin kurang akibat rusaknya dan alih fungsi lahan kawasan penangkapan air dan daerah aliran sungai.
  - g. Masih terbatasnya penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura, sehingga pada saat tanam petani kesulitan benih.
  - h. Sering terjadinya kelangkaan pupuk di sentra-sentra pertanian.
  - i. Bantuan sarana produksi ke petani contoh handtraktor dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.
  - j. Masih terbatasnya fasilitas untuk Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya.
  - k. Jaringan Irigasi sudah banyak yang rusak.
4. Perikanan dan Kelautan
- a. Daerah tangkapan ikan semakin jauh keluar
  - b. Dukungan infrastruktur pada sentra perikanan masih kurang
  - c. Dukungan listrik pada sentra perikanan masih kurang
  - d. Budidaya perikanan asin dan tawar masih kurang
  - e. Belum adanya industry pengolahan perikanan yang representatif sebagai salah satu kawasan minapolitan
5. Kehutanan
- a. Semakin tingginya deforestasi
  - b. Belum optimalnya produksi hutan rakyat
  - c. Masih terjadi deforestasi hutan bakau
  - d. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal;
6. Koperasi dan UMKM
- a. Koperasi dan lembaga UMKM masih tergantung dengan bantuan pemerintah
  - b. Akses pasar produk UKM belum ada



- c. Kualitas SDM pengelola UKM masih rendah
- d. Akses modal yang masih kurang

#### 4.1.4. Bidang Sosial dan Budaya

1. Kependudukan dan Demografi
  - a. Laju pertumbuhan penduduk yang berada pada angka 5% keatas berpotensi pada deforestasi dan konversi lahan pertanian menjadi lahan bangun.
  - b. Angka Harapan Hidup yang meningkat berpotensi pada terdapatnya orang lanjut usia yang berpotensi sebagai PMKS
  - c. Jumlah penduduk Miskin mencapai 33.800 jiwa atau 11,60 % dibawah Garis Kemiskinan dari total penduduk pada tahun 2014. (GK = Rp. 175.544 Kapita/bulan) pada tahun 2014, dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp. 243.036 (Rp/Kap/Bulan) (Sumber : TNP2K)
  - d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mencapai 1,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai (P2) mencapai 0,39 pada tahun 2014. Sedangkan Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) di SULTRA 2.09 dan Keparahan Kemiskinan mencapai (P2) Prov. SULTRA mencapai 0,52 pada tahun 2014
  - e. Belum tersedianya Data Kemiskinan setiap Kecamatan dan Desa.
2. Pariwisata
  - a. Potensi cukup besar tapi belum menjadi prioritas utama pembangunan.
  - b. Belum memiliki branding daerah
  - c. Belum adanya produk unggulan PEL daerah yang menjadi ciri khas konawe selatan (cinderamata, minuman khas, makanan khas dll)
  - d. Masih rendahnya Infrastruktur penunjang pada objek wisata dan menuju tempat wisata
  - e. Jumlah anggaran untuk pariwisata masih kurang yang berdampak lambatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal.
3. Sosial
  - a. PMKS belum mendapat perhatian/Masih banyak PMKS di Konawe Selatan.
  - b. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial.
4. Kesehatan
  - a. Kuantitas, kualitas tenaga kesehatan rendah dan pemerataan tenaga kesehatan belum proporsional.
  - b. Belum adanya dokter spesialis sehingga masih sangat tergantung dengan dokter dari Kota Kendari dengan sistem sewa jasa.
  - c. Masih ada kasus gizi buruk
  - d. Sanitasi lingkungan permukiman belum tertata dengan baik
  - e. Belum seluruh masyarakat Konawe Selatan mendapat jaminan kesehatan.



5. Pendidikan
  - a. Masih terdapat guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4
  - b. Menuntaskan wajib pendidikan dasar 9 tahun
  - c. Fasilitas pendidikan belum maksimal yaitu laboratorium dan perpustakaan
  - d. Pemerataan Tenaga Guru belum proporsional
  - e. Masih adanya Gedung Sekolah yang bermasalah dengan aset contoh SD, SMP, SMA Angkasa yang berada Markas TNI AU
  - f. Pelaksanaan mutasi guru belum mempunyai SOP yang baku.
  - g. Data Inventasi Bangunan Sekolah yang rusak belum optimal conto di SD Lakomea Landono.
  - h. Masih adan Sekolah Dasar yang belum memilki Gedung contoh di Kecamatan Angata.
6. Kebudayaan
  - a. Kebudayaan belum mendapat penanganan yang serius
7. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja
  - a. Isu gender hanya sebagai idiom semata
8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
  - a. Belum ada kerjasama dengan universitas untuk pendampingan pengembangan teknologi tepat guna
9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a. Dampak MEA terhadap penyerapan tenaga kerja lokal menjadi riskan.
  - b. Belum maksimalnya mutu dan produktivitas tenaga kerja
  - c. Lahan transmigrasi sudah bersinggungan dengan pemanfaatan sektor lain
10. Agama
  - a. Masih terdapat potensi penyebaran aliran sesat dan menyesatkan yang dapat berdampak pada terjadinya konflik yang didasari oleh agama.

#### 4.2. Isu-Isu Pembangunan Konawe Selatan

##### 4.2.1. Grand Isu sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada angka 65,60 (2015) atau urutan ke-5 di Sulawesi Tenggara.
2. Perlunya penekanan angka kemiskinan, yang masih berada di sekitar 11,28 % dari total jumlah kepala keluarga.
3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 7,48%, masih berada pada urutan ke-8 di Sulawesi Tenggara.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar masyarakat seperti fasilitas :
  - a. ekonomi (*Pasar, Irigasi, Sanitasi, MCK*),
  - b. pendidikan (*SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMU/Sederajat, Guru*),
  - c. kesehatan (*Polindes, Puskesmas, Air Minum, Bidan, Dokter*),



- d. perumahan (*Bahan Bakar/Energi dan Listrik*) dan
- e. infrastruktur (*Jalan, Jembatan, Telekomunikasi*).
5. Perlunya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang profesional berbasis pada kompetensi dan kinerja.
6. Belum terwujudnya secara optimal pembangunan desa terpadu melalui pengembangan desa mandiri dan peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur desa.
7. Perlunya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal dalam upaya peningkatan daya saing daerah dan Investasi daerah
8. Perlunya peningkatan kualitas kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat pengusaha kecil, mikro dan menengah

#### 4.2.2. *Isu Strategis Konawe Selatan*

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu utama visi misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2016 - 2021, Isu Strategik sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Isu-isu strategis di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan 3 Aspek Pembangunan Tahun 2016-2021.

Aspek Pembangunan	Isu-Isu Strategis
Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendapatan per kapita masih rendah yang mencapai 2.1 juta per bulan</li><li>2. Nilai IPM masih di bawah standar Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 65,60 dan Sultra 68,07, salah satu penyumbangya adalah Angka Kematian Ibu dan Bayi.</li><li>3. Masih adanya kecamatan Rentan Pangan contoh Kecamatan Laonti</li></ol>
Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terdapat 118 Desa Tertinggal dan terdapat 219 Desa Berkembang.</li><li>2. Belum tercapainya Standardisasi Operasional Prosedur pemerintahan yang efektif dan efisien (Jumlah SOP masih kurang),</li><li>3. Belum menerapkan sistem informasi pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li><li>4. Belum adanya jaminan Pasar produk tanaman Pangan</li></ol>
Daya Saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Infrastruktur Masih Terbatas (Panjang Jalan Aspal 149,22 atau 14,45 % dari total panjang jalan)</li><li>2. Nilai tambah produk masih rendah (Kontribusi terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan 2,67 %)</li><li>3. Tingkat partisipasi angkatan Kerja masih rendah sebesar 69,58 %. (2014)</li></ol>



<p>Permendagri 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wilayah pesisir di Konawe Selatan khususnya disejumlah desa mengalami tekanan serta kerusakan infrastruktur dan pemukiman akibat gelombang tinggi dan naiknya permukaan air laut, banjir rob, kerusakan terumbu karang dan seringnya kajadian cuaca ekstrim sebagai dampak Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>) dari meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</li><li>2. Alih Fungsi Lahan Hutan dan Pertanian, berdampak ke Debit Air Sungai menurun</li><li>3. Sebagian Kecamatan berada pada Patahan Lasolo, Moramo, Kolono &amp; Laonti</li><li>4. Kerusakan Lahan/Lahan Kritis (Kebakaran Hutan Tahun 2014 : 425 Ha, Deforestasi 955 Ha)</li><li>5. Illegal Logging (Volume Kayu yang dicuri 75.232,97 Kubik dan Illegal Fishing (Tahun 2014 ; 26 Kasus)</li><li>6. Konflik Kepemilikan Lahan/Agraria (Investor, pemerintah (Ex. Perkantoran) dan Masyarakat)</li></ol>
---	---



## BAB IX

### INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator Kinerja Daerah pada prinsipnya merupakan indikator kinerja otonomi daerah, yang wajib ada didaerah meskipun indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan pada bab V sebelumnya, dan ditambah dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Millenium Development Goals serta Indikator Sustainable Development Goals (SDG'S) 2015-2030 yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan uraian makna pencapaian kinerja organisasi pemerintahan daerah tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1). terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.

Secara rinci penetapan indikator kinerja daerah tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 9.1. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PDRB (%)	7,20	7,20	7,35	7,45	7,65	7,80	7,80
2	Laju Inflasi (Point)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
3	PDRB Perkapita (Juta/Kapita/Tahun)	28,50	28,50	30,50	31,50	33,50	35,00	37,5
4	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	0	10	20	30	40	50	60
5	Jumlah Desa Berkembang (Desa)	215	215	220	230	240	250	260
6	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	116	106	91	71	51	31	11
7	Tingkat Kemiskinan (%)	13,40	13,00	12,50	11,90	10,70	10,00	9,50
8	Persentase Peningkatan Indeks Ketangguhan Daerah Terhadap Perubahan Iklim & Bencana (%)	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	60%



9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,52	7,55	7,70	7,90	8,00	8,25	9,00
10	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,77	69,77	69,80	69,85	69,95	70,00	70,10
11	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	2	3	3	4	5
12	Tingkat Kapabilitas APIP (Skala)	1	1	2	3	3	4	5
13	Persentase peningkatan desa yang memiliki infrastruktur dasar memadai (%)	0,00	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	83,00%
14	Persentase jumlah desa yang memiliki Aparatur terampil dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (%)	50,24%	55,00%	58,00%	62,00%	67,00%	70,00%	75,00%
15	Persentase desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produktif (%)	50,24%	55,00%	58,00%	62,00%	67,00%	70,00%	75,00%
16	Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%
17	Persentase peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/Ibu Rumah Tangga/PKK yang memiliki standar kualifikasi/kompetensi (%)	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%
18	Persentase siswa jenjang TK/RA/Penitipan Anak (%)	49,14	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00
19	Persentase penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (%)	96,26	97,50	98,50	99,50	100,00	100,00	100,00



20	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	99,31	99,50	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	99,89	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,78	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	99,89	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	78,81	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50
26	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,11	0,10	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
27	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,57	1,50	1,30	1,10	0,90	0,75	0,65
28	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	13,12	12,00	11,00	10,00	9,50	7,50	6,00
29	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
30	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,62	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,43	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	100,00



32	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	92,75	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00	100,00
33	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	99,16	99,30	99,50	99,70	99,90	100,00	100,00
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	82,80	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50
35	Persentase peningkatan Indeks Reformasi Dinas pendidikan & kebudayaan (%)	22,69	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
36	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82,74%	83,00%	86,00%	89,00%	92,00%	94%	95%
37	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Cakupan penemuan dan penangana penderita Penyakit TBC BTA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	Cakupan penemuan dan penangana penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	61,88	65%	70%	75%	80%	90%	100%
42	Cakupan kunjungan bayi (%)	82,20	83%	87%	90%	93%	96%	100%
43	Klasifikasi RSUD	C	C	C	C	C	C	C



		Perdana	Perdana	Perdana	Perdana	Madya	Madya	Purnama
44	Standar akreditasi RSUD							
45	Persentase Penanganan Sampah (%)	3,34	5%	10%	15%	20%	25%	30%
46	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	60,87	75%	80%	85%	90%	95%	100%
47	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dalam kondisi mantap (%)	31,61%	35%	37,50%	50,00%	55,00%	62,50%	65,00%
48	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	54,73	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%
49	Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	60,77%	65,00%	70,00%	75%	80%	85%	90%
50	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	11,67%	12,00%	17%	23,33%	35%	46,87%	58,33%
51	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
52	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
53	Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
54	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98,00%	98%	100%	100%	100%	100%	100%



55	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	38,00%	39%	40%	42%	45%	47%	50%
56	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	1,22%	1,15%	1,10%	1,05%	1,00%	0,80%	0,50%
57	Persentase Rumah Layak Huni (%)	35,00%	37,50%	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	52,50%
58	Persentase Peningkatan Izin yang sesuai dengan RTRW & turunannya (%)	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	65,00%	85,00%	100,00%
59	Rasio Jumlah Lapangan Olahraga dengan Jumlah Penduduk	0,00462	0,0093	0,0106	0,0152	0,0192	0,0232	0,0027
60	Persentase peningkatan nilai realisasi PMDN (%)	61,24%	70%	70%	70%	80%	85%	85%
61	Rasio Koperasi Aktif (%)	69,89%	77%	80%	85%	90%	95%	100%
62	Persentase Peningkatan UMKM Mandiri (%)	0,00%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
63	Cakupan Penertiban KTP (%)	79,13%	80%	83%	87%	91,00%	93,00%	95%
64	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%)	0,3932	40,00%	45%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%
65	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
66	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	73,60%	75%	77%	79%	81%	83%	85%



67	Regulasi Ketahanan Pangan/Perlindungan Lahan Pertanian	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
68	Jumlah Cadangan Pangan (Bulan)	3 bulan	3	4	5	6	7	8
69	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	0,70	75%	80%	85%	90%	95%	95%
70	Prevalensi peserta KB Aktif (%)	76,60%	80%	80%	85%	90%	95%	95%
71	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	41,41	45%	50%	55%	60%	65%	70%
72	Rasio Angkutan Darat dengan Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	7,14	8%	10%	15%	20%	30%	40%
73	Website Milik Pemerintah Daerah	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
74	Jumlah OPD yang telah memiliki Website SKPD	5 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	40 OPD
75	Jumlah Pameran/Expo per tahun	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
76	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
77	Penyelesaian izin lokasi (%)	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
78	Kegiatan pembinaan politik daerah	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg



79	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	26 Keg						
80	Sistem Informasi Manajemen Daerah	1 buah	1 buah	2 buah				
81	Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	3 OPD	5 OPD	20 OPD	30 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD
82	Persentase PKK Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	Persentase Posyandu Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
84	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	9 buah						
85	Rasio PMKS dibanding Jumlah Penduduk (%)	8,66%	8,66%	8,00%	7,50%	7,00%	6,50%	6%
86	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Kali						
87	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 buah						
88	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 buah						
89	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada						
90	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada						



91	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku (%)	75%	75%	85%	95%	100%	100%	100%
92	Rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	0,782	1.2	1.6	2	2,4	2,8	3,2
93	Persentase Peningkatan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana sebelum, saat dan setelah terjadi bencana (%)	0	5%	10%	20%	30%	40%	50%
94	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (Kecamatan)	5 Kec	5	7	9	11	12	14
95	Persentase peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu	87,18	-	-	10%	10%		12%
96	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Jumlah Operasi)	12	12	12	12	12	12	12
97	Persentase berkurangnya PEKAT (Penyakit Masyarakat)	70%	65%	50%	40%	30%	20%	7%
98	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2546,68	2546,68	2546,68	3374,84	4185,45	5800,84	6025
99	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	486	486	486	534	588	647	712
100	Persentase peningkatan hasil produksi pangan (%)	5%	5%	5%	7%	10%	13%	15%
101	Persentase luas hitan dan lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0%	2%	5%	10%	15%	20%	25%



102	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan (%)	50,00%	50,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0%
103	Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
104	Persentase pertumbuhan industri (%)	10,51	12,50%	16,50%	20,50%	25,00%	30,00%	35,00%
105	Persentase peningkatan ekspor (%)	0%	5,00%	10%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%
106	Jumlah lokasi bina dan KTM yang dikembangkan	Unit	5	5	5	5	5	5



## BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

### 5.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada tahap ketiga Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025. Konsistensi perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah mutlak di perlukan sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Selatan tahun 2005-2025 adalah : *Menuju Kabupaten Konawe Selatan Yang Maju, Damai Dan Sejahtera*. Guna mewujudkan Visi Kabupaten Konawe Selatan, maka ditetapkan misi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005 - 2025 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.
2. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik pemerintahan dan kemasyarakatan.
3. Meningkatkan kinerja ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektro dan komoditi unggulan, industry mikro, serta ekonomi/industry yang berbasis kerakyatan.
4. Memupuk sebuah masyarakat demokratis bermoral dan beretika yang berlandaskan hokum dengan berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.
5. Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi informasi serta sehat jasmani dan rohani.
6. Mengentaskan penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.
7. Menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dari KKN efektif dan efisien menuju pada pelaksanaan pemerintahan menuju pada pelaksanaan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*.
8. Mewujudkan pembangunan tata ruang wilayah dan pengembangan wilayah yang konsisten, terpadu serta sesuai dengan karakteristik wilayah.



9. Mewujudkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas sumber daya alam.

Berdasarkan visi dan misi RPJPD kabupaten Konawe Selatan diatas maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah periode ketiga Kabupaten Konawe Selatan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

**MENUJU KONAWE SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN AMANAH  
BERBASIS PERDESAAN TAHUN 2021**

Untuk memberikan pengertian yang lebih spesifik terhadap pernyataan visi tersebut maka perlu dibuat definisi operasional untuk setiap kata pada pernyataan visi tersebut. Adapun definisi operasional dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Konawe Selatan yang **SEJAHTERA** dimaknai sebagai Kabupaten Konawe Selatan dengan masyarakat yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya, termasuk perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, hak atas pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, berkurangnya angka kemiskinan absolut dan pengangguran serta semakin meningkatnya pendapatan rata-rata masyarakat.
- Konawe Selatan yang **UNGGUL** dimaknai sebagai Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif secara regional, nasional dan global yang ditandai oleh tingginya produktivitas sumberdaya manusia; berkembangnya ekonomi lokal, perdagangan dan jasa keuangan; tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap; terwujudnya tata pemerintahan yang efisien dan efektif.
- Konawe Selatan yang **AMANAH** dimaknai sebagai Kabupaten Konawe Selatan yang menjalankan pemerintahan untuk melaksanakan janji-janji politik yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang di susun berdasarkan aspek aspiratif kebutuhan masyarakat dan Konawe Selatan yang menerapkan prinsip-prinsip *anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* Sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Religius dalam pemerintahan dan kemasyarakatan.



- **BERBASIS PERDESAAN** dimaknai sebagai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dengan memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, peningkatan teknologi dan sistem informasi, peningkatan pengembangan ekonomi lokal sesuai potensi wilayah dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata dan kehutanan yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan berbasis komunitas dan penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim, untuk mewujudkan Desa Tangguh, Mandiri dan Sejahtera.

## 5.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Untuk mewujudkan visi Konawe Selatan 2016 - 2021, terdapat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat diukur dari capaian indikator sasaran, dimana juga telah ditetapkan target tahunannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih**

**Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**

**Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang Berkelanjutan**

**Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**

- **Misi Mewujudkan Tatalaksana Pemerintah Yang Baik Dan Bersih**, dimaknai sebagai upaya mewujudkan aparatur negara yang profesional, produktif, bertanggung jawab sehingga terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, adil, murah, transparan dan tidak diskriminatif



(pelayanan prima) yang dilandasi atas sistem pengawasan dan audit publik yang akuntabel. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan yaitu pemerintah negara, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- **Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, dimaknai sebagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar dengan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan kesehatan pada tingkat puskesmas dan jaringannya hingga tingkat Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu misi ini dimaknai sebagai peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dasar yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin di wilayah perdesaan baik melalui jalur formal maupun informal. Misi ini juga dimaknai sebagai peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
- **Misi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah yang Berkelanjutan**, Pencapaian Misi ini akan dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, penguatan kelembagaan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas ekonomi lokal dengan pengelolaan secara maksimal dan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainability*) sesuai potensi wilayah yang tersedia, peningkatan akses UKM dan permodalan bagi usaha produktif masyarakat, perlindungan masyarakat dan asset-aset penghidupan masyarakat dari risiko bencana dan dampak perubahan iklim, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai tambah produk PEL, peningkatan sistem informasi, serta memperkuat implementasi peraturan perundangan (*law enforcement*) untuk menjamin terpenuhinya hak-hak



dasar dan keamanan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat Konawe Selatan yang tangguh, mandiri dan sejahtera”.

- **Misi Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**, Ketahanan pangan akan tercapai jika 3 aspek utama terpenuhi yaitu: **aspek ketersediaan**, **aspek aksesibilitas (keterjangkauan)** dan **aspek konsumsi**. Aspek ketersediaan (*food availability*) akan dicapai melalui peningkatan produksi pangan dari berbagai sector (Tanaman Pangan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Hortikultura) dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi bahan pangan bagi petani, peternak dan nelayan, serta menjamin stabilitas ketersediaan pangan. Aspek aksesibilitas atau keterjangkauan (*food accessibility*) akan dicapai dengan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan antara lain melalui peningkatan akses transportasi, peningkatan infrastruktur pasar pangan lokal, dan stabilitas harga pangan di daerah. Aspek konsumsi (*food utilization*) ditekankan pada kualitas bahan pangan dan pemenuhan gizi seimbang. Untuk memenuhi hal ini akan dilakukan peningkatan diversifikasi atau penganekaragaman bahan pangan pokok yang didukung dengan peningkatan penyediaan protein hewani dari hasil ternak dan ikan. Untuk menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan, maka dalam proses peningkatan produksi, akses dan konsumsi pangan perlu dibarengi dengan konservasi sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan, karena eksploitasi sumberdaya alam secara tidak terkontrol justru akan menimbulkan kerawanan pangan di kemudian hari.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :



Tabel 5.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Mewujudkan Tatalaksana Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan Dasar, Derajat Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan
Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah yang Berkelanjutan.	1. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah 2. Meningkatkan nilai tambah produk Pengembangan Ekonomi Lokal 3. Meningkatkan Akses Pasar Produk PEL 4. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan risiko bencana.
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatkan produksi & produktivitas pangan (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan & Hortikultura) 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan 3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka matriks sasaran utama dan indikator sasaran utamanya disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : MENUJU KONAWE SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN AMANAH BERBASIS PERDESAAN TAHUN 2021.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif	1. Meningkatnya Pelayanan Publik	1. Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh OPD
		2. Meningkatnya Pelayanan Umum di Desa	2. Indeks Pelayanan Umum di Desa



		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		4. Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		5. Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	5. Opini Pengelolaan Keuangan WTP
		6. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	6. Tingkat Maturitas SPIP
			7. Level Kapabilitas APIP
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	2. Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan Dasar, Derajat Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan	7. Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan Dasar, Derajat Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan	8. Rata-rata lama sekolah (RLS)
			9. Harapan lama sekolah (HLS)
			10. Angka Harapan Hidup (AHH)
			11. Pengeluaran Perkapita
Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang berkelanjutan	3. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah	8. Meningkatnya Konektivitas antar kawasan perdesaan	12. Indeks Aksesibilitas Desa
		9. Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan	13. Indeks Infrastruktur Pembangunan Desa
	4. Meningkatkan nilai tambah produk PEL	10. Meningkatkan nilai tambah produk PEL	14. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB
	5. Meningkatkan Akses Pasar Produk PEL	11. Meningkatnya Akses Pasar Produk PEL	15. Share Komoditi Unggulan di pasar regional (termasuk Wisata & Budaya)
	6. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan risiko bencana	12. Meningkatnya ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan risiko bencana	16. Prosentase peningkatan indeks ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana



Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	7. Meningkatkan produksi & produktivitas pangan (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan & Hortikultura)	13. Meningkatkan produksi & produktivitas pangan (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan & Hortikultura)	17. Indeks Ketersediaan Pangan
	8. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	14. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	18. Indeks Kerawanan Pangan Daerah
	9. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi	15. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi	19. Neraca Bahan Makanan

Indikator merupakan variabel yang bisa membantu dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara agregat indikator target yang hendak dicapai oleh Konawe Selatan dalam kurun waktu lima tahun dari dampak pencapaian sasaran program (*outcome*) dalam mencapai visi dan misi jangka menengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Target pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	15	30	45	60	67	75
2	Indeks Pelayanan Umum Desa	Indeks	50,35	50,75	60,00	60,25	60,50	60,75
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks	69,10	69,30	69,50	69,70	70,00	70,20
4	Nilai LAKIP	Poin	C	CC	B	B	B	B
5	Opini Pengelolaan Keuangan	Opini/ Tahun	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



6	Tingkat Maturitas SPIP	Skala	1	2	2	3	4	5
7	Level Kapabilitas APIP	Skala	1	2	2	3	4	5
8	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,55	7,7	7,9	8	8,25	9
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,7	11,85	12	12,2	12,5	13
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,77	69,8	69,85	69,95	70	70,1
11	Pengeluaran Perkapita	Juta/ Kapita	8,4	8,5	8,6	8,8	9	9,3
12	Indeks Aksesibilitas Pembangunan Desa	Indeks	80,9	80,95	90	90,2	90,40	90,60
13	Indeks Infrastruktur Pembangunan Desa	Indeks	36,25	36,5	36,75	37	37,25	37,5
14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
15	Share Komoditi Unggulan di pasar regional (Sultra)							
	a. Komoditas Perkebunan	%	18,2	18,5	18,8	20,0	22,5	25,0
	b. Komoditas Perikanan	%	20,1	20,5	20,8	21,0	22,0	23,5
	c. Komoditas Tanaman Pangan & Hortikultura	%	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
	d. Komoditas Kehutanan	%	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0



	e. Pariwisata & Budaya	%	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5
16	Prosentase peningkatan indeks ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana	%	10	20	30	40	50	60
17	Indeks Ketersediaan Pangan (IKP)	Indeks	1,27	1,35	1,40	1,50	1,70	2,00
18	Indeks Kerawanan Pangan Daerah/ Indeks Aksesibilitas Pangan	Indeks	49	42	32	25	23	<20
19	Neraca Bahan Makanan/ Indeks Pemanfaatan Pangan	Indeks	2,92	3	3,2	3,4	3,7	3,9

#### 5.4 Keselarasan RPJMD 2016 - 2021 Konawe Selatan dengan RPJMD 2013 - 2018 Sulawesi Tenggara

Visi pembangunan Konawe Selatan tahun 2016-2021 yaitu *"Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul Dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2021"* selaras dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012-2018 yaitu *"Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing Tahun 2013-2018"*. Visi Kabupaten Konawe Selatan 2016 - 2021 dan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara menitik beratkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan yang didasarkan pada peningkatan keunggulan daerah yang berdaya saing. Pada sisi pernyataan misi, RPJMD Konawe Selatan dan RPJMD Sulawesi Tenggara mempunyai misi yang selaras yaitu menekankan pembangunan pada peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur kawasan, tata penguatan tatakelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan

Matrik hubungan antara RPJMD Konawe Selatan tahun 2016 - 2021 dengan Misi, Agenda serta Prioritas RPJMD 2012-2018 disajikan dalam tabel berikut ini:



**Tabel 5.4**  
**Hubungan antara Misi RPJMD 2016-2021 dengan Misi dan Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018**

Misi RPJMD Konseal	Misi RPJMD Sultra	Kebijakan RPJMD Sultra
<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan Tatalaksana Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	<b>Misi 3 :</b> Revitalisasi Pemerintahan Daerah	<b>Kebijakan 2 :</b> Revitalisasi Pemerintahan Daerah
<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	<b>Misi 1 :</b> Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<b>Kebijakan 1 :</b> Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
<b>Misi 3 :</b> Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah yang Berkelanjutan	<b>Misi 2 :</b> Pembangunan Ekonomi dan <b>Misi 5 :</b> Percepatan & Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan & Infrastruktur Dasar	<b>Kebijakan 3 :</b> Pembangunan Ekonomi <b>Kebijakan 4 :</b> Memantapkan Pembangunan Budaya Daerah <b>Kebijakan 5 :</b> Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis
<b>Misi 4 :</b> Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	<b>Misi 2 :</b> Pembangunan Ekonomi dan <b>Misi 5 :</b> Percepatan & Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan & Infrastruktur Dasar	<b>Kebijakan 3 :</b> Pembangunan Ekonomi <b>Kebijakan 5 :</b> Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis

### 5.5 Keselarasan RPJMD 2016-2021 Konawe Selatan dengan RPJMN 2014 - 2019

Visi pembangunan Konawe Selatan tahun 2016-2021 yaitu *"Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul Dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2021"* selaras dengan visi RPJMN tahun 2014-2019 yaitu *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Visi Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021 menitik beratkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan peningkatan SDM. RPJMD Konawe Selatan, mempunyai visi yang selaras dengan visi RPJMN 2014-2019 yaitu menekankan pembangunan pada peningkatan kualitas SDM untuk menopang kemandirian ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan.



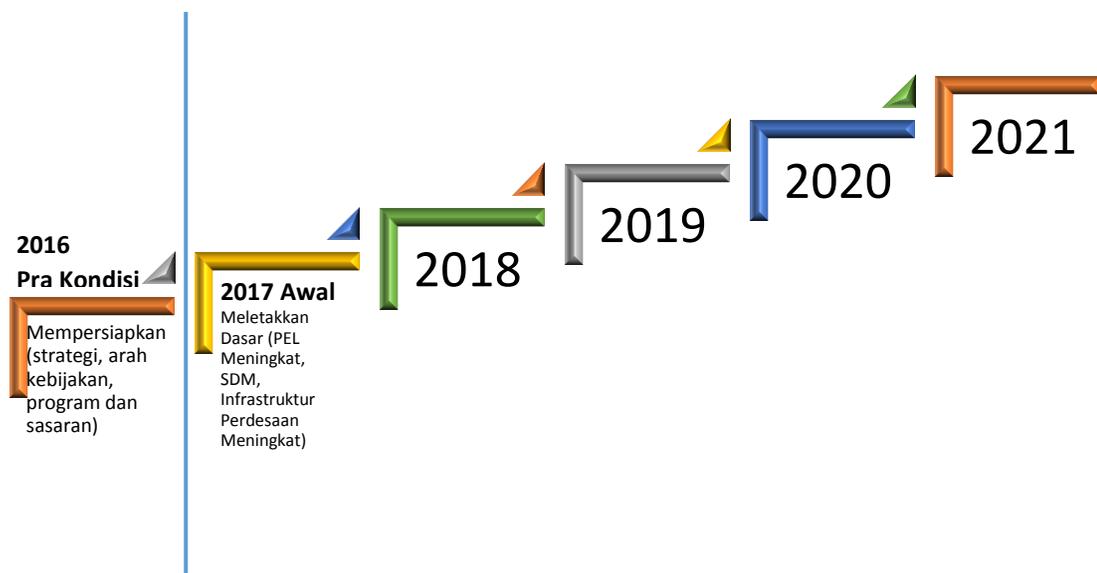
Matriks hubungan antara RPJMD 2016-2021 dengan Misi, Agenda serta Prioritas RPJMN 2014-2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.5**  
**Hubungan antara Misi RPJMD 2016-2021 dengan Misi, Agenda serta Prioritas RPJMN 2014-2019**

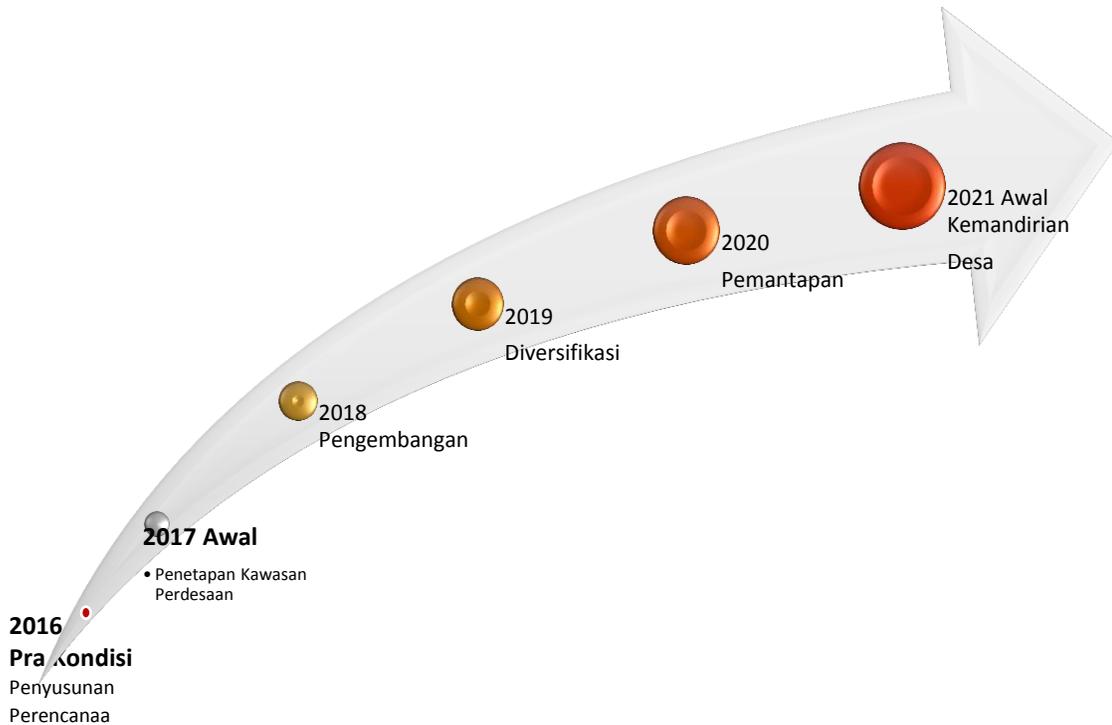
Misi RPJMD	Misi RPJMN	Agenda RPJMN	Prioritas RPJMN
Misi 1 : Mewujudkan Tatalaksana Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Misi 2 : Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.	<b>Agenda 2 :</b> Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;	<b>Prioritas/cita 2 :</b> Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	<b>Agenda 3 :</b> Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; <b>Agenda 5 :</b> Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;	<b>Prioritas/cita 5 :</b> Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah Yang Berkelanjutan	Misi 5 : Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing	<b>Agenda 6 :</b> Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; <b>Agenda 7 :</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;	<b>Prioritas/cita 7 :</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Misi 4 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	<b>Agenda 7 :</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;	<b>Prioritas/cita 3 :</b> Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

## BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 merupakan RPJMD tahap ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2005-2025 yang merupakan kesinambungan dari RPJMD periode-periode sebelumnya. **RPJMD Konawe Selatan tahun 2016-2021 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu (1) tahapan transisi, (2) tahapan awal, (3) tahapan pengembangan, (4) tahapan diversifikasi, (5) tahapan pematapan dan (6) tahapan awal pencapaian kemandirian.** Pada tahun 2016 merupakan tahun transisi sebagai implikasi dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang mana dokumen perencanaan tahun 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Konawe Selatan tahun 2016-2021.



Gambar 6.1 Tahapan Pembangunan RPJMD 2016-2021



Gambar 6.2 Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2016-2021

Adapun tahapan tahapan tersebut merupakan acuan sebagai tahapan untuk memberikan arah dan tujuan yang lebih fokus pada tiap tahunnya.

## 6.1. Analisis SWOT

### 6.1.1. Misi 1 : Mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

#### a. Analisis Faktor Internal

##### 1. Kekuatan

- Lokasi perkantoran yang terpusat pada satu kawasan terpusat
- Sarana dan Prasarana perkantoran sudah tersedia
- Jumlah PNS sudah banyak

##### 2. Kelemahan

- Kualitas SDM PNS masih rendah
- Struktur organisasi menggunakan pola maksimal
- Disiplin PNS masih rendah
- Sistem teknologi informasi belum digunakan dalam pengelolaan pembangunan

#### b. Analisis Faktor Eksternal

##### 1. Peluang

- Jaringan telekomunikasi tersedia
- Program diklat dan bintek yang diselenggarakan instansi pemerintah provinsi dan pusat banyak permintaan
- Potensi sumber anggaran lain belum dikelola dengan baik

Desa Maju Konsel Hebat



## 2. Ancaman

- Penilaian kinerja pemerintah oleh pemerintah yang lebih tinggi masih rendah.
- Pengawasan dari instansi yang berwenang makin ketat
- Pengawasan dari kelompok masyarakat dan masyarakat makin sering.



<b>INTERNAL</b>  <b>EKSTERNAL</b>	<b>KEKUATAN(Strenght)</b>	<b>KELEMAHAN (Weakness)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi perkantoran yang terpusat pada satu kawasan terpusat</li> <li>• Sarana dan Prasarana perkantoran sudah tersedia</li> <li>• Jumlah PNS sudah banyak</li> <li>• Perencanaan Pembangunan sudah berbasis Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas SDM PNS masih rendah</li> <li>• Struktur organisasi menggunakan pola maksimal</li> <li>• Disiplin PNS masih rendah</li> <li>• Sistim teknologi informasi belum digunakan dalam pengelolaan pembangunan</li> </ul>
<b>PELUANG (Oportunities)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan telekomunikasi tersedia</li> <li>• Program diklat dan bintek yang diselenggarakan instansi pemerintah provinsi dan pusat banyak permintaan</li> <li>• Potensi sumber anggaran lain belum terkelola dengan baik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sistim teknologi informasi dikawasan perkantoran yang terpadu</li> <li>2.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas SDM PNS dengan memanfaatkan program Diklat dan Bintek dari pemerintah Prov dan Pusat</li> <li>2. Mengoptimalkan sumber dana lain dalam pemberian penghargaan dan hukuman terhadap disiplin PNS</li> <li>3. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan</li> </ol>
<b>ANCAMAN (Threat)</b>	<b>Strategi S-A</b>	<b>Strategi W-A</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kinerja pemerintah oleh pemerintah yang lebih tinggi masih rendah.</li> <li>• Pengawasan dari instansi yang berwewenang makin ketat</li> <li>• Pengawasan dari kelompok masyarakat dan masyarakat makin sering.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perkatoran untuk meningkatkan kinerja pemerintah</li> <li>2. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis kinerja dalam menghadapi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari pihak luar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian Strukturtur Organisasi pemerintah untuk mengefisienkan penggunaan anggaran dan mengefektifkan pengawasan dari instansi lain dan masyarakat</li> </ol>



## 6.1.2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

### a. Analisis Faktor Internal

#### 1. Kekuatan

- Jumlah Sekolah sudah menyebar di setiap kecamatan dan desa/kelurahan
- Jumlah fasilitas kesehatan sudah menyebar hampir di semua kecamatan

#### 2. Kelemahan

- Penyebaran SDM pendidikan belum merata
- Jumlah SDM Kesehatan masih kurang
- Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan dasar masih kurang
- Kualitas Sarana dan Prasarana kesehatan masih kurang
- Balai latihan kerja belum digunakan sebagai sarana pelatihan masyarakat secara optimal

### b. Analisis Faktor Eksternal

#### 1. Peluang

- Program diklat dan bintek yang diselenggarakan instansi pemerintah provinsi dan pusat banyak permintaan
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

#### 2. Ancaman

- Penduduk miskin belum dapat menjangkau fasilitas pendidikan
- Penduduk miskin belum dapat menjangkau fasilitas kesehatan
- Budaya masyarakat yang lebih mempercayai dukun
- Jumlah perempuan usia produktif cukup besar



<p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EKSTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (Strength)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Sekolah sudah menyebar di setiap kecamatan dan desa/kelurahan</li> <li>• Jumlah fasilitas kesehatan sudah menyebar hampir di semua kecamatan</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (Weakness)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebaran SDM pendidikan belum merata</li> <li>• Jumlah SDM Kesehatan masih kurang</li> <li>• Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan dasar masih kurang</li> <li>• Kualitas Sarana dan Prasarana kesehatan masih kurang</li> <li>• Balai latihan kerja belum digunakan sebagai sarana pelatihan masyarakat secara optimal</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (Opportunities)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program diklat dan bintek yang diselenggarakan instansi pemerintah provinsi dan pusat banyak permintaan</li> <li>• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan jumlah sekolah dengan memanfaatkan UU No. 17 Tahun 2003</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dan Kesehatan dengan memanfaatkan program Diklat dan Bintek dari pemerintah Prov dan Pusat</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan memanfaatkan UU No. 17 Tahun 2003</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (Threat)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk miskin belum dapat menjangkau fasilitas pendidikan</li> <li>• Penduduk miskin belum dapat menjangkau fasilitas kesehatan</li> <li>• Budaya masyarakat yang lebih mempercayai dukun</li> <li>• Jumlah perempuan usia produktif cukup besar</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-A</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan fasilitas sekolah disetiap desa dan kecamatan dalam mengatasi akses pendudukan miskin terhadap pendidikan</li> <li>2. Mengoptimalkan fasilitas kesehatan disetiap kecamatan dalam mengatasi akses pendudukan miskin terhadap pendidikan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-A</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran BLK dalam meningkatkan kapasitas perempuan</li> </ol>



### 6.1.3. Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

#### a. Analisis Faktor Internal

##### 1. Kekuatan

- Sudah terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah dan Universitas/Lembaga yang konsen terhadap pengembangan produk yang berkualitas
- Potensi pengembangan ekonomi lokal sangat tersedia
- Potensi tenaga kerja cukup tersedia

##### 2. Kelemahan

- Belum adanya peraturan tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis potensi wilayah dan pembangunan desa terpadu
- Belum adanya Road Map pengembangan ekonomi lokal
- Penanganan pasar komoditas belum maksimal

#### b. Analisis Faktor Eksternal

##### 1. Peluang

- Posisi strategis Kab. Konawe Selatan yang menjadi rantai perekonomian yang menghubungkan Bombana, Raha dan Kolaka Timur
- Pengembangan kerjasama antar kawasan akan memberi nilai tambah investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi

##### 2. Ancaman

- Dampak Globalisasi
- Demokratisasi terkadang membawa perubahan yang tidak diharapkan
- Desentralisasi dan otonomi daerah yang terkadang mengganggu kelancaran pembangunan di daerah



<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (Strength)</b>	<b>KELEMAHAN (Weakness)</b>
<b>EKSTERNAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah dan Universitas/Lembaga yang konsen terhadap pengembangan produk yang berkualitas</li> <li>• Potensi pengembangan ekonomi lokal sangat tersedia</li> <li>• Potensi tenaga kerja cukup tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis potensi wilayah dan pembangunan desa terpadu</li> <li>• Belum adanya Road Map pengembangan ekonomi lokal</li> <li>• Penanganan pasar komoditas belum maksimal</li> </ul>
<b>PELUANG (Opportunities)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak Kab. Konawe Selatan yang strategis</li> <li>• Pengembangan kerjasama antar kawasan</li> <li>• Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kerjasama dengan Universitas dan lembaga lain dalam pengembangan ekonomi local untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>2. Mengoptimalkan potensi pengembangan ekonomi local dan jumlah tenaga kerja dengan memanfaatkan kerjasama antar kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan peraturan tentang penetapan kawasan perdesaan berbasis potensi wilayah dan pembangunan desa terpadu dengan memanfaatkan pengembangan kerjasama antar wilayah</li> <li>2. Menetapkan Road Map pengembangan ekonomi local berdasarkan letak Kab. Konawe Selatan yang strategis</li> <li>3. Mengoptimalkan Teknologi informasi untuk pengelolaan pasar komoditas</li> </ol>
<b>ANCAMAN (Threat)</b>	<b>Strategi S-A</b>	<b>Strategi W-A</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak Globalisasi</li> <li>• Demokratisasi terkadang membawa perubahan yang tidak diharapkan</li> <li>• Desentralisasi dan otonomi daerah yang terkadang mengganggu kelancaran pembangunan di daerah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kerjasama dengan Universitas dan lembaga lain dalam pengembangan ekonomi local untuk mengurangi dampak buruk globalisasi</li> <li>2. Mengoptimalkan potensi pengembangan ekonomi local untuk mengatasi dampak buruk desentralisasi dan otonomi daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan Peraturan Kawasan Perdesaan dan Road Map pengembangan ekonomi local untuk mengatasi efek samping globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dan otonomi daerah</li> </ol>



#### **6.1.4. Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**

##### **c. Analisis Faktor Internal**

###### **3. Kekuatan**

- Pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat
- Lahan pertanian cukup tersedia
- Daerah lumbung pangan prov Sultra
- Potensi lahan masih tersedia

###### **4. Kelemahan**

- Kualitas dan Kuantitas SDM Penyuluh masih rendah
- Sumber benih unggul berasal dari luar daerah
- Sarana dan prasarana pertanian masih kurang memadai
- Teknologi budidaya dan pasca panen masih rendah

##### **d. Analisis Faktor Eksternal**

###### **3. Peluang**

- Dana Tugas Pembantuan cukup besar
- Pasar produk pangan cukup tersedia
- Sudah dokumen kajian Lahan Pangan Berkelanjutan

###### **4. Ancaman**

- Alih fungsi lahan pertanian mulai meningkat
- Deforestasi mulai meningkat
- Jual beli lahan pertanian cukup tinggi



<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN(Strenght)</b>	<b>KELEMAHAN (Weakness)</b>
<b>EKSTERNAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat</li> <li>• Lahan pertanian cukup tersedia</li> <li>• Potensi lahan masih tersedia</li> <li>• Jenis pangan lokal (non beras) cukup tersedia</li> <li>• Sudah ada dokumen kajian Lahan Pangan Berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan Kuantitas SDM Penyuluh masih rendah</li> <li>• Sumber benih unggul baerasal dari luar daerah</li> <li>• Sarana dan prasarana pertanian masih kurang memadai</li> <li>• Teknologi budidaya dan pasca panen masih rendah</li> </ul>
<b>PELUANG (Oportunities)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Tugas Pembantuan cukup besar</li> <li>• Pasar produk pangan cukup tersedia</li> <li>• Kebutuhan akan pangan cukup besar</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian untuk memanfaatkan peluang pasar</li> <li>2. Mengoptimalkan pengelolaan lahan dan pencetakan lahan sawah dan tambak untuk memenuhi kebutuhan akan pangan yang besar.</li> <li>3. Mengoptimalkan jenis pangan local sebagai sumber pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Tenaga penyuluh pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan pangan</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan pangan</li> <li>3. Meningkatkan adopsi teknologi budidaya dan pasca panen untuk memenuhi produksi pangan yang berkualitas (revitalisasi penyuluhan)</li> </ol>
<b>ANCAMAN (Threat)</b>	<b>Strategi S-A</b>	<b>Strategi W-A</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan pertanian mulai meningkat</li> <li>• Deforestasi mulai meningkat</li> <li>• Jual beli lahan pertanian cukup tinggi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan dokumen kajian lahan pangan berkelanjutan menjadi perda lahan pangan berkelanjutan untuk mengurangi alih fungsi lahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran SDM penyuluh dalam menghambat alih fungsi lahan</li> </ol>



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada misi pembangunan tahun 2016-2021. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga memuat pokok-pokok arahan tentang penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (2013-2033). Strategi yang untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi, misi, serta sasaran dan tujuan tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1. Kebijakan dan Strategi Misi Mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

<b>Visi : Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul Dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2021</b>			
<b>Misi 1 : Mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif	1. Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan & Pelatihan
		Mengotimalkan Sarana & Prasarana Pemerintahan	Merevitalisasi Sarana & Prasarana Pemerintahan
		Mendorong Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemerintahan	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi sampai ke desa



		Mendorong kelembagaan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Rasionalisasi Struktur Organisasi Pemerintahan
		Mendorong terciptanya etos kerja Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan Kesejahteraan dan implementasi Reward dan Punishment	Peningkatan Kesejahteraan PNS Penerapan Reward dan Punishment PNS
		Memperluas dan meningkatkan cakupan pelayanan Umum di Perdesaan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan di Perdesaan
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Mendorong peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa
	2. Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Mendorong dan memperluas Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan yang terukur	Perencanaan Terintegrasi
			Melaksanakan Pengendalian Pembangunan
			Mempertajam Evaluasi secara periodik



	3. Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	Mempercepat Impelementasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang bersih dan akuntabel
			Memperkuat Sistem Pengelolaan keuangan yang transparan

Tabel 6.2. Kebijakan dan Strategi Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

<b>Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan Dasar, Derajat Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan	Meningkatnya Kualitas SDM melalui Pendidikan Dasar, Derajat Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Penyediaan dan Pemerataan SDM Pendidikan yang berkualitas
			Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
			Memperluas cakupan pembebasan biaya pendidikan bagi penduduk miskin



		Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Menyediakan fasilitas Kesehatan yang terjangkau
			Menyediakan tenaga Kesehatan yang berkualitas dan tersebar sampai pelosok perdesaan
			Memperluas cakupan pembebasan biaya Kesehatan Penduduk Miskin
		Menciptakan Kesempatan Kerja Melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja	Memperluas cakupan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
			Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Kesempatan Kerja
		Mengurangi beban hidup Keluarga Miskin	Mendorong dan Memperluas peningkatan pendapatan PMKS



Tabel 6.3. Kebijakan dan Strategi Misi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang Berkelanjutan.

<b>Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah	1. Meningkatnya Konektivitas antar kawasan perdesaan	Membuka akses dan isolasi kawasan perdesaan	1. Sinergitas Program Pembangunan Desa (seluruh stakeholder, Satu Perencanaan dan satu Pengendalian) 2. Membangun 15 ruas Jalan Strategis
	2.	Meningkatkan Keserasian antara RTRW dan Pemanfaatan Ruang/Lahan	Peningkatan keserasian ruang dan fasilitasi konflik pertanahan melalui pemanfaatan informasi dan data berbasis Spasial
	3. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Desa/Kawasan Perdesaan	Mendorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa	1. Sinergitas Program Pembangunan Desa (seluruh stakeholder, Satu Perencanaan dan satu Pengendalian) 2. Menetapkan lokasi Desa Sasaran Perdesaan berdasarkan potensi desa/kawasan Perdesaan
2. Meningkatkan nilai tambah produk Pengembangan	Meningkatnya nilai tambah produk PEL	Memperkuat kelembagaan dan Jaringan Pengembangan	Pembentukan lembaga Pengembangan Ekonomi Lokal



Ekonomi Lokal yang Ramah Lingkungan		Ekonomi Lokal	Daerah dan pembentukan lokal champions sehingga akses pasar dapat terbuka yang didukung oleh kualitas SDM yang baik (Learning By Doing)
		Mempercepat peningkatan mutu melalui standardisasi mutu (quality control) dengan lembaga Universitas atau lembaga standardisasi lainnya	Percepatan Peningkatan Mutu melalui pendampingan Quality Control oleh Universitas/ Lembaga lain meliputi pelatihan SDM dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
3. Meningkatkan Akses Pasar Produk PEL	Meningkatnya Akses Pasar Produk PEL	Memperluas akses pasar komoditas unggulan, Pariwisata dan Budaya	Pengembangan 5 Komoditas unggulan daerah (Perkebunan, Pertanian, Perikanan & Kelautan, Kehutanan dan Pertambangan
			Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan berbasis Potensi Lokal dengan mengedepankan Peran serta masyarakat



4. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan risiko bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan risiko bencana	Memperkuat sistim mitigasi dan adaptasi perubahan pengurangan risiko bencana didaerah melalui penguatan regulasi, kelembagaan, perencanaan & penganggaran.	Melaksanakan program-program ketangguhan desa terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
--	---	--	---

Tabel 6.4. Kebijakan dan Strategi Misi Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

<b>Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatkan produksi & produktivitas pangan (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan & Hortikultura)	1. Meningkatnya produksi & produktivitas pangan (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan & Hortikultura)	Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi pangan	Penyelesaian pengamanan lahan pangan berkelanjutan (menahan konversi lahan), Intensifikasi dan perluasan lahan pangan baru dan pencetakan tambak, infrastruktur produksi pangan
			Revitalisasi Penyuluh dan Penyuluhan
			Revitalasi sistim perbenihan
			Peningkatan nilai tambah produk pangan
			Peningkatan hasil pangan berkualitas, aman konsumsi (Pertanian organik)
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat	2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur



terhadap pangan	terhadap pangan	terhadap pangan	Aksesibilitas Pangan
			Penguatan Cadangan Pangan dan Stabilitas harga pangan
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi	Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dan gizi	Konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah
			konsumsi pangan lokal non beras



## BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kebijakan umum merupakan kumpulan dari beberapa strategi/arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk merumuskan program pembangunan daerah agar program di masing-masing strategi tepat dan inheren. Adapun program pembangunan daerah merupakan kumpulan program yang berhubungan langsung dengan *pencapaian sasaran* termasuk *program kepala daerah terpilih* yang akan didanai melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan. Penetapan kebijakan umum dan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

### 7.1 Kebijakan Umum Pembangunan Konawe Selatan

1. **Misi 1: Mewujudkan Tatalaksana Pemerintah Yang Baik Dan Bersih**  
**Pada misi 1 terdapat 9 Kebijakan Umum yaitu :**
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
  - b. Mengotimalkan Sarana & Prasarana Pemerintahan
  - c. Mendorong Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemerintahan
  - d. Mendorong kelembagaan Pemerintahan yang efektif dan efisien
  - e. Mendorong terciptanya etos kerja Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan kesejahteraan dan implementasi Reward dan Punishment
  - f. Memperluas dan meningkatkan Cakupan Pelayanan Umum di Perdesaan
  - g. Mendorong meningkatnya kinerja Pemerintahn Desa
  - h. Mendorong dan memperluas Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan yang terukur



- i. Mempercepat Implementasi Good Governance melalui Percepatan Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Misi 2. Peningkatan Kualitas SDM, pada Misi 2 terdapat 4 (empat) kebijakan umum, yaitu :**
  - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pendidikan
  - b. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
  - c. Menciptakan Kesempatan Kerja melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja
  - d. Mengurangi beban hidup Keluarga Miskin
- 3. Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Lokal Daerah yang Berkelanjutan, pada Misi 3 terdapat 7 (tujuh) kebijakan yaitu :**
  - a. Membuka akses dan isolasi kawasan perdesaan
  - b. Meningkatkan Keserasian antara RTRW dan Pemanfaatan Ruang/Lahan.
  - c. Mendorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa
  - d. Memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengembangan Ekonomi Lokal
  - e. Mempercepat peningkatan mutu melalui standardisasi mutu (quality control) dengan lembaga Universitas atau lembaga standardisasi lainnya.
  - f. Memperluas akses pasar komoditas unggulan, Pariwisata dan Budaya
  - g. Pengembangan program-program ketangguhan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
- 4. Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, pada Misi 4 terdapat 3 (tiga) Kebijakan Umum yaitu :**
  - a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi pangan
  - b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
  - c. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi

## 7.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan

Tabel 7.1. Kebijakan Umum Program Prioritas Pembangunan di Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021 Misi I

<b>Kebijakan Umum Misi 1</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	a. Program Pendidikan Kedinasan
	b. Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



2. Mengoptimalkan Sarana & Prasarana Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Mendorong Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemerintahan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Mendorong kelembagaan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Program Restrukturisasi Organisasi Tata Laksana Lembaga Pemerintahan
5. Mendorong terciptanya etos kerja Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan kesejahteraan dan implementasi Reward dan Punishment	a. Program Pelayanan & Pembinaan Anggota KORPRI
	b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Memperluas dan meningkatkan Cakupan Pelayanan Umum di Perdesaan	a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	c. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga di Perdesaan
7. Mendorong peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	a. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8. Mendorong dan memperluas Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan yang terukur	a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
	c. Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya
	d. Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik & Prasarana Wilayah serta SDA
9. Mempercepat Impelementasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Keterbukaan Informasi Publik	a. Program Pengelolaan Aset Daerah
	b. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	c. Program Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan
	d. Program Integrasi Perencanaan-



	Penganggaran
	e. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan berbasis on-line

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan di Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021 Misi II

Kebijakan Umum Misi 2	Program Prioritas Pembangunan
1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan	a. Program Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Pendidikan
	b. Program Pemerataan Tenaga Pendidikan
	c. Program Pendidikan Wajib Belajar Dasar 9 Tahun
	d. Program Beasiswa bagi Siswa Miskin
2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	a. Program Standardisasi pelayanan kesehatan
	b. Program peningkatan kualitas tenaga kesehatan
	c. Program Kesehatan Ibu dan Anak
	d. Program peningkatan ketersediaan pembiayaan, sarana & Prasarana kesehatan.
	e. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
	f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Menciptakan Kesempatan Kerja melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	c. Program Peningkatan Peran Perempuan dipedesaan
4. Mengurangi beban hidup Keluarga Miskin	d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Kesejahteraan Sosial lainnya

Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan di Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021 Misi III

Kebijakan Umum Misi 3	Program Prioritas Pembangunan
1. Membuka akses dan	a. Program Pembangunan Jalan &



Isolasi kawasan perdesaan	Jembatan
	b. Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan
	c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
2. Meningkatkan Keserasian antara RTRW dan Pemanfaatan Ruang/Lahan	a. Program Penataan Ruang
	b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	c. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
3. Mendorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa	a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	b. Program Pengembangan Perumahan
	c. Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	d. Program Fasilitasi & Stimulasi Sarana & Prasarana Perumahan di Perdesaan
4. Memperkuat kelembagaan dan Jaringan Pengembangan Ekonomi Lokal	a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
	b. Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
	d. Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
	e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	f. Program Penataan Struktur Industri
5. Mempercepat peningkatan mutu melalui standarisasi mutu dengan lembaga Universitas atau lembaga standarisasi lainnya	a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
	b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
6. Memperluas akses pasar komoditas unggulan, Pariwisata dan Budaya	a. Program Peningkatan dan Pengembangan Eskpor
	b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan



	c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	d. Program Pengembangan Destinasi Wisata
	e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
	f. Program Pengelolaan Kekayaan budaya
7. Pengembangan program-program ketangguhan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
	b. Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan

Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan di Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021 Misi IV

<b>Kebijakan Umum Misi 4</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>
1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi pangan	a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perikanan & Hortikultura
	b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	c. Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak
	d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	f. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
	g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
	h. Program Pengembangan Perbenihan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/Perkebunan/Hortikultura
	i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan
j. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	



	k. Program Pengembangan Pertanian Organik
	l. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	m. Program Rehabilitasi Hutan & Lahan
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	a. Program peningkatan Ketahanan Pangan
	b. Program Stabilitas Cadangan Pangan
	c. Program Stabilitasi Harga Pangan
3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi	a. Program Diversifikasi Pangan bergizi dan berimbang
	b. Program Pengembangan Pangan Lokal



Tabel 7.5

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

1. Misi I : Mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

No	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja (Impact)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan SDM Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan & Pelatihan	Persentase Kenaikan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di setiap OPD	10%	75 %	Program Pendidikan Kedinasan	Penunjang	Badan Kepegawaian & Diklat
							Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur	Penunjang	Badan Kepegawaian & Diklat
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang	Seluruh OPD
		Mengotimalkan Sarana & Prasarana Pemerintahan	Revitalisasi Sarana & Prasarana Pemerintahan				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penunjang	Seluruh OPD
		Mendorong Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemerintahan	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi sampai ke desa				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Wajib Non Pelayanan Dasar	Seluruh OPD
	Mendorong kelembagaan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Rasionalisasi Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	Program Penataan Kelembagaan & disiplin Aparatur	Penunjang	Sekretariat Daerah				



		Mendorong terciptanya etos kerja Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan penghasilan dan implementasi Reward dan Punishment	Pemberian Tambahan Penghasilan PNS				Program Pelayanan & Pembinaan Anggota Korpri	Penunjang	Sekretariat Korpri
			Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Phunishment</i> PNS				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penunjang	Seluruh OPD
	Meningkatnya Pelayanan Umum di Desa	Memperluas dan meningkatkan cakupan pelayanan Umum di Perdesaan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan di Perdesaan	Indeks Pelayanan Umum Desa	50,30	60,75	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Wajib Non Pelayanan Dasar	BPMD
							Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga di Perdesaan	Wajib Non Pelayanan Dasar	Kantor Pemuda & Olahraga
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Mendorong meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50,07	70,20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Wajib Non Pelayanan Dasar	BPMD
							Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Kepegawaian & Diklat



2	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Mendorong dan memperluas Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan serta yang terukur	Perencanaan Terintegrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari 32,67 (C, Kurang) menjadi 70,00 (B, Baik)	C	B	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	BAPPEDA
			Melaksanakan Pengendalian Pembangunan				Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	Penunjang	BAPPEDA
			Mempertajam Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Secara Periodik				Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Penunjang	BAPPEDA
							Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik & Prasarana serta SDA	Penunjang	BAPPEDA
3	Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah	Mempercepat Impelementasi Tata Kelola Pemerintahan melalui keterbukaan Informasi publik	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang bersih dan akuntabel	Opini Pengelolaan Keuangan WTP setiap tahun	WDP	WTP	Program Pengelolaan Asset Daerah	Penunjang	DPKAD
			Memperkuat Sistem Pengelolaan keuangan yang transparan				Program Peningkatan & Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang	DPKAD
							Program Peningkatan Kompetensi	Penunjang	DPKAD



							Penelola Keuangan		
							Program Integrasi Perencanaan-Penganggaran	Penunjang	BAPPEDA
							Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan berbasis on-line	Penunjang	DPKAD
	Meningkatnya SPIP		Memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	1	5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan KDH	Penunjang	Seluruh OPD
				Level Kapasitas APIP	1	5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan	Penunjang	Inspektorat Daerah



## 2. Misi II. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja (Impact)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
4	Meningkatnya Kualitas SDM melalui Pendidikan Dasar, Derajat Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Pendidikan	Penyediaan dan Pemerataan Pendidikan yang berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah	7,52	9,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
							Program Pemerataan Tenaga Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah	11,65	13,00	Program Pendidikan Wajib Belajar Dasar 9 Tahun	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
							Program Beasiswa Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Menyediakan fasilitas Kesehatan yang terjangkau	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,77	70,10	Program Standardisasi pelayanan kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan & RSUD
							Program peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan & RSUD
			Menyediakan tenaga Kesehatan yang berkualitas dan tersebar sampai pelosok perdesaan				Program Peningkatan	Wajib Pelayanan	RSUD



**Perda Nomor 6 Tahun 2016**  
**RPJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021**

			Kesehatan Penduduk Miskin				Kesehatan Ibu dan Anak	Dasar	
							Program Peningkatan Ketersediaan Pembiayaan, Sarana & Prasarana Kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan & RSUD
							Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan
							Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan
							Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan
		Menciptakan Kesempatan Kerja melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja (Sisi SDM)	Memperluas cakupan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Pengeluaran Per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)	8,375	9,30	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
			Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Kesempatan Kerja				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
							Program Pemberdayaan Peran Perempuan di	Wajib Non Pelayanan Dasar	BPMD



		Mengurangi beban hidup Keluarga Miskin	Mendorong dan Memperluas peningkatan pendapatan PMKS				Perdesaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Kesejahteraan Sosial lainnya	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Sosial
--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--------------

### Misi III. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang Berkelanjutan

No	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja (Impact)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Meningkatnya konektivitas antar kawasan perdesaan	Membuka akses dan isolasi Kawasan perdesaan	1.Sinergitas Program Pembangunan Desa (seluruh stakeholder, Satu Perencanaan dan satu Pengendalian) 2. Membangun 15 ruas Jalan Strategis	Indeks Aksesibilitas Pembangunan Desa	80,88	90,60	Program Pembangunan Jalan & Jembatan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas PU & Tata Ruang
							Progarm Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan & Informasi
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	Penunjang	Bappeda
		Program Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar				Dinas PU & Tata Ruang		
		Meningkatkan Keserasian antara RTRW dan	Peningkatan Informasi dan Data keruangan yang						



**Perda Nomor 6 Tahun 2016  
RPJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021**

		Pemanfaatan Ruang/Lahan	berbasis Spasial				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas PU & Tata Ruang
							Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Wajib Non Pelayanan Dasar	SETDA & Kecamatan
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Desa/Kawasan Perdesaan	Mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal dasa	1.Sinergitas Program Pembangunan Desa (seluruh stakeholder, Satu Perencanaan dan satu Pengendalian) 2. Menetapkan lokasi Desa Sasaran Perdesaan berdasarkan potensi desa/kawasan Perdesaan	Indeks Infrastruktur Pembangunan Desa	36,15	37,50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Dinas PU dan Tata Ruang
							Program Pengembangan Perumahan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas PU dan Tata Ruang
							Program Pembinaan & pengembangan Bidang Ketenagalsitrikan	Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pertambangan & Energi
6	Meningkatnya nilai tambah produk PEL	Memperkuat kelembagaan dan Jaringan Pengembangan Ekonomi Lokal	Pembentukan lembaga Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	2,75	4,00	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Koperasi & UMKM



			pembentukan lokal champions sehingga akses pasar dapat terbuka yang didukung oleh kualitas SDM yang baik (Learning By Doing) Mendorong terbentuknya regulasi dan kelembagaan Pengembangan Ekonomi Lokal				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Wajib Pelayanan Dasar	Non	Dinas Koperasi & UMKM
							Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Wajib Pelayanan Dasar	Non	Dinas Koperasi & UMKM
							Program Pengembangan Industri Kecil & menengah	Pilihan		Dinas Perindustrian & Perdagangan
							Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Wajib Pelayanan Dasar	Non	Dinas Koperasi & UMKM
							Program Penataan Struktur Industri	Pilihan		Dinas Perindustrian & Perdagangan
		Mempercepat peningkatan mutu melalui standardisasi mutu	Peningkatan mutu melalui standardisasi mutu (quality control) dengan lembaga				Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Pilihan		Dinas Perkebunan & Hortikultura



		(quality control) dengan lembaga Universitas atau lembaga standarisasi lainnya	Universitas atau lembaga standarisasi lainnya meliputi pelatihan SDM dan Penerapan Teknologi Tepat Guna				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM/PEL	Pilihan	Dinas Perindustrian & Perdagangan
7	Meningkatnya Akses Pasar Produk PEL	Memperluas akses pasar komoditas unggulan, Pariwisata dan Budaya	Pengembangan 5 Komoditas unggulan daerah (Perkebunan, Pertanian, Perikanan & Kelautan, Pariwisata, Kehutanan	Share Komoditi Unggulan di Pasar Regional Sultra a. Komoditas Perkebunan b. Komoditas Tanaman Pangan & Hortikultura c. Komoditas Perikanan d. Komoditas Kehutanan	17,95	25,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pilihan	Dinas Perindustrian & Perdagangan
					19,00	26,00	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pilihan	Dinas Pertanian & Dinas Perkebunan
					19,95	23,50			
					34,00	40,00	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan
			N/A	17,50	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pilihan	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif			Pilihan	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif			
		Program Pengelolaan Kekayaan			Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan			



	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan risiko bencana	Memperkuat sistim mitigasi dan adaptasi perubahan pengurangan risiko bencana didaerah melalui penguatan regulasi, kelembagaan, perencanaan & penganggaran.	Melaksanakan program-program ketangguhan desa terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Prosentase Peningkatan Indeks ketangguhan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana di Konawe Selatan	N/A	60	Budaya	Wajib Non Pelayanan Dasar	BPBD, Dinas Pertanian, DKP, Dinas PU & Tata Ruang, BLHKP
							Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan	Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Kehutanan,
							-		

**Misi IV : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**

No	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja (Impact)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
8	Meningkatnya produksi & produktivitas pangan (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan & Hortikultura)	Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi pangan	Penyelesaian pengamanan lahan pangan berkelanjutan (menahan konversi lahan), Intensifikasi dan perluasan lahan pangan baru dan pencetakan tambak, infrastruktur produksi pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	1,27	2,00	Program Peningkatan Produksi Pertanian, dan hortikultura	Pilihan	Pertanian dan Perkebunan
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan
							Program Pencegahan & penanggulangan penyakit ternak	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan



**Perda Nomor 6 Tahun 2016**  
**RPJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021**

						Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pilihan	Dinas Kelautan & Perikanan
						Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam pendayagunaan Sumber Daya Laut	Pilihan	Dinas Kelautan & Perikanan
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Hortikultura	Pilihan	Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan
						Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pilihan	Dinas Kelautan & Perikanan
						Program Pengembangan Pertanian Organik	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan & Dinas Perkebunan & Hortikultura



							Program Perlindungan & Konservasi SDA	Pilihan	Dinas Kehutanan & Badan Lingkungan Hidup
			Revitalisasi Penyuluh dan Penyuluhan				Program Rehabilitasi Hutan & Lahan	Pilihan	Dinas Kehutanan
			revitalasi sistim perbenihan				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	Pilihan	BP4K
			Peningkatan hasil pangan berkualitas, aman konsumsi (Pertanian organik)				Program Pengembangan Perbenihan	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Perkebunan & Hortikultura dan Dinas kelautan & Perikanan
							Program Pengembangan Pertanian Organik	Pilihan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Perkebunan & Hortikultura dan Dinas kelautan & Perikanan
9	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Aksesibilitas Pangan	Indeks Kerawanan Pangan Daerah/Indeks Aksesibilitas Pangan = 49 ( Tidak Terjangkau)	49	< 20	Program peningkatan Ketahanan Pangan	Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Pertanian & Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan
			Penguatan Cadangan Pangan dan Stabilitas harga pangan				Program Stabilitas Cadangan Pangan	Wajib Non Pelayanan Dasar	Dinas Pertanian & Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan



**Perda Nomor 6 Tahun 2016**  
**RPJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021**

							Program Stabilitas Harga Pangan	Wajib Pelayanan Dasar	Non	Dinas Pertanian & Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan	
10	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dan gizi	Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi	Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi a. konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah b. konsumsi pangan lokal non beras	Neraca Makanan/Indeks Pemanfaatan (2,92= Gizi Baik)	Bahan Pangan	2,92	3,75	Program Diversifikasi Pangan bergizi dan berimbang	Wajib Pelayanan Dasar	Non	Badan Ketahanan Pangan
							Program Pengembangan Pangan Lokal	Wajib Pelayanan Dasar	Non	Badan Ketahanan Pangan	



## BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas merupakan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian target indikator Kinerja Utama Kepala daerah dengan menerapkan prinsip “uang mengikuti Program” (*Money Follow Program*) terutama yang mendukung kebijakan pusat yang disinkronkan dengan visi misi RPJMD Konawe Selatan 2016 - 2021. Pengalokasian pendanaan program prioritas harus berhubungan langsung dengan *kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar* dan memiliki *kepentingan* dan *nilai manfaat yang tinggi*, memberikan *dampak luas* pada masyarakat dengan *daya ungkit* yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah.

Adapun program pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 - 2021 diklasifikasi kedalam 3 Prioritas sebagai berikut program prioritas diklasifikasi secara garis besar :

Prioritas I (Dedicated Bupati/Wabup, sesuai Visi & Misi Kepala Daerah + Standar Pelayanan Minimal)	<b>87 Program</b>
Prioritas II (Layanan SKPD + Penunjang Pemerintahan)	341 Program
Prioritas III (Program Hibah & Bansos)	Disesuaikan dengan Kapasitas Fiskal Daerah

Dari ke tiga prioritas program pembangunan tersebut diatas diterjemahkan kedalam program-program yang akan di ampu oleh SKPD teknis untuk berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan disajikan pada tabel 8.1.



## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 - 2021 maka ditetapkan Kebijakan Umum sebagai perencanaan menengah yang menjadi landasan bagi tahap pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Selatan dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2014 - 2019.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 ini ditambahkan dengan rencana program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD Kabupaten Konawe Selatan berakhir. Hal tersebut untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa berikutnya.

Pelaksanaan program transisi tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan program pelayanan umum pemerintahan, program peningkatan pendidikan, kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan ekonomi masyarakat guna menumbuhkembangkan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempertahankan capaian ketahanan pangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan, yaitu penguatan stakeholders pelaku melalui stimulasi dan fasilitasi, berkaitan dengan usaha pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menjadi sebuah fakta bukan hanya sebagai dokumen, maka diharapkan setiap pemangku



kepentingan dengan sadar dapat memanfaatkan dokumen RPJMD ini untuk bahan evaluasi keberhasilan pembangunan dalam lima tahun sekaligus mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya RPJMD Kabupaten Konawe Selatan ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Untuk Implementasi RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan diwajibkan menjadikan RPJMD ini sebagai pedoman dan acuan penyusunan program dan bagi lembaga non pemerintah serta kelompok/organisasi masyarakat dan dunia usaha diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyusunan program/kegiatannya masing-masing.
- b. Untuk Konsistensi pencapaian visi, misi, strategi, program/kegiatan, setiap OPD Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban menyusun Renstra (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah untuk masing-masing Renstra OPD.
- c. Untuk mencapai suatu pelaksanaan yang terarah, terpadu, efisien dan efektif dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan, OPD Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis OPD serta dalam Implementasinya pada RKPD setiap tahunnya dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



- d. Untuk percepatan penyerapan anggaran OPD Pengampu mengikuti Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan yang baru.

Untuk mengantisipasi transisi antara RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010-2015 hingga selesainya Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 diperdakan, maka dapat menggunakan RPJMD periode sebelumnya hingga selesainya RPJMD terkini, begitu pula halnya untuk masa transisi RPJMD 2016-2021 ke RPJMD 2021-2026, maka RKPD tahun 2021 berpedoman ke RPJMD 2016-2021, sampai diperdakannya RPJMD 2021-2026.

### **10.3. Rekomendasi**

- a. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 dilaksanakan setelah Penetapan Peraturan Daerah RPJMD.
- b. Dalam rangka mengimplementasikan sasaran, kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMD ini, maka akan dilaksanakan penyesuain struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
- c. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-2021 akan disosialisasikan mulai dari level masyarakat, pemerintah Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Republik Indonesia, serta seluruh elemen masyarakat lainnya, dalam periode akhir tahun 2016.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PDRB (%)	7.20	7.20	7.35	7.45	7.65	7.80	7.80
2	Laju Inflasi (Point)	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27
3	<b>PDRB Perkapita (Juta/Kapita/Tahun)</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>30.50</b>	<b>31.50</b>	<b>33.50</b>	<b>35.00</b>	<b>37.5</b>
4	<b>Jumlah Desa Mandiri (Desa)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
5	<b>Jumlah Desa Berkembang (Desa)</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>260</b>
6	<b>Jumlah Desa Tertinggal (Desa)</b>	<b>116</b>	<b>106</b>	<b>91</b>	<b>71</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>11</b>
7	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	<b>13.40</b>	<b>13.00</b>	<b>12.50</b>	<b>11.90</b>	<b>10.70</b>	<b>10.00</b>	<b>9.50</b>
8	Persentase Peningkatan Indeks Ketangguhan Daerah Terhadap Perubahan Iklim & Bencana (%)	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	60%
9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.52	7.55	7.70	7.90	8.00	8.25	9.00
10	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.77	69.77	69.60	69.85	69.95	70.00	70.10
11	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	2	2	3	4	5

12	Tingkat Kapabilitas APIP (Skala)	1	1	2	2	3	4	5
13	Persentase peningkatan desa yang memiliki infrastruktur dasar memadai (%)	0.00	10.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	83.00%
14	Persentase jumlah desa yang memiliki Aparatur terampil dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar (%)	50.24%	55.00%	58.00%	62.00%	67.00%	70.00%	75.00%
15	Persentase desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produktif (%)	50.24%	55.00%	58.00%	62.00%	67.00%	70.00%	75.00%
16	Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%)	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%
17	Persentase peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/Ibu Rumah Tangga/PKK yang memiliki standar kualifikasi/kompetensi (%)	10.00%	15.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%
18	Persentase siswa jenjang TK/RA/Penitipan Anak (%)	49.14	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50	65.00
19	Persentase penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (%)	96.26	97.50	98.50	99.50	100.00	100.00	100.00
20	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	99.31	99.50	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	99.89	99.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.78	99.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	99.89	99.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00





53	Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
54	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98.00%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	38.00%	39%	40%	42%	45%	47%	50%
56	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	1.22%	1.15%	1.10%	1.05%	1.00%	0.80%	0.50%
57	Persentase Rumah Layak Huni (%)	35.00%	37.50%	42.50%	45.00%	47.50%	50.00%	52.50%
58	Persentase Peningkatan Izin yang sesuai dengan RTRW & turunannya (%)	0.00%	10.00%	30.00%	50.00%	65.00%	85.00%	100.00%
59	Rasio Jumlah Lapangan Olahraga dengan Jumlah Penduduk	0.00462	0.0093	0.0106	0.0152	0.0192	0.0232	0.0027
60	Persentase peningkatan nilai realisasi PMDN (%)	61.24%	70%	70%	70%	80%	85%	85%
61	Rasio Koperasi Aktif (%)	69.89%	77%	80%	85%	90%	95%	100%
62	Persentase Peningkatan UMKM Mandiri (%)	0.00%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
63	Cakupan Penertiban KTP (%)	79.13%	80%	83%	87%	91.00%	93.00%	95%
64	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%)	0.3932	40.00%	45%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%
65	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
66	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	73.60%	75%	77%	79%	81%	83%	85%

67	Regulasi Ketahanan Pangan/Perlindungan Lahan Pertanian	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
68	Jumlah Cadangan Pangan (Bulan)	3 bulan	3	4	5	6	7	8
69	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	0.70	75%	80%	85%	90%	95%	95%
70	Prevalensi peserta KB Aktif (%)	76.60%	80%	80%	85%	90%	95%	95%
71	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	41.41	45%	50%	55%	60%	65%	70%
72	Rasio Angkutan Darat dengan Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	7.14	8%	10%	15%	20%	30%	40%
73	Website Milik Pemerintah Daerah	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
74	Jumlah OPD yang telah memiliki Website SKPD	5 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	40 OPD
75	Jumlah Pameran/Expo per tahun	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
76	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
77	Penyelesaian izin lokasi (%)	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
78	Kegiatan pembinaan politik daerah	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg
79	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	26 Keg	26 Keg	26 Keg	26 Keg	26 Keg	26 Keg	26 Keg
80	Sistem Informasi Manajemen Daerah	1 buah	1 buah	2 buah				

81	Jumlah OPD Melaksanakan Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	3 OPD	5 OPD	20 OPD	30 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD
82	Persentase PKK Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
83	Persentase Posyandu Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
84	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	9 buah						
85	Rasio PMKS dibanding Jumlah Penduduk (%)	8.66%	8.66%	8.00%	7.50%	7.00%	6.50%	6%
86	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Kali						
87	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 buah						
88	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 buah						
89	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada						
90	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada						
91	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku (%)	75%	75%	85%	95%	100%	100%	100%
92	Rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	0.782	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2

93	Persentase Peningkatan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana sebelum, saat dan setelah terjadi bencana (%)	0	5%	10%	20%	30%	40%	50%
94	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (Kecamatan)	5 Kec	5	7	9	11	12	14
95	Persentase peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu	87.18	-	-	10%	10%		12%
96	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Jumlah Operasi)	12	12	12	12	12	12	12
97	Persentase berkurangnya PEKAT (Penyakit Masyarakat)	70%	65%	50%	40%	30%	20%	7%
98	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2546.68	2546.68	2546.68	3374.84	4185.45	5800.84	6025
99	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	486	486	486	534	588	647	712
100	Persentase peningkatan hasil produksi pangan (%)	5%	5%	5%	7%	10%	13%	15%
101	Persentase luas hitan dan lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0%	2%	5%	10%	15%	20%	25%
102	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan (%)	50.00%	50.00%	40.00%	30.00%	20.00%	10.00%	0%
103	Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
104	Persentase pertumbuhan industri (%)	10.51	12.50%	16.50%	20.50%	25.00%	30.00%	35.00%
105	Persentase peningkatan ekspor (%)	0%	5.00%	10%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%
106	Jumlah lokasi bina dan KTM yang dikembangkan	Unit	5	5	5	5	5	5



### Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	<b>Urusan Wajib</b>																	
A	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>																	
A.1.	<b>Pendidikan</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	3,253,391	100%	3,253,391	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,500,000	100%	4,500,000	100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1 Paket	1 Paket	1,000,000	1 Paket	1,000,000	1 Paket	884,740	1 Paket	Dinas Pendidikan & kebudayaan							
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	60,000	50%	60,000	60%	60,000	70%	60,000	80%	60,000	90%	60,000	100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja tinggi (%)	15%	20%	282,223	30%	282,223	40%	282,223	50%	282,223	60%	282,223	70%	282,223	80%	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	50%	100%	175,000	100%	147,180	100%	147,180	100%	147,180	100%	147,180	100%	147,180	100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah layanan yang berbasis on-line (Paket)	1 Paket	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Pendidikan & kebudayaan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peningkatan anak usia dini yang mengikuti pendidikan (%)	49.14	55%	1,000,000	60%	1,000,000	65%	1,200,000	70%	1,400,000	75%	1,600,000	80%	1,800,000	80%	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
9	Program Pendidikan Wajib Belajar Dasar 9 Tahun	Persentase Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan :			35,000,000		35,000,000		37,500,000		40,000,000		42,500,000		45,000,000		Dinas Pendidikan & kebudayaan	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	87,8% (SD)	90%		92%		94%		96%		98%		100%		100%		Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36	89,7% (SMP)	90%		92%		94%		96%		98%		100%		100%		Dinas Pendidikan & kebudayaan
			52,6% (IP.3.1)	60%		63%		66%		69%		72%		75%		75%	Dinas Pendidikan & kebudayaan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	43,6% (IP 3.2)	55%		60%		66%		69%		72%		75%		75%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	44,5% (SD)	55%		60%		66%		69%		72%		75%		75%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			62,8% (SMP)	65%		68%		70%		72%		75%		80%		80%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	66,4% (IP 5.1)	70%		72%		74%		76%		78%		80%		80%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			79,4% (IP.5.2)	83%		85%		87%		90%		92%		95%		95%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	30.80%	40%		42%		44%		46%		48%		50%		50%	Dinas Pendidikan & kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	43% (IP-7.1)	50%		52%		54%		56%		58%		60%		60%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			20,9% (IP-7.2)	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	59% (IP-8.1)	65%		70%		75%		80%		85%		95%		95%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			41% (IP-8.2)	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	33.30%	40%		45%		50%		55%		60%		6%		6%	Dinas Pendidikan & kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	43.30%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	94.90%	97%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Di setiap ka/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	45.10%	50%		55%		60%		65%		75%		80%		80%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	41,1% (SD)	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			10,3% (SMP)	20%		40%		60%		80%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	52,5% (IP-51.1)	60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			44,5% (IP-15.2)	55%		60%		65%		70%		75%		85%		85%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	80,5% (IP-16.1)	85%		87%		90%		93%		96%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			38,5% (IP-16.2)	45%		50%		55%		60%		65%		70%		70%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	12.50%	30%		40%		50%		60%		70%		80%		80%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	6,47% (IP-18.1)	15%		20%		25%		30%		35%		40%		40%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			10,34% (IP-18.2)	15%		20%		25%		30%		35%		40%		40%	
			41,4% (IP-18.3)	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			41% (IP-8.4)	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%	
		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	30,8% (IP-19.1 (SD))	40%		45%		50%		55%		60%		65%		65%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			17,1% (IP-19.2)	25%		30%		35%		40%		45%		50%		50%	
			27,6% (IP-19.1 (SMP))	35%		40%		45%		50%		55%		60%		60%	
			23,1% (IP-19.2)	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang	85,8% (IP-22.1 (SD))	90%		93%		95%		98%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan
			98,4% (IP-22.2)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	81,2% (IP-22.1 (SMP))	85%		87%		89%		92%		94%		96%		96%	& kebudayaan
			100% (IP-22.2)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100% (IP 23 Sekolah)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			100% (IP 23 Kabupaten)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100% (IP 25-1)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			100% (IP 25-2)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester	100% (IP 26-1)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			100% (IP 26-2)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% (IP 27-1)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
			100% (IP 27-2)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			100% (IP 27-3)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
10	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APM Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK) (%)	75.56	78.81	3,000,000	83	2,000,000	85	3,000,000	87	3,000,000	90	3,000,000	93	3,000,000	95	Dinas Pendidikan & kebudayaan
11	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (%)	94.15%	96.00%	450,000	97.00%	386,219	98.00%	450,000	99.00%	500,000	100%	550,000	100%	750,000	100%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV (%)	62.94%	65%	2,086,485	70%	2,086,485	75%	2,500,000	80%	3,000,000	85%	3,500,000	90%	4,000,000	90%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Peningkatan Indeks Reformasi Dinas Pendidikan (%)	22.69%		150,000	30%	80,000	40%	200,000	50%	300,000	60%	400,000	70%	500,000	70%	Dinas Pendidikan & kebudayaan
14	Program Beasiswa Pendidikan	Jumlah siswa/mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang menerima beasiswa (Orang)	153	200	1,500,000	200	1,500,000	200	1,500,000	300	2,250,000	400	2,500,000	500	3,500,000	500	Dinas Pendidikan & kebudayaan
A2	<b>Kesehatan</b>																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	1,046,895	100%	1,046,895	100%	1,046,895	100%	1,046,895	100%	1,046,895	100%	1,046,895	100%	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	1,210,117	1 Paket	750,000	1 Paket	Dinas Kesehatan								
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	100,000	30%	100,000	40%	120,000	50%	140,000	60%	160,000	70%	180,000	70%	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	50,000	50%	50,000	60%	50,000	70%	50,000	80%	50,000	90%	50,000	100%	Dinas Kesehatan
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	253,282	100%	253,282	100%	253,282	100%	253,282	100%	253,282	100%	253,282	100%	Dinas Kesehatan
20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	Dinas Kesehatan
21	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	60,000	2	60,000	3	70,000	4	80,000	5	90,000	5	Dinas Kesehatan
22	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan pembekalan kesehatan (Paket)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan Desa Sehat (%)	51,03 % (138 Desa)	51,03 % (138 Desa)	21,470,555	55.00%	21,470,555	60.00%	22,500,000	70.00%	24,000,000	80%	25,000,000	90%	26,000,000	90%	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana Kesehatan yang memiliki kemampuan tanggap darurat tingkat 1		1	500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	2	2,000,000	6%	Dinas Kesehatan
24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				675,000		675,000		725,000		775,000		825,000		1,100,000	100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit :															Dinas Kesehatan
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (rasio)	2.05	2.05	100,000	<2	100,000	<2	100,000	<2	100,000	<2	100,000	<2	150,000	<2	
		b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita (%)	25.54%	30%	150,000	45%	150,000	65%	150,000	75%	150,000	85%	150,000	100%	200,000	100%	
		c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (%)	69.29%	70%	200,000	75%	200,000	80%	200,000	85%	200,000	92%	200,000	100%	250,000	100%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		d. Penderita DBD yang Ditangani (%)	100%	100%	150,000	100%	150,000	100%	200,000	100%	250,000	100%	300,000	100%	350,000	100%	
		e. Penemuan Penderita Diare (%)	90%	90%	75,000	92%	75,000	94%	75,000	96%	75,000	98%	75,000	100%	150,000	100%	
25	Program Peningkatan Ketersediaan Pembiayaan, Sarana & Prasarana Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	61.88%	65%	9,000,000	70%	10,000,000	75%	11,000,000	80%	12,000,000	90%	13,000,000	100%	14,000,000	100%	Dinas Kesehatan
26	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0	1	2,000,000	2	3,000,000	3	4,500,000	4	6,000,000	5	7,500,000	6	9,000,000	6	Dinas Kesehatan
27	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82.74%	83%	6,000,000	86%	6,100,000	89%	7,500,000	92%	8,500,000	94%	9,500,000	95%	10,000,000	95%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. (%)	73.19%	75.00%		80.00%		85.00%		90.00%		95.00%		95.00%		95.00%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)	59.00%	65%		70%		75%		80%		90%		95%		95%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan Ibu Nifas (%)	81.87%	82%		86%		89%		93%		97%		100%		100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	32.47%	33%		45%		60%		75%		85%		100%		100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi (%)	82.20%	83%		87%		90%		93%		96%		100%		100%	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	84.38%	85%		87%		90%		93%		97%		100%		100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan anak balita (%)	56.50%	57%		65%		70%		80%		90%		95%		95%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan
	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>																
28	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	3,168,800	100%	3,168,800	100%	3,168,800	100%	3,168,800	100%	3,168,800	100%	3,168,800	100%	RSUD
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	40%	45%	60,000	50%	100,000	60%	120,000	70%	140,000	80%	160,000	90%	180,000	100%	RSUD
30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1	137,600	1	137,600	1	137,600	1	300,000	1	500,000	1	700,000	1	RSUD
31	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	50%	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	RSUD
32	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	RSUD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100	RSUD
34	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	40,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	RSUD
35	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Rumah Sakit & Jaringannya	Tercapainya klasifikasi RSUD	C	C	24,045,400	C	24,045,400	C	24,045,400	C	24,045,400	C	24,045,400	C	24,045,400	C	RSUD
36	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	Tercapainya standar akreditasi RSUD	Perdana	Perdana	4,602,400	Perdana	4,602,400	Perdana	4,602,400	madya	4,602,400	Madya	4,602,400	purnama	4,602,400	Purnama	RSUD
37	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Meningkatnya persentase IKM RSUD (%)		10%	10,000,000	20%	10,000,000	30%	10,000,000	40%	10,000,000	50%	10,000,000	60%	10,000,000	60%	RSUD
A3	<b>Pekerjaan umum dan penataan ruang</b>																
38	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	2,130,494	100%	2,000,000	100%	1,900,000	100%	2,130,494	100%	1,900,000	100%	1,900,000	100%	PU & Tata Ruang
39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1	4,249,997	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	PU & Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	94,250	50%	94,250	60%	94,250	70%	94,250	80%	94,250	90%	94,250	100%	PU & Tata Ruang
41	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	500,000	40%	500,000	50%	500,000	60%	500,000	70%	500,000	80%	500,000	90%	PU & Tata Ruang
42	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dan IKM yang akuntabel dan tepat waktu (%)	50	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	PU & Tata Ruang
43	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	PU & Tata Ruang
44	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	60,000	5	70,000	5	PU & Tata Ruang
45	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	31.61	35	75,060,000	37.5	129,000,000	50	115,000,000	55	127,000,000	62.5	190,000,000	65	195,500,000	65	PU & Tata Ruang
46	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terselenggaranya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Paket)	1	1	10,000,000	1	9,711,200	1	9,711,200	1	9,711,200	1	9,711,200	1	12,000,000	1	PU & Tata Ruang
47	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Terselenggaranya Pembangunan turap/talud/bronjong (Paket)	1	1	3,000,000	1	2,675,000	1	2,675,000	1	2,675,000	1	2,675,000	1	4,000,000	1	PU & Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	60.77%	65.00%	20,000,000	70%	19,905,906	75%	20,905,906	80%	21,905,906	85%	22,905,906	90%	23,905,906	90%	PU & Tata Ruang
		Persentase peningkatan MBR yang memiliki SPAL (%)	0.00%	5.00%	2,000,000	20%	2,000,000	25%	3,000,000	40%	4,000,000	60%	5,000,000	70%	6,500,000	70%	PU & Tata Ruang
	49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase peningkatan desa yang memiliki Infrastruktur Dasar memadai (%)	0.00%	10%	23,002,000	20%	23,002,000	40%	51,940,000	60%	51,940,000	80%	51,940,000	83%	63,000,000	83%
50		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	54.73	60%	25,000,000	65%	50,000,000	70%	75,000,000	80%	100,000,000	80%	100,000,000	80%	100,000,000	80%
A4	<b>Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>																
51	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni (%)	35.00%	37.5	8,000,000	42.5	8,000,000	45	8,000,000	47.5	8,000,000	50.00	8,000,000	52.5	9,000,000	52.50%	PU & Tata Ruang
	52	Program Fasilitasi dan Stimulasi Sarana & Prasarana Perumahan di Perdesaan	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	1.22%	0.01	2,000,000	1.10%	1,600,000	1.05%	1,600,000	1.00%	2,100,000	0.80%	2,100,000	0.50%	2,100,000	0.50%
A5	<b>Penataan Ruang</b>																
53	Program Penataan Ruang	Terselenggaranya perencanaan tata ruang berbasis spasial (Paket)	2	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	12	PU & Tata Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Persentase Izin yang sesuai dengan RTRW dan Turunannya (%)	0%	10%	500,000	30%	500,000	50%	500,000	65%	500,000	85%	500,000	100%	1,000,000	100%	PU & Tata Ruang
55	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan ruang (Paket)	5	5	300,000	4	300,000	3	300,000	2	300,000	1	300,000	0	600,000	-	PU & Tata Ruang
A6	<b>Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>																
56	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	606,830	100%	606,830	100%	606,830	100%	606,830	100%	606,830	100%	606,830	100%	BPBD
57	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	527,240	1 Paket	350,000	1 Paket	450,000	1 Paket	550,000	1 Paket	250,000	1 Paket	60,000	1 Paket	BPBD
58	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	100%	BPBD
59	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	137,024	30%	137,024	40%	137,024	50%	137,024	60%	137,024	70%	137,024	70%	BPBD
60	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	70%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	BPBD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	BPBD
62	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	30,000	2	35,000	2	35,000	3	50,000	4	60,000	5	70,000	5	BPBD
63	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana (%)	0	5%	500,000	10%	350,000	20%	450,000	30%	550,000	40%	650,000	50%	850,000	50%	BPBD
A7	<b>Kantor Pemadam Kebakaran</b>																
64	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	363,138	100%	363,138	100%	363,138	100%	363,138	100%	363,138	100%	363,138	100%	Pemadam Kebakaran
65	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	147,000	1 Paket	147,000	1 Paket	147,000	1 Paket	147,000	1 Paket	147,000	1 Paket	147,000	1 Paket	Pemadam Kebakaran
66	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	12,150	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	30,000	100%	Pemadam Kebakaran
67	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	277,712	40%	277,712	50%	277,712	60%	277,712	70%	277,712	80%	277,712	90%	Pemadam Kebakaran



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	40,000	1 Paket	40,000	1 Paket	40,000	1 Paket	40,000	1 Paket	40,000	1 Paket	40,000	1 Paket	Pemadam Kebakaran
69	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	Pemadam Kebakaran
70	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	30,000	2	30,000	2	40,000	3	40,000	4	50,000	5	60,000	5	Pemadam Kebakaran
71	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (Kecamatan)	5	5	500,000	7	500,000	9	1,700,000	11	200,000	12	200,000	14	500,000	14	Pemadam Kebakaran
A8	<b>Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik</b>																
72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	70%	100%	664,913	100%	664,913	100%	664,913	100%	664,913	100%	664,913	100%	664,913	100%	Kesbangpol
73	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	767,000	1 Paket	767,000	1 Paket	767,000	1 Paket	767,000	1 Paket	767,000	1 Paket	767,000	1 Paket	Kesbangpol
74	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	Kesbangpol



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	25%	224,760	30%	224,760	40%	224,760	50%	224,760	60%	224,760	70%	224,760	80%	Kesbangpol
76	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Kesbangpol
77	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	Kesbangpol
78	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	35,000	2	35,000	2	40,000	3	40,000	4	50,000	5	60,000	5	Kesbangpol
79	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya peningkatan wawasan kebangsaan (Paket)	3	3	1,096,999	3	1,096,999	3	1,096,999	3	1,096,999	3	1,096,999	4	1,500,000	18	Kesbangpol
80	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu (%)	87.18	-	144,142	-	144,142	10%	175,000	10%	500,000	10%	230,000	15%	450,000	95%	Kesbangpol
81	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Terselenggaranya kegiatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi (Paket)	1	1	158,276	1	158,276	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000	5	Kesbangpol
82	Program Kemitraan Kantibmas	Terciptanya sinergitas program FKDM, Forkominda dan PKS (Paket)	3	3	680,000	3	700,000	3	750,000	3	800,000	3	900,000	3	950,000	18	Kesbangpol



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi TKA dan Lembaga Asing (Paket)	2	2	180,000	2	200,000	2	220,000	2	240,000	2	260,000	3	480,000	2	Kesbangpol
A9	<b>Badan Satuan Polisi Pamong Praja &amp; Linmas</b>																
84	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	625,990	100%	625,990	100%	625,990	100%	625,990	100%	625,990	100%	625,990	100%	Satpol & Linmas
85	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	300,000	1 Paket	300,000	1 Paket	300,000	1 Paket	300,000	1 Paket	450,000	1 Paket	500,000	1 Paket	Satpol & Linmas
86	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	50%	60%	95,000	70%	150,000	80%	200,000	90%	250,000	100%	300,000	100%	350,000	100%	Satpol & Linmas
87	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	150,000	40%	200,000	50%	250,000	60%	300,000	70%	350,000	80%	400,000	90%	Satpol & Linmas
88	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Satpol & Linmas
89	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Satpol & Linmas



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	40,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	70,000	5	Satpol & Linmas
91	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Operasi)	12	12	954,800	12	1,100,000	12	1,300,000	12	1,500,000	12	1,700,000	12	2,000,000	12	Satpol & Linmas
92	Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan Desa yang memiliki Hansip/Linmas yang terlatih (%)	0	0	468,459	10%	550,000	20%	650,000	30%	750,000	40%	850,000	50%	950,000	50%	Satpol & Linmas
93	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase berkurangnya jumlah PEKAT (%)	70%	65%	221,295	50%	350,000	40%	400,000	30%	450,000	20%	500,000	7%	750,000	5%	Satpol & Linmas
<b>A10</b>	<b>Sosial</b>																
94	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	842,595	100%	842,595	100%	842,595	100%	842,595	100%	842,595	100%	842,595	100%	Dinas Sosial
95	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	605,210	1 Paket	400,000	1 Paket	500,000	1 Paket	600,000	1 Paket	700,000	1 Paket	800,000	1 Paket	Dinas Sosial
96	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	30,000	100%	Dinas Sosial



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
97	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	85,000	40%	100,000	50%	120,000	60%	140,000	70%	160,000	80%	180,000	90%	Dinas Sosial
98	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Sosial
99	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Sosial
100	Program Pemberdayaan, Kelembagaan, Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Mandiri	1	1	50,000	2	60,000	2	70,000	3	80,000	4	90,000	5	90,000	5	Dinas Sosial
101	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & Penyandang Kesejahteraan Sosial lainnya	Rasio PMKS dibanding Jumlah Penduduk (%)	8.66	8.66%	600,000	8.00%	750,000	7.50%	1,000,000	7.00%	1,250,000	6.50%	1,500,000	6%	1,750,000	6%	Dinas Sosial
102	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih (%)	0.66%	1%	550,000	2%	550,000	3%	650,000	4%	750,000	5%	950,000	7%	1,500,000	7%	Dinas Sosial
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
B1	Tenaga Kerja																
103	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	1,276,642	100%	1,276,642	100%	1,276,642	100%	1,276,642	100%	1,276,642	100%	1,276,642	100%	Disnakertrans



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
104	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	1,417,000	1 Paket	600,000	1 Paket	600,000	1 Paket	600,000	1 Paket	600,000	1 Paket	600,000	1 Paket	Disnakertrans
105	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	Disnakertrans
106	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	30,000	30%	90,000	40%	90,000	50%	90,000	60%	90,000	70%	90,000	80%	Disnakertrans
107	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	3	Disnakertrans
108	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	100%	Disnakertrans
109	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Disnakertrans
110	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Kasus)	5	5	100,000	6	150,000	7	200,000	8	250,000	9	300,000	10	350,000	10	Disnakertrans
111	Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang memiliki Standar Kualifikasi/Kompetensi (%)	0	2%	1,000,000	5%	3,500,000	10%	10,000,000	15%	15,000,000	20%	7,500,000	25%	8,000,000	30%	Disnakertrans



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
112	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73.60	75	750,000	77	1,000,000	79	1,200,000	81	1,600,000	83	1,800,000	85	2,500,000	85	Disnakertrans
B2	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>																
113	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	624,864	100%	624,864	100%	624,864	100%	624,864	100%	624,864	100%	624,864	100%	BPPKB
114	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana PPKB (Kecamatan)	5	5 Kec.	3,975,080	3 Kec	2,000,000	3 Kec	BPPKB								
115	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	100%	BPPKB
116	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	30%	40%	120,316	50%	120,316	60%	120,316	70%	120,316	80%	120,316	90%	120,316	100%	BPPKB
117	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	BPPKB
118	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	BPPKB



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
119	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	50,000	2	60,000	3	70,000	4	80,000	5	90,000	5	BPPKB
120	Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT (KDRT)	39	35	200,000	30	200,000	25	300,000	20	300,000	15	400,000	10	500,000	5	BPPKB
121	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatkan peran serta dalam kegiatan P2WKSS (Paket)	1	1 Paket	200,000	1 Paket	200,000	1 Paket	200,000	1 Paket	200,000	1 Paket	200,000	1 Paket	200,000	1 Paket	BPPKB
122	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KKR)	Persentase rasio perkawinan pertama wanita > 20 tahun (%)	65%	100%	206,000	100%	206,000	100%	206,000	100%	206,000	100%	206,000	100%	206,000	100%	BPPKB
123	Program Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	68.21%	68.21%	150,000	70%	175,000	72%	200,000	74%	225,000	76%	250,000	78%	300,000	78%	BPPKB
124	Program Peningkatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (Kasus)	5	5 Kasus	32,420	10 Kasus	50,000	15 Kasus	60,000	20 Kasus	70,000	25 Kasus	80,000	30 Kasus	100,000	30 Kasus	BPP & KB
B3	<b>Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>																
125	Program Keluarga Berencana	Persentase Cakupan KB Aktif (%)	76.60%	80.00%	250,000	80.00%	350,000	85.00%	400,000	90.00%	500,000	95.00%	650,000	95.00%	750,000	95.00%	BPPKB



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
127	Program Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I (%)	41.41%	45%	150,000	50%	200,000	55%	250,000	60%	300,000	65%	350,000	70%	450,000	70%	BPPKB
128	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU (%)	110 Klp	125 Klp	50,000	140 Klp	75,000	160 Klp	100,000	180 Klp	150,000	200 Klp	200,000	220 Klp	300,000	220 Klp	BPPKB
129	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping BKB (Orang)	135	135	75,000	150	100,000	165	150,000	180	200,000	195	250,000	200	350,000	200	BPPKB
<b>B4</b>	<b>Pangan</b>																
130	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	7%	100%	677,249	100%	677,249	100%	677,249	100%	677,249	100%	677,249	100%	677,249	100%	Badan Ketahanan Pangan
131	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	211,000	1 Paket	211,000	1 Paket	211,000	1 Paket	211,000	1 Paket	211,000	1 Paket	211,000	1 Paket	Badan Ketahanan Pangan
132	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	35%	30,000	55%	30,000	65%	30,000	85%	30,000	90%	30,000	100%	30,000	100%	Badan Ketahanan Pangan
133	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	200,000	40%	200,000	50%	200,000	60%	200,000	70%	200,000	80%	200,000	80%	Badan Ketahanan Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
134	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	Badan Ketahanan Pangan
135	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	Badan Ketahanan Pangan
136	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	60,000	2	60,000	3	70,000	4	80,000	5	90,000	5	90,000	Badan Ketahanan Pangan
137	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan Produksi Hasil Olahan Pangan Pertanian (%)	0	3%	200,000	5%	300,000	7%	400,000	9%	500,000	11%	600,000	14%	800,000	14%	800,000	Badan Ketahanan Pangan
138	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan meningkat dari 3 bulan menjadi 8 bulan	3 bulan	3 bulan	2,589,500	4 bulan	2,589,500	5 bulan	2,589,500	6 bulan	2,589,500	7 bulan	2,589,500	8 bulan	3,000,000	8 bulan	3,000,000	Badan Ketahanan Pangan
139	Program Stabilisasi Harga Pangan	Persentase peningkatan/penurunan Harga Pangan (%)	15%	10%	140,000	10%	200,000	10%	260,000	10%	310,000	10%	380,000	10%	440,000	10%	440,000	Badan Ketahanan Pangan
140	Program Diversifikasi Pangan Bergizi & Berimbang	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	70%	75%	120,000	80%	120,000	85%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	220,000	95%	220,000	Badan Ketahanan Pangan
141	Program Pengembangan Pangan Lokal	Persentase peningkatan produksi pangan lokal yang dikonsumsi masyarakat (%)	5%	5%	200,000	7%	300,000	9%	325,000	11%	350,000	12%	400,000	15%	450,000	15%	450,000	Badan Ketahanan Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B5	<b>Pertanahan</b>																
142	Program Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah Konflik Pertanahan	15	15	300,000	12	300,000	9	450,000	7	550,000	5	650,000	3	950,000	3	Bagian Pemerintahan Umum
B6	<b>Lingkungan Hidup</b>																
143	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	844,989	100%	844,989	100%	844,989	100%	844,989	100%	844,989	100%	844,989	100%	BLH
144	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	172,000	1 Paket	172,000	1 Paket	172,000	1 Paket	172,000	1 Paket	172,000	1 Paket	172,000	1 Paket	BLH
145	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	45%	30,000	65%	30,000	75%	30,000	85%	30,000	100%	30,000	100%	BLH
146	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	69,500	30%	95,000	40%	120,000	50%	150,000	60%	175,000	70%	200,000	70%	BLH
147	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	BLH
148	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	BLH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
149	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	60,000	2	60,000	3	70,000	4	80,000	5	90,000	5	BLH
150	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	3.34%	5.00%	1,065,230	10%	1,265,230	15%	1,465,230	20%	1,500,000	25%	1,500,000	30%	1,500,000	30%	BLH
151	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran (%)	70%	75%	311,460	80%	311,460	85%	311,460	90%	311,460	95%	311,460	100%	450,000	100%	BLH
152	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan yang Terkonservasi (Ha)	17	15	450,000	15	450,000	15	450,000	15	450,000	15	450,000	15	550,000	90	BLH
153	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup (%)	20%	40%	400,000	50%	500,000	60%	600,000	70%	750,000	80%	850,000	90%	950,000	100%	BLH
154	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan luas RTH (%)	11.67	12	3,774,748	17%	2,000,000	23.33	3,000,000	35	4,000,000	46.87	5,000,000	58.33	6,000,000	58.33	BLH
		Kota Andoolo menuju Green City (Paket)	0	2	500,000	2	500,000	2	500,000	4	1,000,000	4	1,000,000	6	1,500,000		BLH
B7	Administarasi Kependudukan dan pencatatan sipil																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
155	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	608,192	100%	608,192	100%	608,192	100%	608,192	100%	608,192	100%	608,192	100%	Disdukcapil
156	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1	1,417,090	1	1,417,090	1	1,417,090	1	1,417,090	1	1,417,090	1	1,417,090	1	Disdukcapil
157	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	40%	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	30,000	100%	30,000	100%	Disdukcapil
158	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	30%	35%	108,452	40%	108,452	45%	108,452	50%	108,452	55%	108,452	60%	108,452	60%	Disdukcapil
159	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Disdukcapil
160	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Disdukcapil
161	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	60,000	2	60,000	3	70,000	4	80,000	5	90,000	5	Disdukcapil
162	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP (%)	79.13%	80%	1,575,920	83%	1,750,000	87%	2,000,000	91%	2,250,000	93%	2,500,000	95%	3,000,000	95%	Disdukcapil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%)	39.32	40%		45%		50%		55%		60%		65%			Disdukcapil
		Cakupan Kartu Identitas Anak (%)	Persentase dari Jumlah Anak	0	-	5%											Disdukcapil
<b>B8</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan Desa</b>																
163	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	1,502,890	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000		BPMD
164	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	1,626,765	1 Paket	1,000,000		BPMD								
165	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	32,940	50%	32,940	60%	32,940	70%	32,940	80%	32,940	90%	32,940	90%	BPMD
166	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	300,000	40%	300,000	50%	300,000	60%	300,000	70%	300,000	80%	300,000	80%	BPMD
167	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000		BPMD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
168	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000		BPMD
169	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa yang telah menyelenggarakan Siklus Tahunan Secara Tertib (%)	74.32	74.32	750,000	80%	850,000	85%	950,000	90%	1,100,000	95%	1,200,000	100%	1,500,000	100%	BPMD
170	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Aparatur terampil & mampu mengelola keuangan desa dengan baik & benar (%)	50.24%	55%	2,006,049	58%	2,250,000	62%	2,500,000	67%	2,750,000	70%	3,000,000	75%	3,500,000	75%	BPMD
		Persentase Desa yang telah menerapkan Siskeudes (%)	0.00	5.00	200,000	25%	300,000	40%	450,000	60%	550,000	80%	750,000	100%	850,000	100%	BPMD
171	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang memiliki kelompok kegiatan masyarakat produktif (%)	50.24%	55%	800,000	58%	1,000,000	62%	1,000,000	67%	1,000,000	70%	1,000,000	75%	1,200,000	75%	BPMD
172	Program pemberdayaan kelompok usaha ekonomi produktif	Persentase desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif (%)	10%	20%	350,000	30%	450,000	40%	550,000	50%	650,000	60%	750,000	70%	950,000	70%	BPMD
173	Program Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Perempuan/Ibu Rumah Tangga/PKK yang memiliki Standar Kualifikasi/Kompetensi (%)	10%	15%	250,000	20%	300,000	30%	400,000	40%	500,000	50%	500,000	60%	700,000	60%	BPMD
B9	<b>Perhubungan</b>																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
174	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	58.15%	60%	710,562	70%	710,562	80%	710,562	90%	710,562	100%	710,562	100%	710,562	100%	Dinas Perhubungan & Infokom
175	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	59.05%	60%	365,921	70%	365,921	80%	365,921	90%	365,921	100%	365,921	100%	365,921	100%	Dinas Perhubungan & Infokom
176	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Dinas Perhubungan & Infokom
177	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	154,497	30%	200,000	40%	300,000	50%	400,000	60%	500,000	70%	500,000	80%	Dinas Perhubungan & Infokom
178	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Perhubungan & Infokom
179	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Perhubungan & Infokom
180	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Dinas Perhubungan & Infokom
181	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya Fasilitas Perizinan Kendaraan (paket)	2200		114,700	2200	45,100	2200	49,810	2200	54,571	2200	60,028	2200	175,000	22000	Dinas Perhubungan & Infokom



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
182	Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ	Meningkatnya utilitas Prasarana & Fasilitas LLAJ (paket)	2 Paket	2 Paket	353,660	2 Paket	353,660	2 Paket	353,660	2 Paket	353,660	2 Paket	353,660	2 Paket	553,660	12 Paket	Dinas Perhubungan & Infokom
183	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan	Rasio Angkutan Darat dengan Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	7.14%	8%	1,250,000	10%	1,500,000	15%	1,500,000	20%	2,000,000	30%	2,500,000	40%	3,000,000	40%	Dinas Perhubungan & Infokom
		Persentase peningkatan sarana & prasarana perhubungan laut (%)	0.00%	5%	250,000	10%	500,000	15%	500,000	20%	500,000	30%	500,000	35%	1,000,000	35%	Dinas Perhubungan & Infokom
184	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. (Unit)	548 Unit	548	2,297,450	700	2,297,450	900	2,297,450	1200	2,297,450	1400	2,297,450	1700	2,797,450	1,700	Dinas Perhubungan & Infokom
185	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai (Paket)	Sudah ada, Tinggal Fasilitas	-	150,000	1	150,000	1	750,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	Dinas Perhubungan & Infokom
B10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>																
186	Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik	Terselenggaranya media informasi dan komunikasi publik melalui media elektronik, cetak, pertunjukan dan pameran pembangunan (Paket)	3 Paket	2 Paket	150,000	4 Paket	250,000	4 Paket	350,000	4 Paket	450,000	4 Paket	550,000	4 Paket	650,000	4 Paket	Dishub & Kominfo
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (Kecamatan)	11	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000		Dishub & Kominfo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B11	<b>Koperasi, Usaha Kecil &amp; Menengah</b>																
187	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	60%	100%	527,170	100%	527,170	100%	527,170	100%	527,170	100%	527,170	100%	527,170	100%	Dinas Kop & UMKM
188	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	969,600	1 Paket	969,600	1 Paket	969,600	1 Paket	969,600	1 Paket	969,600	1 Paket	969,600	1 Paket	Dinas Kop & UMKM
189	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Dinas Kop & UMKM
190	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	150,800	30%	150,800	40%	150,800	50%	150,800	60%	150,800	70%	150,800	70%	Dinas Kop & UMKM
191	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	50%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Kop & UMKM
192	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Kop & UMKM
193	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Dinas Kop & UMKM



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
194	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Peningkatan UMKM Mandiri (%) dari 1.832 UMKM	0	10%	500,000	15%	350,000	20%	400,000	25%	600,000	30%	750,000	35%	1,000,000	35%	Dinas Kop & UMKM
195	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan UMKM yang menerapkan TTG (%) dari 1.832	0	15%	800,000	20%	800,000	25%	900,000	30%	1,000,000	35%	1,000,000	40%	1,300,000	40%	Dinas Kop & UMKM
196	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal dari Perbankan/BUMN dari 1.916 UKM	0	10%	750,000	10%	750,000	15%	850,000	20%	1,500,000	25%	2,000,000	30%	2,500,000	30%	Dinas Kop & UMKM
197	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rasio Koperasi Aktif (%)	69.89%	77%	450,000	80%	450,000	85%	550,000	90%	750,000	95%	850,000	100%	950,000	100%	Dinas Kop & UMKM
<b>B12</b>	<b>Penanaman Modal</b>																
198	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	2,138,474	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	BP2T
199	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1	1,296,300	1	800,000	1	800,000	1	2,000,000	1	1,300,000	1	1,300,000	1	BP2T
200	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	50%	60%	60,000	70%	70,000	80%	70,000	90%	80,000	100%	90,000	100%	90,000	100%	BP2T



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	30%	40%	441,726	50%	350,000	60%	350,000	70%	350,000	80%	350,000	90%	350,000	90%	BP2T
202	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	BP2T
204	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	70,000	5	BP2T
205	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Paket)	1	1 Paket	500,000	1	650,000	1	750,000	1	800,000	1	800,000	1	800,000	1	BP2T
206	Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi	Tersedianya data dan informasi mitra usaha potensial untuk pengembangan PM	9 Paket	9	350,000	9	500,000	9	500,000	9	500,000	9	600,000	9	850,000	9	BP2T
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%)	61.13%	70	350,000	70	500,000	70	500,000	70	500,000	80	600,000	85	850,000	85	BP2T
207	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana & Prasarana Daerah	Terselenggaranya service excelent bidang Perizinan & Penanaman Modal (kegiatan)	8	8 Keg	160,000	8 Keg	160,000	8 Keg	160,000	8 Keg	250,000	8 Keg	450,000	8 Keg	750,000	8 Keg	BP2T
<b>B13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	450,300	100%	450,300	100%	450,300	100%	450,300	100%	450,300	100%	450,300	100%	Kantor Pemuda & Olahraga
209	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	68,250	1 Paket	469,000	1 Paket	Kantor Pemuda & Olahraga								
210	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Kantor Pemuda & Olahraga
211	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	122,000	30%	122,000	40%	122,000	50%	122,000	60%	122,000	70%	122,000	70%	Kantor Pemuda & Olahraga
212	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Kantor Pemuda & Olahraga
213	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Kantor Pemuda & Olahraga
214	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	70,000	5	Kantor Pemuda & Olahraga
215	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terselenggaranya kegiatan pengembangan dan keserasian Pemuda (kegiatan)		3 Keg	115,000	4 Keg	1,733,000	5 Keg	1,933,000	5 Keg	Kantor Pemuda & Olahraga						



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
216	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan Mandiri (Organisasi)	0	5	483,500	7	670,000	9	690,000	11	710,000	13	730,000	14	900,000	14	Kantor Pemuda & Olahraga
217	Program Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olahraga	Jumlah Cabor berprestasi	3	3	150,000	5	300,000	6	400,000	6	500,000	7	600,000	7	750,000	7	Kantor Pemuda & Olahraga
218	Program Pembinaan & Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kompetisi	2	2	96,180	5	320,000	5	350,000	5	370,000	5	390,000	5	450,000	5	Kantor Pemuda & Olahraga
219	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga	Rasio jumlah lapangan olahraga dengan jumlah penduduk (Rasio)	0.0046	0.0093	4,743,000	0.0106	1,500,000	0.0152	2,500,000	0.0192	3,500,000	0.0232	4,750,000	0.0027	5,100,000	0.0027	Kantor Pemuda & Olahraga
<b>B14</b>	<b>Statistik</b>																
220	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	60	100%	996,286	100%	996,286	100%	996,286	100%	996,286	100%	996,286	100%	996,286	100%	BAPPEDA
221	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	0	1 Paket	807,500	1 Paket	807,500	1 Paket	807,500	1 Paket	807,500	1 Paket	807,500	1 Paket	807,500	1 Paket	BAPPEDA
222	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	10%	20%	30,000	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	70%	BAPPEDA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
223	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	15%	138,600	30%	70,000	40%	70,000	50%	70,000	60%	70,000	70%	70,000	70%	BAPPEDA
224	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	BAPPEDA
225	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	BAPPEDA
226	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Bappeda
227	Program Pengembangan Data & Informasi	Jumlah Dokumen Data & Informasi Statistik (Buku)	3	5	339,704	6	500,000	7	600,000	7	700,000	8	800,000	9	900,000	9	BAPPEDA
228	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama Perencanaan Pembangunan dengan Daerah/Lembaga lainnya (paket)	3	3	239,320	5	239,320	5	239,320	5	239,320	5	239,320	5	239,320	5	BAPPEDA
229	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	Jumlah Perencanaan Pembangunan Perdesaan/Kawasan Perdesaan (Paket)	3	3	500,000	3	300,520	2	300,520	2	300,520	2	300,520	2	300,520	2	BAPPEDA
		Terselenggaranya Pendampingan Program Pembangunan Desa Terpadu (Paket)	0	2 Paket	350,000	2 Paket	450,000	2 Paket	500,000	2 Paket	BAPPEDA						



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
230	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Tenaga Fungsional Perencana (Orang)	0	0	468,900	2	468,900	3	468,900	3	468,900	3	468,900	3	668,900	14	BAPPEDA
231	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Kinerja	5	5	1,104,860	5	1,104,860	5	1,104,860	7	1,500,000	7	1,500,000	8	1,750,000	30	BAPPEDA
232	Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Ekonomi & Pembangunan (paket)	5	5	860,000	5	750,000	5	750,000	5	1,000,000	5	750,000	5	1,000,000	30	BAPPEDA
233	Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sosial Budaya (Paket)	5	5	960,000	5	750,000	5	750,000	5	1,000,000	5	750,000	5	1,000,000	30	BAPPEDA
234	Program Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana Wilayah dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Fisik Prasarana Wilayah (Paket)	5	5	960,000	5	750,000	5	750,000	5	1,000,000	5	750,000	5	1,000,000	30	BAPPEDA
235	Program Integrasi Perencanaan-Penganggaran	Tersedianya Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (paket)	0	1 Paket	300,000	1 Paket	300,000	1 Paket	100,000	1 Paket	BAPPEDA						
<b>B15</b>	<b>Persandian</b>																
236	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	255,750	100%	255,750	100%	255,750	100%	255,750	100%	255,750	100%	255,750	100%	Kantor Sandi Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
237	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	50,400	1 Paket	50,400	1 Paket	50,400	1 Paket	50,400	1 Paket	50,400	1 Paket	50,400	1 Paket	Kantor Sandi Daerah
238	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Kantor Sandi Daerah
239	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	50,000	30%	50,000	40%	50,000	50%	50,000	60%	50,000	70%	50,000	70%	Kantor Sandi Daerah
240	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	Kantor Sandi Daerah
241	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Kantor Sandi Daerah
242	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	30,000	2	40,000	2	40,000	3	50,000	4	60,000	5	70,000	5	Kantor Sandi Daerah
243	Program Pengembangan Pembinaan Persandian Daerah	Persentase Peningkatan Sandi Daerah (%)	1	5%	158,250	10%	158,250	20%	200,000	30%	250,000	30%	300,000	30%	350,000	30%	Kantor Sandi Daerah
<b>B16</b>	<b>Kebudayaan</b>																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
244	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Festival Budaya (Festival)	0	2 Kali	400,000	3 Kali	300,000	3 Kali	300,000	3 Kali	500,000	3 Kali	700,000	3 Kali	900,000	17 Kali	Dinas Pendidikan &
B17	Perpustakaan																
245	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	304,320	100%	304,320	100%	304,320	100%	304,320	100%	304,320	100%	304,320	100%	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
246	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	269,380	1 Paket	269,380	1 Paket	269,380	1 Paket	269,380	1 Paket	269,380	1 Paket	269,380	1 Paket	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
247	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
248	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	72,790	30%	72,790	40%	72,790	50%	72,790	60%	72,790	70%	72,790	70%	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
249	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
250	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
251	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	30,000	2	40,000	2	40,000	3	50,000	4	50,000	5	60,000	5	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
252	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah dokumen dan arsip daerah yang diterbitkan (Dokumen)	0	5	31,400	10	50,000	20	60,000	30	70,000	40	80,000	50	90,000	50	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
253	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio jumlah kunjungan perpustakaan	0.782	1.2	250,410	1.6	300,000	2.00	350,000	2.40	400,000	2.80	450,000	3.2	500,000	3.2	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
<b>B 18</b>	<b>Kearsipan</b>																
254	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/Arsip daerah	Jumlah dokumen dan arsip daerah yang lestari (Dokumen)	0	20	50,000	40	50,000	60	50,000	80	75,000	100	75,000	120	75,000	120	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
<b>C</b>	<b>Urusan Penunjang</b>																
<b>C1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>																
255	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	7,740,896	100%	7,740,896	100%	7,740,896	100%	7,740,896	100%	7,740,896	100%	7,740,896		Setda
256	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana & Prasarana Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan yang nyaman dan modern (paket)	0	4 Paket	9,093,340	8 Paket	27,000,000	8 Paket	22,000,000	8 Paket	21,500,000	5 Paket	11,000,000	5 Paket	11,343,340		Setda
257	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	10%	20%	100,000	30%	100,000	40%	100,000	50%	100,000	60%	100,000	70%	100,000	70%	Setda
258	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	1,788,089	30%	1,788,089	40%	1,788,089	50%	1,788,089	60%	1,788,089	70%	1,788,089	70%	Setda



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
259	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000		Setda
260	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	50,000	2	60,000	2	60,000	3	70,000	4	80,000	5	90,000	5	Setda
261	Program Peningkatan Keagamaan	Terselenggaranya Fasilitas kegiatan keagamaan dan Tempat Ibadah (Paket)	1	1	1,084,886	1	1,500,000	1	1,750,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	Setda
262	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakada	Terselenggaranya kegiatan kedinasan Bupati dan wakil bupati baik dalam maupun luar daerah (paket)	1	1	2,500,000	1	2,750,000	1	3,000,000	1	3,250,000	1	3,500,000	1	4,000,000	1	Setda
263	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah dan Penyelesaian Perkara (Paket)	1	1	1,500,000	1	1,750,000	1	2,000,000	1	2,250,000	1	2,500,000	1	2,750,000	1	Setda
264	Program Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar dan Fasilitasi Kegiatan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan umum pemerintah daerah dan fasilitasi kegiatan masyarakat (paket)	1	1	1,500,000	1	1,600,000	1	1,700,000	1	1,800,000	1	1,900,000	1	2,000,000	1	Setda
265	Program Pengembangan Bidang Kehumasan	Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan peningkatan informasi daerah berbasis media massa (paket)	1	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,700,000	1	1,800,000	1	1,900,000	1	2,000,000	1	Setda
267	Program Penataan Kelembagaan & Disiplin Aparatur	Terselenggaranya Tata Kelembagaan dan Organisasi Daerah yang terstandarisasi (paket)	1	1	1,000,000	1	1,250,000	1	1,500,000	1	1,750,000	1	2,000,000	1	2,250,000	1	Setda



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
268	Program Peningkatan Perencanaan Administrasi Pembangunan	Terselenggaranya fasilitas Perencanaan & Penataan Administrasi Pembangunan (paket)	1	1	4,992,678	1	5,250,000	1	5,500,000	1	5,750,000	1	6,000,000	1	6,250,000	1	Setda
269	Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terselenggaranya Fasilitas Peningkatan Ekonomi Masyarakat (paket)	1	1	350,000	1	450,000	1	650,000	1	750,000	1	850,000	1	950,000	1	Setda
270	Program Pengadministrasian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya fasilitas Pengadministrasian, Pengembangan & Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (paket)	1	1	2,919,691	1	3,250,000	1	3,500,000	1	3,750,000	1	4,000,000	1	4,250,000	1	Setda
		Terselenggaranya fasilitas 25 Kecamatan dan 15 kelurahan Sesuai Type (Kecamatan)	25	25	10,000,000	25	10,000,000	25	11,250,000	25	11,250,000	25	12,500,000	25	12,750,000	25	Setda
		Terselenggaranya fasilitas 15 Kelurahan (Kelurahan)	15	15	3,000,000	15	3,000,000	15	3,300,000	15	3,300,000	15	3,750,000	15	4,000,000	15	Setda
C2	Sekretariat DPRD																
271	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	5,588,373	100%	5,588,373	100%	5,588,373	100%	5,588,373	100%	5,588,373	100%	5,588,373	100%	Setwan
272	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1 paket	1 Paket	4,426,800	1 Paket	3,426,800	1 Paket	4,426,800	1 Paket	2,426,800	1 Paket	2,426,800	1 Paket	2,426,800	1 Paket	Setwan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
273	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	376,450	40%	376,450	50%	376,450	60%	376,450	70%	376,450	80%	376,450	80%	Setwan
274	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	300,000	30%	300,000	40%	300,000	50%	300,000	60%	300,000	70%	300,000	70%	Setwan
275	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Setwan
276	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1 Paket	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Setwan
277	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Setwan
278	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terselenggaranya Fungsi DPRD (Penyusunan Perda, Anggaran & Pengawasan) (Paket)	3	3	5,974,791	3	6,500,000	3	7,500,000	3	8,000,000	3	8,500,000	3	9,000,000	3 Paket	Setwan
		Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD (Orang)	35	35 Orang	2,200,000	35 Orang	2,200,000	35 Orang	2,200,000	35 Orang	2,200,000	35 Orang	2,200,000	35 Orang	2,500,000	35 Orang	Setwan
279	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (paket)	1 Paket	1 Paket	384,000	1 Paket	450,000	1 Paket	500,000	1 Paket	550,000	1 Paket	600,000	1 Paket	750,000	1 Paket	Setwan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C3	<i>Set. Korpri</i>																
280	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75	100%	228,150	100%	228,150	100%	228,150	100%	228,150	100%	228,150	100%	228,150	100%	Korpri
281	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	59,500	1 Paket	59,500	1 Paket	59,500	1 Paket	59,500	1 Paket	59,500	1 Paket	59,500	1 Paket	Korpri
282	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	25%	30,000	30%	30,000	35%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	60%	Korpri
283	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10%	20%	50,000	30%	50,000	40%	50,000	50%	50,000	60%	50,000	70%	50,000	70%	
284	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	Korpri
285	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Korpri
286	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	30,000	2	40,000	2	40,000	3	50,000	4	60,000	5	70,000	5	Korpri



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
287	Program Pelayanan & Pembinaan Anggota Korpri	Jumlah Anggota Korpri yang mempunyai etos kerja & Sejahtera (Orang)	0	200 orang	200,000	400 orang	400,000	600 orang	600,000	800 orang	800,000	1000 orang	1,000,000	1200 orang	1,200,000	1200 orang	Korpri
<b>C5</b>	<b>DPKAD</b>																
288	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	7,904,685	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	DPKAD
289	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	3,330,997	1 Paket	1,500,000	1 Paket	DPKAD								
290	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	35%	39,040	40%	39,040	50%	39,040	60%	39,040	70%	39,040	80%	39,040	80%	DPKAD
291	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	3,458,094	40%	250,000	50%	250,000	60%	250,000	70%	250,000	80%	250,000	80%	DPKAD
292	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	DPKAD
293	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	75,000	2	80,000	2	80,000	3	90,000	4	100,000	5	120,000	5	DPKAD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
294	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	DPKAD
295	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	3	3	2,821,092	3	2,821,092	3	2,821,092	3	2,821,092	3	2,821,092	3	2,821,092	100%	DPKAD
296	Program Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan	Jumlah SDM Pengelola Teknis Keuangan yang memenuhi kualifikasi	0	Seluruh OPD	1,000,000	Seluruh OPD	1,000,000	Seluruh OPD	1,000,000	Seluruh OPD	1,000,000	Seluruh OPD	1,000,000	Seluruh OPD	1,300,000	Seluruh OPD	DPKAD
297	Program Peningkatan Sistem Pengelola Keuangan Ber-basis on-line	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan SIMDA	0	0	-	20	350,000	5	150,000	5	150,000	5	150,000	5	150,000	40 OPD	DPKAD
<b>C6</b>	<b>Dispenda</b>																
298	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	625,000	100%	625,000	100%	625,000	100%	625,000	100%	625,000	100%	625,000	100%	Dispenda
299	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	530,000	1 Paket	530,000	1 Paket	530,000	1 Paket	530,000	1 Paket	530,000	1 Paket	530,000	1 Paket	Dispenda
300	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	65,000	50%	65,000	60%	65,000	70%	65,000	80%	65,000	90%	65,000	90%	Dispenda



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
301	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	349,930	40%	349,930	50%	349,930	60%	349,930	70%	349,930	80%	349,930	80%	Dispenda
302	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	
303	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1	49,500	1	49,500	1	49,500	1	49,500	1	49,500	1	49,500	1	Dispenda
304	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Dispenda
305	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	10%	10%	1,000,000	15%	1,100,000	20%	1,200,000	25%	1,300,000	30%	1,400,000	35%	1,500,000	35%	Dispenda
<b>C7</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>																
306	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	695,583	100%	695,583	100%	695,583	100%	695,583	100%	695,583	100%	695,583	100%	Inspektorat Daerah
307	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	241,007	1 Paket	241,007	1 Paket	241,007	1 Paket	241,007	1 Paket	241,007	1 Paket	241,007	1 Paket	Inspektorat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
308	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Inspektorat Daerah
309	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	121,280	40%	121,280	50%	121,280	60%	121,280	70%	121,280	80%	121,280	80%	Inspektorat Daerah
310	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)		1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Inspektorat Daerah
311	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	60%	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	
312	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Hasil Temuan dan Tindak lanjut (%)	40%	40%	1,125,150	30%	1,750,000	20%	2,000,000	10%	2,250,000	5%	2,500,000	5%	2,500,000	2%	Inspektorat Daerah
313	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP (skala)	1	1	200,000	2	200,000	2	200,000	3	350,000	4	400,000	5	450,000	24	Inspektorat Daerah
314	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	Jumlah SOP Pengawasan	2	2	100,000	2	120,000	2	140,000	2	160,000	2	180,000	2	200,000	12	Inspektorat Daerah
<b>C8</b>	<b>Kepegawaian Daerah &amp; Pendidikan dan Pelatihan</b>																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
315	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	60%	100%	819,149	100%	819,149	100%	819,149	100%	819,149	100%	819,149	100%	819,149	100%	BKD & Diklat
316	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	682,370	1 Paket	682,370	1 Paket	682,370	1 Paket	682,370	1 Paket	682,370	1 Paket	682,370	1 Paket	BKD & Diklat
317	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	50%	55%	50,000	65%	30,000	75%	30,000	80%	30,000	90%	30,000	100%	100,000	100%	BKD & Diklat
318	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	40%	50%	60,000	60%	60,000	70%	60,000	80%	60,000	80%	60,000	80%	60,000	80%	BKD & Diklat
319	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	BKD & Diklat
320	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	
321	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	BKD & Diklat
322	Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur	Terselenggaranya Pembinaan & pengembangan aparatur	3 Paket	3 Paket	1,700,000	3 Paket	1,500,000	3 Paket	1,750,000	3 Paket	2,000,000	3 Paket	2,250,000	3 Paket	3,000,000	3 Paket	BKD & Diklat



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
323	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang memenuhi standar kualifikasi jabatan (%)	20%	20%	1,500,000	30%	1,200,000	50%	1,400,000	70%	1,600,000	80%	1,800,000	100%	2,500,000	100%	BKD & Diklat
<b>C9</b>	<b>Badan Narkotika Daerah</b>																
324	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100	298,620	100	298,620	100	298,620	100	298,620	100	298,620	100	298,620	100	Badan Narkotika Daerah
325	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	67,250	1 Paket	67,250	1 Paket	67,250	1 Paket	67,250	1 Paket	67,250	1 Paket	67,250	1 Paket	Badan Narkotika Daerah
326	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	78,196	40%	78,196	50%	78,196	60%	78,196	70%	78,196	80%	78,196	80%	Badan Narkotika Daerah
327	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	25%	78,196	30%	78,196	40%	78,196	50%	78,196	60%	78,196	70%	78,196	70%	Badan Narkotika Daerah
328	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Badan Narkotika Daerah
329	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	30,000	100%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
330	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	30,000	2	40,000	2	40,000	3	50,000	4	60,000	5	70,000	5	Badan Narkotika Daerah
331	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika (Kasus)	18	18	328,754	15	328,754	12	500,000	10	600,000	8	700,000	6	1,000,000	6	Badan Narkotika Daerah
<b>D</b>	<b>Urusan Pilihan</b>																
<b>D1</b>	<b>Kelautan dan perikanan</b>																
332	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	1,557,445	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	DKP
333	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	608,800	1 Paket	608,800	1 Paket	608,800	1 Paket	608,800	1 Paket	608,800	1 Paket	608,800	1 Paket	DKP
334	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	50,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	DKP
335	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	25%	610,012	30%	300,000	40%	300,000	50%	300,000	60%	300,000	70%	300,000	80%	DKP
336	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	7%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	DKP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
337	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	DKP
338	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	DKP
339	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	101	101	2,000,000	101	2,200,000	111	2,400,000	122	2,600,000	134	2,800,000	148	3,200,000	148	DKP
340	Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam Penyalahgunaan Sumberdaya laut	Persentase Penurunan pelanggaran penyalahgunaan Sumber Daya Laut (%)	50%	50%	591,340	50%	591,340	40%	591,340	30%	591,340	20%	591,340	10%	700,000	10%	DKP
341	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2546.68	2546.68	4,085,454	2546.68	4,085,454	3374.84	4,085,454	4185.22	4,085,454	5800.84	4,085,454	6025	5,500,000	9025	DKP
346	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	486	486	5,659,956	486	5,659,956	534	5,659,956	588	5,659,956	647	5,659,956	712	7,000,000	712	DKP
347	Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Antar Pulau, Nasional & Internasional) (%)	%	2%	1,300,831	2%	1,300,831	4%	1,300,831	6%	1,300,831	8%	1,300,831	10%	2,000,000	10%	DKP
348	Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana	Kelompok Nelayan yang melaksanakan Usahanya berdasarkan APIK & PRB (Kelompok)	0	10	300,000	10	300,000	10	300,000	10	300,000	10	300,000	10	400,000	60	DKP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D2	<b>Pariwisata</b>																
349	Program Pelayan Administasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	842,081	100%	842,081	100%	842,081	100%	842,081	100%	842,081	100%	842,081	100%	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
350	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	454,000	1 Paket	454,000	1 Paket	454,000	1 Paket	454,000	1 Paket	454,000	1 Paket	454,000	1 Paket	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
351	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20	30	30,000	40	30,000	50	30,000	60	30,000	70	30,000	80	30,000	80	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
352	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	10	20	184,860	30	184,860	40	184,860	50	184,860	60	184,860	70	184,860	70	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
353	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
354	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
355	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata yang representatif (Paket)	0	1 Paket	750,000	2 Paket	1,000,000	3 Paket	1,000,000	4 Paket	1,250,000	5 Paket	1,500,000	6 Paket	1,750,000	6 Paket	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
356	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	0	5%	500,000	10%	500,000	15%	650,000	20%	750,000	25%	850,000	30%	950,000	30%	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
357	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	terpenuhinya kelompok2 kreatif yang memiliki daya saing (Kelompok)	0	3	500,000	3	500,000	3	500,000	3	500,000	3	500,000	3	750,000	15 Kelompok	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
358	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
<b>D3</b>	<b>Pertanian</b>																
359	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	90%	873,407	100	900,000	100	934,000	100	944,000	100	968,500	100	971,500	100	Dinas Pertanian & Peternakan
360	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1%	1 Paket	608,698	1 Paket	937,000	1 Paket	1,045,000	1 Paket	565,000	1 Paket	695,000	1 Paket	1,520,000	1 Paket	Dinas Pertanian & Peternakan
361	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	50,000	40%	87,500	50%	92,500	60%	92,500	70%	92,500	80%	92,500	80%	Dinas Pertanian & Peternakan
362	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	150,000	40%	150,000	50%	150,000	60%	150,000	70%	150,000	80%	150,000	80%	Dinas Pertanian & Peternakan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
363	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	Dinas Pertanian & Peternakan
364	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	1	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	Dinas Pertanian & Peternakan
365	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	80,000	Dinas Pertanian & Peternakan
366	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase Peningkatan Produk Pangan yang Memiliki Sarana Pengolahan Hasil, Layak Konsumsi & Nilai Tambah Produk (%)	2%	2%	150,000	4%	200,000	6%	300,000	8%	450,000	12%	350,000	15.0%	600,000	15%	600,000	Dinas Pertanian & Peternakan
367	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5%	5%	30,747,050	5%	30,747,050	7%	30,747,050	10%	30,563,050	13%	30,989,650	15%	31,502,860	15%	31,502,860	Dinas Pertanian & Peternakan
368	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Antar Pulau, Nasional & Internasional) (%)	2%	2%	500,000	4%	500,000	6%	500,000	8%	500,000	10%	500,000	12%	600,000	12%	600,000	Dinas Pertanian & Peternakan
		Persentase peningkatan Produksi Hasil Olahan Pangan Pertanian (%)			200,000		175,000		175,000		175,000		200,000		500,000		500,000	Dinas Pertanian & Peternakan
369	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Antar Pulau, Nasional & Internasional) (%)			300,000		250,000		250,000		250,000		300,000		500,000		500,000	Dinas Pertanian & Peternakan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan Produksi Hasil Olahan Pangan Peternakan (%)			200,000		175,000		175,000		175,000		200,000		490,000		Dinas Pertanian & Peternakan
370	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Ketersediaan Daging dan Telur (%)	2%	2%	1,000,000	4%	668,800	6%	750,000	8%	850,000	10%	950,000	12%	1,100,000	12%	Dinas Pertanian & Peternakan
371	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Ketersediaan Daging dan Telur (%)	0.50%	0.50%	1,500,000	1%	1,117,077	2%	1,200,000	2%	1,400,000	3%	1,600,000	4%	1,800,000	4%	Dinas Pertanian & Peternakan
372	Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Persentase Peningkatan Produksi Benih/Bibit Unggul Bersertifikasi	5%	5%	1,707,234	10%	1,707,234	15%	1,900,000	20%	2,100,000	25%	2,200,000	30%	2,400,000	30%	Dinas Pertanian & Peternakan
373	Program Pengembangan Pertanian Organik	Persentase Peningkatan Hasil Pangan Berkualitas dan Aman Konsumsi (%)	2%	2%	736,500	4%	736,500	6%	900,000	8%	1,100,000	10%	1,300,000	15%	1,500,000	15%	Dinas Pertanian & Peternakan
374	Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Kelompok Tani yang melaksanakan Usaha Tani berdasarkan APIK & PRB (Kelompok)	0	6 Klp	300,000	6 Klp	300,000	6 Klp	300,000	6 Klp	300,000	6 Klp	300,000	6 Klp	300,000	36 Klp	Dinas Pertanian & Peternakan
D4	<b>BP4K</b>																
375	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akurat dan Tepat Waktu (%)	7%	100%	540,724	100%	540,724	100%	540,724	100%	540,724	100%	540,724	100%	540,724	100%	BP4K



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
376	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	2,099,737	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,000,000	1 Paket	BP4K						
377	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	40%	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	90%	30,000	100%	30,000	100%	BP4K
378	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	300,000	40%	200,000	50%	200,000	60%	300,000	70%	400,000	80%	500,000	80%	BP4K
379	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	BP4K
380	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	BP4K
381	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	BP4K
382	Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan	Jumlah Kelompok Tani mandiri & unggul	10 Klp	10 Klp	500,000	10 Klp	250,713	10 Klp	250,713	10 Klp	500,000	10 Klp	500,000	10 Klp	500,000	60 Klp	BP4K
383	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan PPL dan THL-TB-Penyuluh Pertanian (Orang)	221	221	370,425	221	450,000	221	370,425	221	370,425	221	370,425	221	370,425	221	BP4K



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D5	<b>Perkebunan</b>																
384	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	75%	100%	560,704	100%	560,704	100%	560,704	100%	560,704	100%	560,704	100%	560,704	100%	Dinas Perkebunan & Hortikultura
385	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	1,650,000	1 Paket	650,000	1 Paket	Dinas Perkebunan & Hortikultura								
386	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	30,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Dinas Perkebunan & Hortikultura
387	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	25%	60,000	30%	60,000	35%	60,000	40%	60,000	50%	60,000	60%	150,000	60%	Dinas Perkebunan & Hortikultura
388	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Perkebunan & Hortikultura
389	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	-	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Perkebunan & Hortikultura
390	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Dinas Perkebunan & Hortikultura



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
391	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5%	7%	400,000	7%	400,000	10%	400,000	15%	400,000	20%	400,000	25%	500,000	25%	Dinas Perkebunan & Hortikultura	
392	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Antar Pulau, Nasional & Internasional) (%)	10%	10%	500,000	10%	500,000	15%	500,000	20%	750,000	25%	750,000	30%	750,000	30%	Dinas Perkebunan & Hortikultura	
393	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Peningkatan produksi unggulan tanaman perkebunan (Ton)	42,474	42,474	7,500,000	61,965	6,489,825	81,816	7,500,000	102,009	8,500,000	122,596	9,000,000	196,035	10,000,000	606,895	Dinas Perkebunan & Hortikultura	
		a. Kakao b. Kelapa Dalam c. Lada d. Tebu e. Jeruk Siam f. Jahe g. Cabe h. Kelapa Sawit		9,045 3,635 1,099 - 394 6,254 22,047 -		10,340 4,172 1,209 17,500 433 6,254 22,047 10		11,891 4,798 1,329 35,000 477 6,254 22,047 20			13,674 5,518 1,462 52,500 524 6,254 22,047 30		15,725 6,345 1,608 70,000 577 6,254 22,047 40		18,083 7,297 1,769 140,000 535 6,254 22,047 50		18,083 7,297 1,769 140,000 535 6,254 22,047 50	
<b>D6</b>	<b>Kehutanan</b>																	
394	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	60%	100%	1,192,529	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	Dinas Kehutanan	
395	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	1,114,862	1 Paket	500,000	1 Paket	500,000	1 Paket	500,000	1 Paket	500,000	1 Paket	500,000	1 Paket	Dinas Kehutanan	
396	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	88,450	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Dinas Kehutanan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
397	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	106,852	40%	106,852	50%	106,852	60%	106,852	70%	106,852	80%	106,852	80%	Dinas Kehutanan
398	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	60%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Kehutanan
399	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Kehutanan
400	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	
401	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Peningkatan Luas dan Produktifitas Hutan Rakyat berbasis Desa (%)	0	3%	279,810	5%	350,000	7%	400,000	8%	450,000	9%	500,000	10%	279,810	10%	Dinas Kehutanan
402	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase luas dan lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0	2%	6,783,726	5%	6,783,726	10%	6,783,726	15%	6,783,726	20%	6,783,726	25%	6,783,726	25%	Dinas Kehutanan
403	Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan	Penurunan Tingkat Illegal Logging (kasus)	20-30	20-30	500,000	20-30	650,000	15-25	750,000	10-20	850,000	5-10	950,000	< 5	1,000,000	< 5	Dinas Kehutanan
404	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Jumlah IKM berbasis Sumber Daya Hutan (Jumlah IKM)	20	3	250,000	3	350,000	4	450,000	5	550,000	6	650,000	7	750,000	48	Dinas Kehutanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D7	Energi dan sumber daya mineral																
405	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	60%	100%	1,065,249	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	Distamben
406	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	445,500	1 Paket	445,500	1 Paket	445,500	1 Paket	445,500	1 Paket	445,500	1 Paket	445,500	1 Paket	Distamben
407	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	20%	30%	50,000	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	80%	Distamben
408	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	209,248	35%	209,248	40%	209,248	45%	209,248	50%	209,248	60%	209,248	60%	Distamben
409	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Distamben
410	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Distamben
411	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	50,000	3	60,000	4	70,000	5	80,000	5	Distamben



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
412	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan (%)	50%	50%	600,505	40%	600,505	30%	600,505	20%	600,505	10%	600,505	0%	600,505	0%	Distamben
413	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase Elektrifikasi (%)	42.19%	45%	320,000	50%	400,000	55%	500,000	60%	600,000	65%	700,000	70%	800,000	70%	Distamben
		Pembangunan Penerangan Jalan Umum (Paket)	1	1 Paket	250,000	1 Paket	250,000	1 Paket	250,000	1 Paket	300,000	1 Paket	350,000	1 Paket	400,000	1 Paket	Distamben
414	Program Pengawasan Distribusi Minyak & Gas Bumi	Persentase Jumlah pelanggaran Distribusi Minyak & Gas Bumi (%)	50%	50%	50,000	40%	75,000	30%	75,000	20%	100,000	10%	125,000	0%	150,000	0%	Distamben
<b>D8</b>	<b>Perdagangan</b>																
415	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara akuntabel dan Tepat Waktu (%)	70%	100%	1,058,410	100%	600,000	100%	600,000	100%	600,000	100%	600,000	100%	600,000	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
416	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana & Prasarana yang Representatif (Paket)	1	1 Paket	1,167,870	1 Paket	500,000	1 Paket	Dinas Perindustrian & Perdagangan								
417	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi 8 Jam Kerja Setiap Hari (%)	30%	40%	30,000	50%	30,000	60%	30,000	70%	30,000	80%	30,000	100%	30,000	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
418	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi & Kinerja Tinggi (%)	20%	30%	100,000	40%	100,000	50%	100,000	60%	100,000	70%	100,000	80%	200,000	80%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
419	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat & Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu (%)	75%	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
420	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan yang berbasis on-line (Paket)	0	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	30,000	1 Paket	Dinas Perindustrian & Perdagangan
421	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP (Skala)	1	1	40,000	2	50,000	2	60,000	3	70,000	4	70,000	5	80,000	5	Dinas Perindustrian & Perdagangan
422	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase penurunan temuan barang & jasa yang tidak sesuai UU Perlindungan Konsumen (%)	70%	50%	150,000	40%	150,000	30%	200,000	20%	250,000	10%	300,000	5%	350,000	5%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
423	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pasar yang Representatif (%)	10%	10%	20,841,620	20%	12,000,000	30%	15,000,000	40%	15,000,000	50%	15,000,000	60%	15,000,000	60%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
424	Program Pengembangan Sistem Resi Gudang	Terselenggaranya Sistem Resi Gudang (Paket)	2	2 Paket	250,000	2 Paket	500,000	2 Paket	750,000	2 Paket	1,000,000	2 Paket	1,250,000	2 Paket	2,250,000	2 Paket	Dinas Perindustrian & Perdagangan
425	Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (%)	0	5%	3,000,000	10%	4,000,000	15%	5,000,000	20%	10,000,000	25%	12,500,000	30%	15,000,000	30%	Dinas Perindustrian & Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggungjawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Target	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D9	Perindustrian																
426	Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	10.5%	12.50%	7,200,000	16.50%	7,200,000	20.50%	7,200,000	25%	7,000,000	30%	7,000,000	35%	8,000,000	35.0%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri																
427	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menggunakan Teknologi Industri	0	3%	1,000,000	5%	1,000,000	7%	950,000	10%	1,100,000	12%	1,200,000	20%	2,500,000	15%	Dinas Perindustrian & Perdagangan
D10	Transmigrasi																
428	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah lokasi bina dan KTM yang dikembangkan (Unit)	5	5	4,000,000	5	4,000,000	5	5,000,000	5	6,000,000	5	7,000,000	5	8,000,000	5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
					625,843,102		700,488,432		775,267,800		849,450,652		923,731,715		997,829,307		

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	10	15	30	45	60	67	75
2	Indeks Pelayanan Umum Desa	Indeks	50.30	50.35	50.75	60.00	60.25	60.50	60.75
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks	50.07	69.10	69.30	69.50	69.70	70.00	70.20
4	Nilai LAKIP	Poin	C	C	CC	B	B	B	B
5	Opini Pengelolaan Keuangan	Opini/ Tahun	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Tingkat Maturitas SPIP	Skala	1	1	2	2	3	4	5
7	Level Kapabilitas APIP	Skala	1	1	2	2	3	4	5
8	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7.52	7.55	7.7	7.9	8	8.25	9
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.65	11.7	11.85	12	12.2	12.5	13
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.77	69.77	69.8	69.85	69.95	70	70.1
11	Pengeluaran Perkapita	Juta/ Kapita	8.375	8.4	8.5	8.6	8.8	9	9.3
12	Indeks Aksesibilitas Pembangunan Desa	Indeks	80.88	80.9	80.95	90	90.2	90.40	90.60
13	Indeks Infrastruktur Pembangunan Desa	Indeks	36.15	36.25	36.5	36.75	37	37.25	37.5

14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	2.75	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4
15	Share Komoditi Unggulan di pasar regional (Sultra)								
	a. Komoditas Perkebunan	%	17.95	18.2	18.5	18.8	20.0	22.5	25.0
	b. Komoditas Perikanan	%	19.95	20.1	20.5	20.8	21.0	22.0	23.5
	c. Komoditas Tanaman Pangan & Hortikultura	%	19	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0
	d. Komoditas Kehutanan	%	34	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
	e. Pariwisata & Budaya	%	N/A	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5
16	Prosentase peningkatan indeks ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana	%	N/A	10	20	30	40	50	60
17	Indeks Ketersediaan Pangan (IKP)	Indeks	1.27	1.27	1.35	1.40	1.50	1.70	2.00
18	Indeks Kerawanan Pangan Daerah/ Indeks Aksesibilitas Pangan	Indeks	49	49	42	32	25	23	<20
19	Neraca Bahan Makanan/ Indeks Pemanfaatan Pangan	Indeks	2.92	2.92	3	3.2	3.4	3.7	3.9